Pemerintah Daerah
Kabupaten Sijunjung



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Sijunjung
Tahun 2025









KATA PENGANTAR

Alhamdulilahirabbil a'lamiin, berkat izin, rahmat dan karunia Allah SWT, dapat disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 sesuai dengan kaidah penyusunan secara tepat waktu dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan salah satu media peyampaian akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. LKjIP Tahun 2025 ini disajikan berpedoman kepada Perjajian Kinerja Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2021-2025 dan Perjajian Kinerja Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030. Sedagkan secara substansi LKjIP Tahun 2025 berisikan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, faktor keberhasilan dan faktor peghambat pencapaian kinerja serta strategi peningkatan kualitas kinerja dan analisi efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah daerah

Akhir kata, kepada Tim Penyusun LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya dalam menyusun laporan yang strategis ini. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dari perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan yang lebih berdampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Muaro Sijunjung, Maret 2026
Bupati Sijunjung,

BENNY DWIFA YUSWIR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini mencakup pengelolaan data, pengukuran dan pelaporan kinerja disertai akuntabilitas keuangan.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 diuraikan berdasarkan kondisi awal kinerja dan perubahan kinerja, mengingat pada tahun 2025 merupakan tahun transisi karena adanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung masa bakti 2025-2030. Sehingga analisis capaian kinerja merujuk pada; 1) Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dan 2) Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/AA.01/2025, perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, tanggal 14 November 2025.

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 tercapai cukup optimal. Hal ini ditandai proporsi pencapaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebesar 75,0 persen atau 12 dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 8 (delapan) sasaran strategis RPJMD Tahun 2021-2026 dan proporsi pencapaian kinerja kategori “sangat tinggi” 82,35 persen atau 14 dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 13 (tiga belas) sasaran strategis Tahun 2025-2029.

Sedangkan dari sisi pencapaian terhadap target akhir RPJMD keseluruhan pencapaian IKU tahun 2025 berjalan secara *on the track* sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan**.** Hal Ini didukung beberapa faktor keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang berbasis inovatif dan kolaboratif. Sehingga terdapat 2 (dua) IKU yang telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu; 1) Indeks Pembangunan Keluarga, dan 2) Indeks ABS-SBK. Oleh sebab pada tahun rencana kinerja berikutnya dilakukan penyesuaian target kedua IKU tersebut, yang akan diinternalisasi ke dalam perubahan RPJMD Tahun 2025-2029. Di sisi lain, terdapat juga faktor penghambat pencapaian kinerja, baik dari sisi faktor internal, maupun faktor eksternal. Sehingga diciptakan strategi yang tepat untuk mengatasi faktor pengambat pencapaian kinerja.

Di satu sisi, berdasarkan analisis penggunaan sumber daya anggaran secara efektif terhadap pencapaian kinerja terdapat 5 (lima) sasaran strategis penggunaan anggaran kurang efektif terhadap pencapaian target kinerja yaitu; 1) sasaran meningkatnya produktivitas masyarakat, 2) sasaran meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing, 3) sasaran meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih, 4) sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana, dan 5) sasaran meningkatnya kualitas infastruktur wilayah. Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025, diperoleh efisiensi belanja sebesar 6,86 persen dengan nilai sebesar Rp72.403.346.645,- dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 1.055.908.934.175,-.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Grafik viii
Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Gambaran Umum Organisasi 2
1.4.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah 2
1.4.2 Data Kepegawaian/Sumber Daya Aparatur 4
1.5 Proses Bisnis 6
1.6 Isu Strategis Daerah 7
1.7 Analisis Srategis Daerah 10
1.8 Sistimatika Penyusunan 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 12
2.1.1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 12
2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 18
2.1.3 Rencana Kerja dan Anggaran 19
2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029
2.2.1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 23
2.2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35
2.2.3 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 42
3.1.1 *Overview* Capaian Kinerja 43
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 44
3.2 Capaian Perubahan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 105
3.2.1 *Overview* Capaian Kinerja 105
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 108
3.3 Analisis Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 142
3.3.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 142
3.3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia 143
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2025 143
3.4.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 143
3.4.2 Realisasi Anggaran Belanja Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025 144

BAB IV PENUTUP 153
4.1 Kesimpulan 153
4.2 Upaya Akselerasi Pencapaian Kinerja 154

Lampiran :
1. Perjajian Kinerja Bupati Tahun 2025.
2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Penjenjangan Kinerja (*cascading*) Rencana Strategis Tahun 2025-2029
4. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/70/KPTS-BPT-2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.
5. Definisi Operasional IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.
6. Pernyataan Reviu Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung terhadap LKJIP 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2026	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025	18
Tabel 2.3	Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025	19
Tabel 2.4	Arti dan Makna Visi RPJMD Tahun 2025-2029	24
Tabel 2.5	Arti dan Makna Misi RPJMD Tahun 2025-2029	26
Tabel 2.6	Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029	27
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	29
Tabel 2.8	Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif	29
Tabel 2.9	Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital	30
Tabel 2.10	Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana secara Berkelanjutan	31
Tabel 2.11	Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan	31
Tabel 2.12	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	35
Tabel 2.13	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025	36
Tabel 2.14	Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Penyesuaian Jumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran serta Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2025	43
Tabel 3.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2025	43
Tabel 3.3	Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025	44
Tabel 3.4	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	44
Tabel 3.5	Capaian Nilai Komponen AKIP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2025	49
Tabel 3.6	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	54
Tabel 3.7	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	55
Tabel 3.8	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	61
Tabel 3.9	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	62
Tabel 3.10	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	73
Tabel 3.11	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	74
Tabel 3.12	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	78
Tabel 3.13	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	78
Tabel 3.14	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	82
Tabel 3.15	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 6 Tahun 2025	83
Tabel 3.16	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2025	94
Tabel 3.17	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 7 Tahun 2025	95
Tabel 3.18	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2025	101
Tabel 3.19	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 8 Tahun 2025	102

Tabel 3.20	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2025	105
Tabel 3.21	Misi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran serta Jumlah Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025	105
Tabel 3.22	Rekapitulasi Capaian Perubahan Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2025	107
Tabel 3.23	Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025	107
Tabel 3.24	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 1 Perubahan Kinerja Tahun 2025	108
Tabel 3.25	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	110
Tabel 3.26	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 2 Perubahan Kinerja Tahun 2025	111
Tabel 3.27	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	114
Tabel 3.28	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	115
Tabel 3.29	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	116
Tabel 3.30	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	116
Tabel 3.31	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	117
Tabel 3.32	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	118
Tabel 3.33	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	120
Tabel 3.34	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 6 Tahun 2025	120
Tabel 3.35	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2025	123
Tabel 3.36	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 7 Tahun 2025	123
Tabel 3.37	Capaian Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2025	125
Tabel 3.38	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2025	126
Tabel 3.39	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 8 Tahun 2025	127
Tabel 3.40	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2025	130
Tabel 3.41	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 9 Tahun 2025	131
Tabel 3.42	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 9 Tahun 2025	133
Tabel 3.43	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 10 Tahun 2025	133
Tabel 3.44	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 10 Tahun 2025	134
Tabel 3.45	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 11 Tahun 2025	135
Tabel 3.46	Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	136
Tabel 3.47	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 11 Tahun 2025	138
Tabel 3.48	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 12 Tahun 2025	138
Tabel 3.49	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 12 Tahun 2025	140
Tabel 3.50	Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 13 Tahun 2025	140
Tabel 3.51	Capaian Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2025	141
Tabel 3.52	Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 13 Tahun 2025	142
Tabel 3.53	Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaiaan Kinerja Tahun 2025	142
Tabel 3.54	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	145
Tabel 3.55	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	146
Tabel 3.56	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	146
Tabel 3.57	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	147
Tabel 3.58	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	147
Tabel 3.59	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2025	148
Tabel 3.60	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2025	148
Tabel 3.61	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2025	149

Tabel 3.62	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 9 Tahun 2025	150
Tabel 3.63	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 10 Tahun 2025	151
Tabel 3.64	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 11 Tahun 2025	151
Tabel 3.65	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 12 Tahun 2025	152
Tabel 3.66	Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 13 Tahun 2025	152

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi jumlah PNS dan PPPK Kab. Sijunjung kondisi s.d 31 Desember 2025	5
Grafik 1.2	Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 berdasarkan Golongan	5
Grafik 1.3	ASN Kab. Sijunjung berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Grafik 3.1	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	46
Grafik 3.2	Capaian Nilai AKIP Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	49
Grafik 3.3	Capaian Nilai MRI Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	52
Grafik 3.4	Capaian Nilai IPP Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	56
Grafik 3.5	Capaian Nilai INODA Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	59
Grafik 3.6	Capaian Nilai INODA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	59
Grafik 3.7	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	64
Grafik 3.8	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	64
Grafik 3.9	Capaian Gini Rasio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	67
Grafik 3.10	Capaian Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	68
Grafik 3.11	Capaian PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	71
Grafik 3.12	Capaian PDRB per-Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	71
Grafik 3.13	Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	75
Grafik 3.14	Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	76
Grafik 3.15	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	80
Grafik 3.16	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	80
Grafik 3.17	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	84
Grafik 3.18	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	85
Grafik 3.19	Capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2025	89
Grafik 3.20	Capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	89
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	92
Grafik 3.22	Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	93
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	97
Grafik 3.24	Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Jalan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	100

Grafik 3.25	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	103
Grafik 3.26	Capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	119
Grafik 3.27	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2025	121
Grafik 3.28	Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasioanl Tahun 2025	122
Grafik 3.29	Capaian Nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025	129
Grafik 3.30	Capaian Nilai EKPPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2025	130
Grafik 3.31	Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	137
Grafik 3.32	Proporsi Realisasi dan Efisiensi Perubahan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	4
Gambar 1.2	Analisis Strategis Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	10
Gambar 2.1	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	14
Gambar 2.2	Arsitektur Kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	15
Gambar 2.3	Arsitektur Kinerja Misi 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	16
Gambar 2.4	Arsitektur Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	16
Gambar 2.5	Arsitektur Kinerja Misi 4 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	17
Gambar 2.6	Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	26
Gambar 2.7	Arsitektur Kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	32
Gambar 2.8	Arsitektur Kinerja Misi 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	32
Gambar 2.9	Arsitektur Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	33
Gambar 2.10	Arsitektur Kinerja Misi 4 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	33
Gambar 2.11	Arsitektur Kinerja Misi 5 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029	34
Gambar 3.1	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	45
Gambar 3.2	Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	48
Gambar 3.3	Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	51
Gambar 3.4	Capaian Nilai IPP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	55
Gambar 3.5	Capaian Nilai INODA Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	58
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	63
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Gini Rasio Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	67
Gambar 3.8	Capaian Kinerja PDRB per-Kapita Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	70
Gambar 3.9	Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	74
Gambar 3.10	Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	79
Gambar 3.11	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	83
Gambar 3.12	Capaian Kinerja Prevalensi Balita Stunting Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	88
Gambar 3.13	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	89
Gambar 3.14	Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	96
Gambar 3.15	Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Jalan Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	99
Gambar 3.16	Capaian Kinerja Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026	102
Gambar 3.17	Capaian Perubahan Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	109
Gambar 3.18	Capaian Perubahan Kinerja PDRB per-Kapita Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	110
Gambar 3.19	Capaian Perubahan Kinerja Angka Kemskinan Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	112
Gambar 3.20	Capaian Tingkat Kemskinan Ekstrem Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	113

Gambar 3.21	Capaian Perubahan Kinerja Gini Rasio Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	114
Gambar 3.23	Capaian Perubahan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	117
Gambar 3.24	Capaian Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	119
Gambar 3.25	Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	121
Gambar 3.26	Capaian Kinerja Indeks ABS-SBK Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	124
Gambar 3.27	Capaian Kinerja Perubahan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	128
Gambar 3.28	Capaian Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	129
Gambar 3.29	Capaian Kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	132
Gambar 3.30	Capaian Perubahan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	134
Gambar 3.31	Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	136
Gambar 3.32	Capaian Perubahan Kinerja Indeks Infrastruktur Jalan Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	139
Gambar 3.33	Capaian Kinerja Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	141



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governanc*e yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keber hasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan Kinerja tersebut, menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran instansi pemerintah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kepada para *stakeholder,* sehingga sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi *stakeholder* untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama kurun waktu tahun 2025.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan LKjiP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
6. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
9. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/70/KPTS-BPT-2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan aggaran dan sumber daya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Unyuk menyajikan analisis ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Untuk menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja serta mengukur efektivitas pemanfaatan dan penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025.
3. Untuk bahan evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung memiliki jumlah perangkat daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah dan 36 (tiga puluh enam) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Berdasarkan regulasi terkait penyederhanaan birokrasi pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan penyesuaian, terutama terhadap Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP) yang disederhanakan dari 438 menjadi 257, terdiri dari; 85 JA menjadi 82 JA

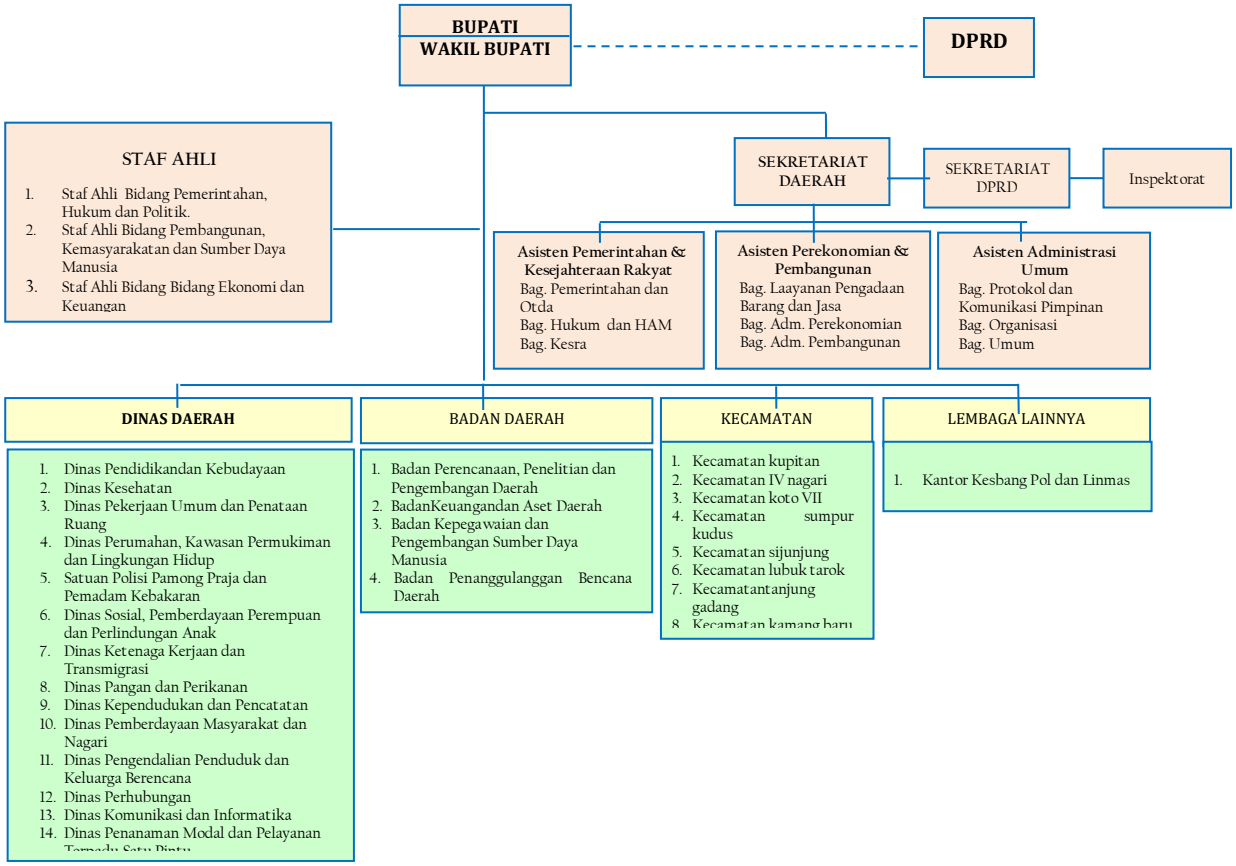
serta 353 JP menjadi 175 JP. Di sisi lain, terdapat perangkat daerah yang belum dilakukan penyederhanaan birokrasi yaitu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Camat karena mengacu pada regulasi tersendiri.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sjunjung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2019 telah menetapkan jumlah organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian.
2. Sekretariat DPRD.
3. Inspektorat Daerah.
4. 18 (delapan belas) Dinas Daerah, terdiri atas :
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Dinas Kesehatan;
   3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4) Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
   5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
   8) Dinas Perhubungan;
   9) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   10) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
   11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   12) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
   13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
   14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   15) Dinas Pangan dan Perikanan;
   16) Dinas Pertanian;
   17) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   18) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. 4 (empat) Badan Daerah, terdiri atas:
   1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. 9 (Sembilan) Kantor, terdiri atas:
   1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
   2) Kantor Camat Sijunjung;
   3) Kantor Camat IV Nagari;
   4) Kantor Camat Koto VII;
   5) Kantor Camat Kupitan;
   6) Kantor Camat Sumpur Kudus;
   7) Kantor Camat Lubuk Tarok;
   8) Kantor Camat Tanjung Gadang;
   9) Kantor Camat Kamang Baru.

Gambaran struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah



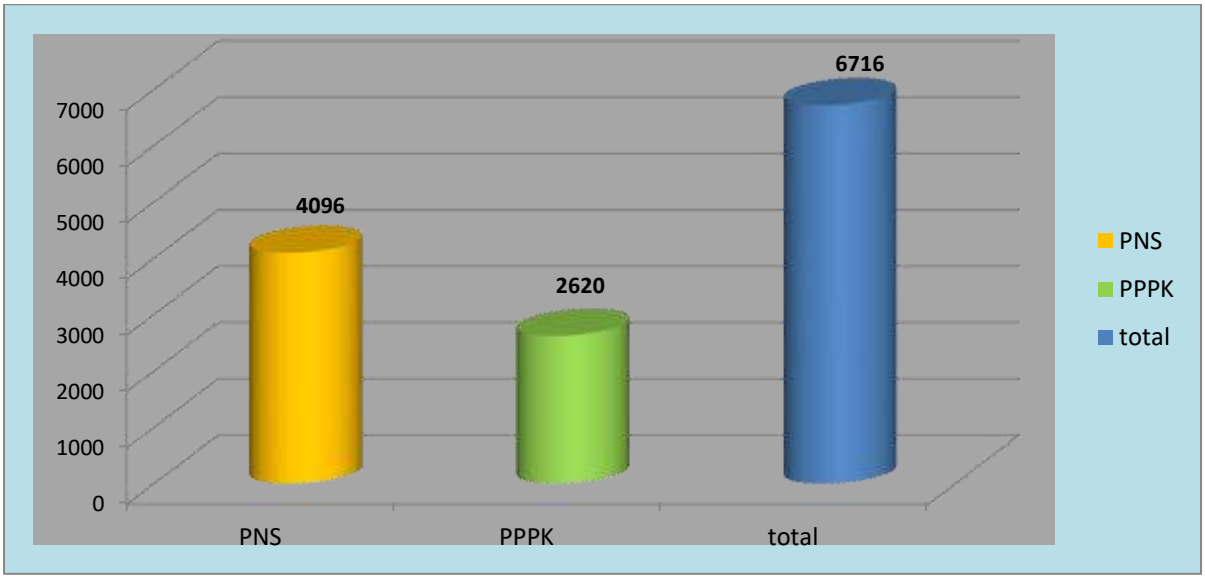
Sumber; Perda No. 12/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda No. 9/2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 2/2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perda No. 10/2021 tentang Perubahan Atas Pedar No.12/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah, 2026

1.4.2 Data Kepegawaian/Sumber Daya Aparatur

Salah satu unsur penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2025 antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilihat sebagai berikut :

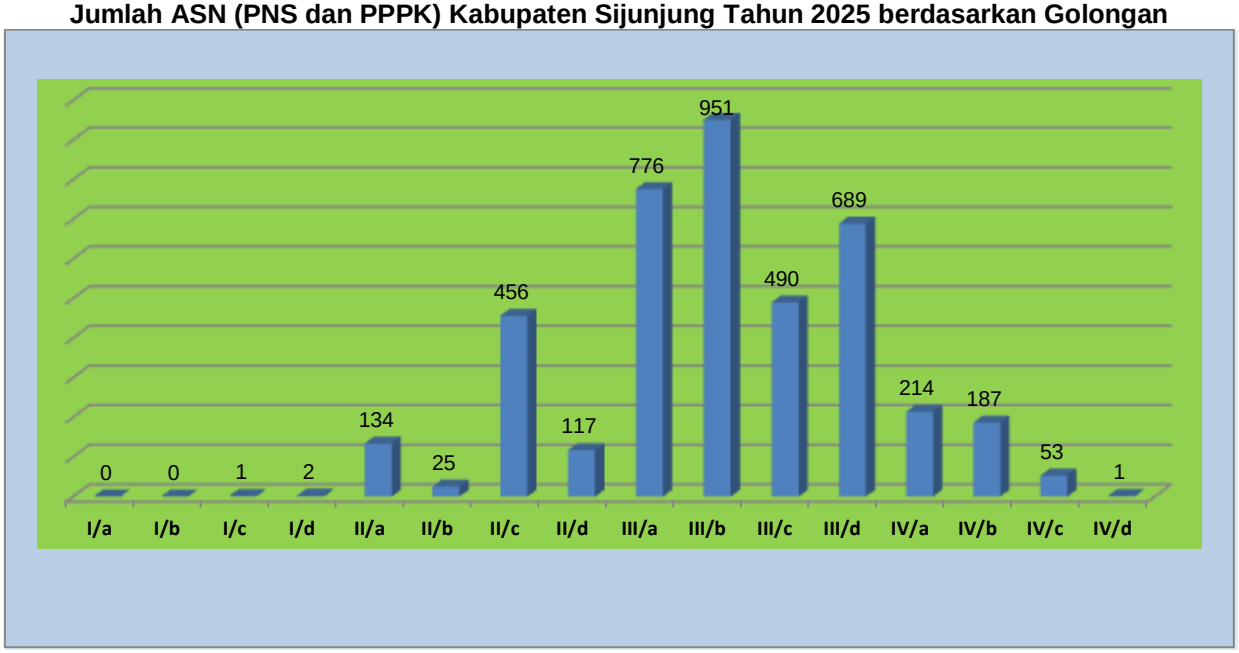
Grafik 1.1
Komposisi jumlah PNS dan PPPK Kab. Sijunjung kondisi s.d 31 Desember 2025



Sumber : BKPSDM Kab. Sijunjung, 2026

Jika dikelompokan berdasarkan golongan, ASN Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yang terbanyak golongan III yaitu sebanyak 2.906 orang, dan paling sedikit golongan I yaitu sebanyak 3 orang, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berdasarkan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

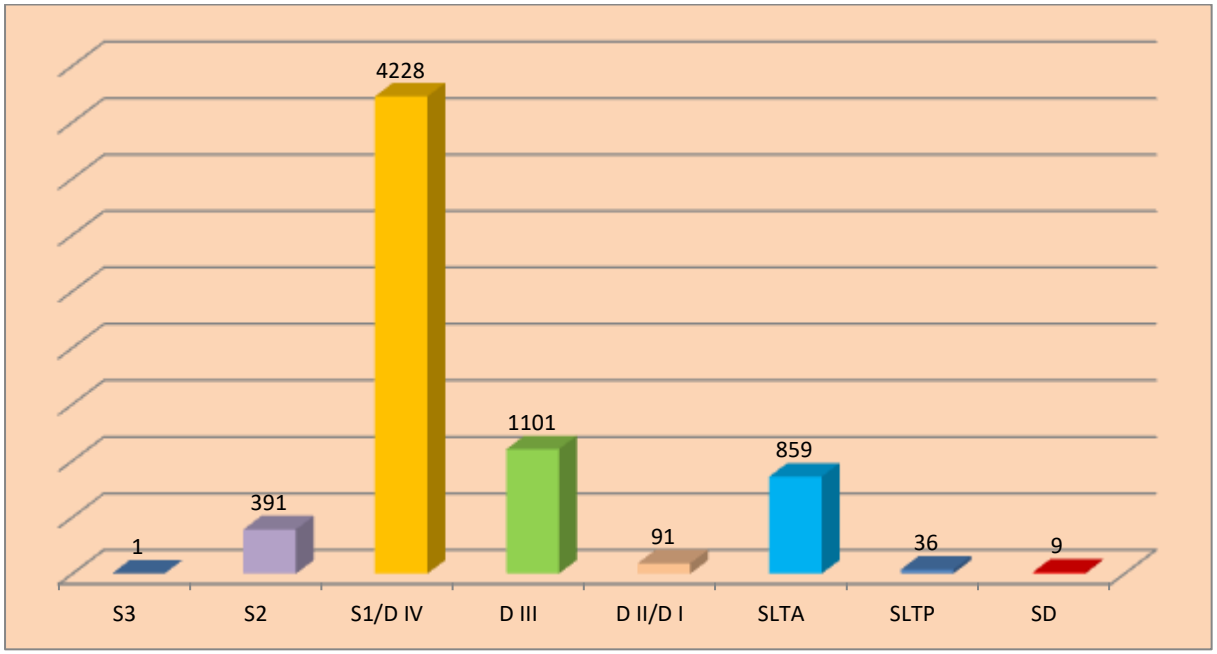
Grafik 1.2
Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 berdasarkan Golongan



Sumber : BKPSDM Kab. Sijunjung, 2026

Berdasarkan jenjang pendidikan secara umum Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sijunjung telah berpendidikan setingkat S1/D4 yaitu sebanyak 3.388 orang, dan paling sedikit masih berpendidikan Sekiolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 18 orang dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 orang. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sijujung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.3
ASN Kab. Sijunjung berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)



Sumber : BKPSDM Kab. Sijunjung, 2026

1.5 PROSES BISNIS

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan peta Probis adalah:

1. Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang menginte grasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digu nakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan

peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah

1.6 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merujuk pada permasalahan utama pembangunan daerah, sehingga dirumuskan isu-isu strategis daerah pada tahun 2025 yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselaraskan dengan program strategis nasional tahun 2025, sebagai berikut :

1. **Penghapusan kemiskinan ekstrem secara kolaboratif dan terintegratif**
   Kemiskinan ekstrem merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini, karena sejalan dengan target SDG"s tingkat kemiskinan di tahun 2030 nol (*zero poverty*) dan terhapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 sesuai dengan target nasional. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung yang berada dibawah garis kemiskinan Bank Dunia secara ekstrem. Pada tahun tahun 2023 jumlah penduduk miskin ekstrem 5,56 ribu jiwa dan tingkat kemiskinan ekstrem 2,21 persen dan tahun 2024 menurun menjadi 3,44 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 1,35 persen. Sedangkan penduduk penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan BPS pada tahun 2024 sebanyak 14,99 ribu orang. Berdasarkan data tersebut, penghapusan kemiskinan esktrim di Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2025 menjadi target prioritas. Sejalan dengan target tersebut, maka strategi dan kebijakan penghapusan kemisikinan ekstrim difokuskan kepada; 1) menurunkan beban pengeluaran masyarakat, 2) meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 3) mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Untuk efektifnya implementasi ketiga strategi dan kebijakan penghapusan kemisikinan ekstrem diperlukan kolaboratif dan integratif program *stakeholders.*

2. **Peningkatan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang merata dan berkeadilan**
   Pemberdayaan sosial ekonomi mayarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan isu strategis yang perlu dijadikan perhatian utama dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu, isu peningkatan pendapatan masyarakat dan ketimpangan berbasis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu strategis daerah dalam upaya menciptakan struktur ekonomi daerah yang kuat melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan serta dapat mengurangi kesenjangan pendapatan.

3. **Peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat**
   Isu pembangunan ini merupakan salah satu isu strategis daerah yang perlu dijadikan perhatian pada tahun 2025. Hal ini ditandai cenderung meningkatnya Tingkat pengangguran di kabupaten Sijunjung pada tahun 2024, TPT Kabupaten Sijunjung

mencapai 4,71 persen, angka ini menurun 0,16 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 4,87 persen. Di sisi lain, nilai investasi Kabupaten Sijunjung periode tahun 2021-2024 realisasi investasi meningkat dari Rp. 1,32 triliun pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 1,40 triliun pada tahun 2024, namun sedikit turun dari tahun 2023 sebesar Rp. 1,68 triliun. Namun kenaikan realisasi investasi tersebut, tidak memberikan korelasi yang positif terhadap kenaikan nilai PDRB dan belum memberikan kontribusi positif terhadap perluasan dan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia produktif. Berdasarkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Sijunjung yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, antara lain; 1) pemanfaatan lahan produktif, 2) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas, dan 3) pengembangan industri rumah tangga secara efektif. Ketiga potensi tersebut, dikelola dan dikembangkan secara efektif memberikan dampak terhadap penurunan angka pengganguran.

4. **Pemerataan tingkat pendidikan masyarakat berbasis kearifan lokal**
   Isu pemerataan tingkat pendidikan masyarakat merupakan isu penting yang menjadi prioritas utama pada tahun 2025. Hal ini ditandai harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Sijunjung pada 2024 sebesar 12,72 tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Sijunjung untuk memperoleh pendidikan formal hanya sampai jenjang pendidikan SMA/SMK. Rendahnya harapan lama sekolah juga diikuti dengan rendahnya rata-rata lama sekolah, pada tahun 2024 sebesar 8,7 tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Sijunjung lama mengenyam pendidikan formal sampai kelas III SLTP. Rendahnya rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sijunjung tersebut, maka diperhatikan dalam penangganan isu pendidikan adalah sistem pendidikan untuk semua (inclusif education). Artinya, setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang berkualitas serta dapat mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi serta pemerataan pendidikan guna mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat. Untuk menjawab isu strategis tersebut, perlu adanya kebijakan pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur melalu peningkatan kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang pendidikan serta penguatan nilai-nilai sosial budaya yang lebih dinamis.

5. **Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan**
   Isu pembangunan ini, memiliki kaitan erat dengan dengan umur panjang dan hidup sehat bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, umur dan hidup sehat masyarakat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 . Hal ini ditandai angka/usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung sebesar 72,59 tahun pada tahun 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif. Oleh karena itu, pada tahun 2025 arah kebijakan bidang kesehatan, seyogianya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Isu lain berkaitan dengan bidang kesehatan adalah tantangan bonus demografi, dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sijunjung terutama usia produktif akan menjadi beban yang berat dalam lima tahun ke depan, jika tidak diantisipasi sejak saat ini. Dinamika bonus demografi akan terlihat dampaknya dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan berupa penuaan penduduk (*population ageing*), dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Oleh sebab itu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada

tahun 2025 secara terstruktur dan berkelanjutan salah satu upaya mengantisipasi bonus demografi.

6. **Penurunan prevalansi stunting secara kovergensi**
   Isu stunting saat ini menjadi isu nasional karena berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik) dan pelayanan kesehatansehingga stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Oleh karena itu, untuk menurun prevalensi stunting di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 merupakan salah satu isu strategis daerah yang akan menjadi fokus pembangunan. Mengingat angka prevalensi stunting sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat sebesar 28,5 persen. Berdasarkan data tersebut, angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung masih diatas target nasional pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Oleh sebab itu, dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2025 diperlukan aksi konvergensi terhadap intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilaksanakan secara teritegratif dan terpadu

7. **Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar berwawasan lingkungan**
   Isu pembangunan ini merupakan isu-isu aktual yang terjadi saat ini, mengingat masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar. Sehingga berimplikasi terhadap rendahnya daya saing daerah dan menimbulkan hilangnya peluang investasi di Kabupaten Sijunjung. Sejatinya, dalam menciptakan peluang investasi dibutuhkan daya saing ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Isu strategis daerah dalam menjawab isu pembangunan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur wilayah, terutama jalan maupun infrastruktur dasar (irigasi dan PSU) yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga dapat terjaga pembangunan yang berkelanjutan yang berbasis lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Penangganan isu strategis daerah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah serta terbangunnya lingkungan yang sehat dan terjaganya ekositem lingkungan, Sehingga ditingkatkan penyediaan sumber air minum yang layak dan sanitasi yang aman melalui pembangunan IPLT serta lingkungan yang bersih dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

8. **Peningkatan kualitas kinerja birokrasi yang efektif, adaptif, responsif dan inovatif**
   Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan. Jika didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi yang efektif, tata laksana yang optimal, akuntabilitas kinerja pembangunan, sistem pengawasan yang efektif, pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu melakukan manajemen perubahan melalui deregulasi kebijakan dan penataan organisasi yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta pengembangan teknologi informasi sebagai sarana efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintah yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu, pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan sampai pelayanan pendidikan dan kesehatan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan massyarakat melalui tanggapan yang cepat dan memberikan perubahan layanan yang bersifat efektif dan efisien. Sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Pemeritah Daerah.

9. **Penguatan kelembagaan agama dan adat secara terstruktur dan berkesinambungan**
   Agama dan adat dalam adat minangkabau satu kesatuang yang saling terkait,hal ini tercerminkan dari arti dan makna yang terkandung pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oleh sebab itu, mengantisipasi terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat, maka mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan agama dan adat menjadi isu strategis pada tahun 2025. Mengingat peran dan fungsi tokoh-tokoh agama dan adat belum optimalnya hal ini ditandai cukup tingginya jumlah sengketa adat.

1.7 ANALISIS STRATEGIS DAERAH

Analisis strategis daerah dalam upaya pencapaian kinerja dari setiap indikator sasaran menggunakan pendekatan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threat*). Analisis SWOT tersebut, untuk melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal daerah yang menjadi tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan. Sehingga dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah untuk lima tahun mendatang. Analisis SWOT dalam perumusan analisis strategis Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2
Analisis Strategis Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (*Strengths*-S) :	Kelemahan (*Weaknesses*-W) :
	• Potensi sumber daya alam cukup besar • Posisi geografis daerah cukup strategis • Tingginya jumlah penduduk usia produktif • Kawasan geopark nasional • Kearifan lokal masih terjaga • Tingginya sumberdaya aparatur daerah yang produktif	• Terbatasnya SDM yang berkualitas dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah sektor strategis daerah. • Belum optimalnya ketahanan sosial budaya dan resiliensi bencana • Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar • Terbatasnya ruang fiskal pembangunan daerah • Belum tersedianya rencana induk pengembangan sektor strategis daerah.
Peluang (Opportunity-O) : • Pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi, khususnya sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan • Berkembangnya daerah tetangga • Konektivitas daerah tetangga dan ibukota provinsi cukup memadai. • Pengembangan kawasan industri nasional di wilayah timur sumatera (Provinsi Riau)	**Strategi S-O :** • Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian dan ketahanan pangan serta sektor strategis berbasis teknologi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi • Menciptakan kebijakan pemerataan pembangunan berbasis pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkeadilan • Menciptakan regulasi sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi secara terintegratif dan kolaboratif	**Strategi W-O :** • Memperkuat tata kelola layanan pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kelembagaan berbasis SPM dan standar nasional • Mengembangkan pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan dunia usaha • Memperluas akses kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif secara efektif dan berkelanjutan • Mendorong peran aktif dunia usaha membangun konektivitas wilayah
Ancaman (Threats-T) : • Belum stabilnya kondisi geo-politik global, sehingga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan nasional • Arus pengaruh budaya globalisasi semakin berkembang. • Tuntutan supremasi hukum semakin tinggi • Disrupsi teknologi • Potensi bencana alam longsor dan banjir cukup tinggi	**Strategi S-T :** • Menciptakan kebijakan kemudahan dalam ber-investasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro • Mengembangkan pemanfaatan SDA berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan secara berkelanjutan. • Mendorong masyarakat menjujung tinggi supremasi hukum berbasis kearifan lokal	**Strategi S-T :** • Memperkuat keluarga berkualitas dan kesetaraan gender berbasis kearifan lokal melalui penguatan masyarakat inklusif • Memperkuat moderasi beragama dan pelestarian warisan budaya berbasis kearifan lokal untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang adaptif • Menciptakan regulasi terhadap resiliensi bencana terhadap perubahan iklim berbasis kearifan lokal

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

1.8 SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, tugas, fungsi dan struktur organisasi dan SDM lingkup Pemerintah Daerah, isu strategis daerah dan sistematika penulisan dokumen LKjIP.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Menjabarkan terkait perencanaan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang mencakup dasar perencanaan kinerja, perjanjian kinerja Kepala Daerah di Tahun 2025 dan program dan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran kinerja di tahun 2025.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, baik awal maupun perubahan. Analisis capaian kinerja tahun 2025 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target 2025, target perencanaan jangka menengah, standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta penyajian realisasi anggaran.

BAB 4. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung di tahun 2025 dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyajian perencanaan kinerja pada bab ini diuraikan berdasarkan kondisi awal kinerja dan perubahan kinerja, mengingat pada tahun 2025 merupakan tahun transisi karena adanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung masa bakti 2025-2030. Oleh sebab itu, sajian rencana strategis dibagi 2 (dua), terdiri dari: 1) Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dan 2) Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana strategis dalam tataran Pemerintah Daerah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Secara substantf RPJMD merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD secara sistimatis mengedepankan isu-isu strategis daerah yang diterjemahkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Substansi RPJMD tersebut, dijabarkan kedalam bentuk strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip *money follow program* dan *program follow result.*

2.1.1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

2.1.1.1 Visi

Mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis daerah lima tahun mendatang, maka visi RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, adalah:

VISI

"Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani"

Perumusan visi RPJMD tersebut, merujuk pada visi Kepala Daerah terpilih dan mencermati dari perspektif pembangunan yang berkelanjutan konsep dari visi Kepala Daerah terpilih tersebut, memiliki arti dan makna yang kontekstual terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang serta menyeleraskan dengan tema pembangunan tahapan/fase ke-IV RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025.

Arti dan makna dari visi RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani	Kab. Sijunjung Sejahtera	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung yang didukung dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial budaya masyarakat yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat dan nilai tukar petani serta menurunnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio.
	Kab. Sijunjung Unggul	Terwujudnya kemampuan dan kekuatan sesuai dengan potensi yang ada untuk mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga Kabupaten Sijunjung unggul secara kualitas pembangunan ditingkat regional dan nasional yang ditandai meningkatnya posisi daerah terhadap rata-rata provinsi dan nasional
	Kab. Sijunjung Berbudaya	Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, sopan dan berbudi pekerti luhur, berakhlak dan berkesopanan serta memiliki rasa toleransi sesuai dengan falsafah adat minangkabau "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" yang ditandai berkurangnya konflik dan sengketa antar adat/nagari
	Masyarakat Madani	Cerminan masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta masyarakat demokratis, maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

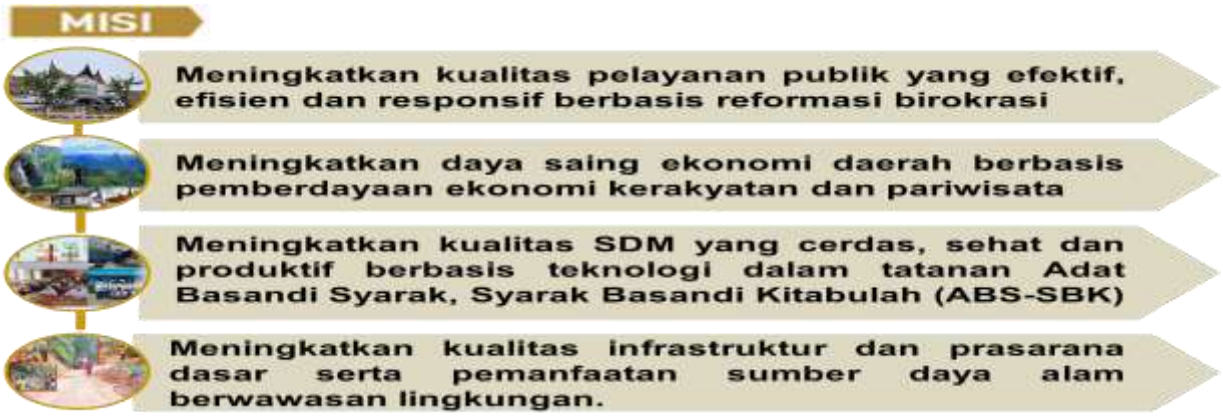
Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, unggul dan berbudaya menuju masyarakat madani harus didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang memadai serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Sehingga menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, sosial budaya dan kemudahan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai luhur yang

mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat dalam upaya terwujudnya masyarakat yang madani.

2.1.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Sijunjung yang berkelanjutan dan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang kuat.

Mewujudkan visi RPJMD yang telah ditetapkan diatas, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal daerah serta isu strategis daerah, maka misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:



Empat butir misi diatas, merupakan janji politis Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Sedangkan arti dan makna masing-masing misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, diuraikan melalui gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026



Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

2.1.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Tujuan adalah pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi dalam penangganan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang capaian kinerjanya terlihat pada hasil akhir (*final outcame)*. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, relevan dan dapat dicapai serta rasional. Sehingga perkembangannya terlihat pada pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan *(long term outcame)* tahunan.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat dirumuskan melalui metode pohon kinerja dan *cascading*. Sehingga terlihat jelas pembagian peran dan kinerja secara berjenjang yang diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan 2) Indikator Kinerja Kunci merupakan alat ukur dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerinatah Daerah (LPPD). Kedua laporan dimaksud merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

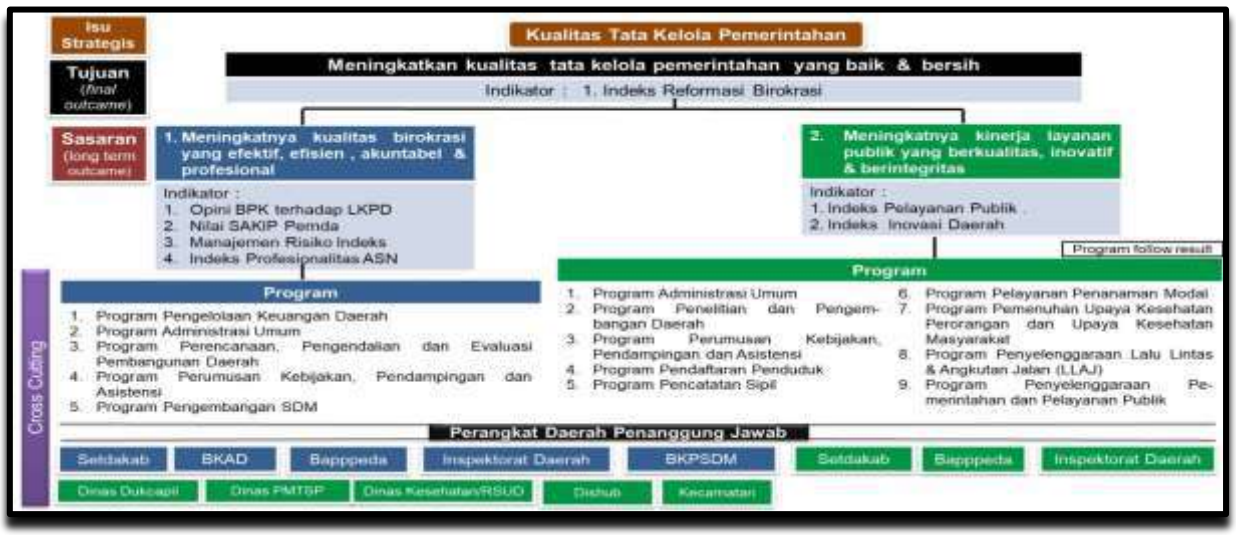
2.1.1.4 Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan arsitektur kinerja yang akan memperlihatkan adanya keterkaitan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, sehingga dapat terlihat dengan jelas.

1. **Arsitektur kinerja misi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi**

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.2
Arsitektur Kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

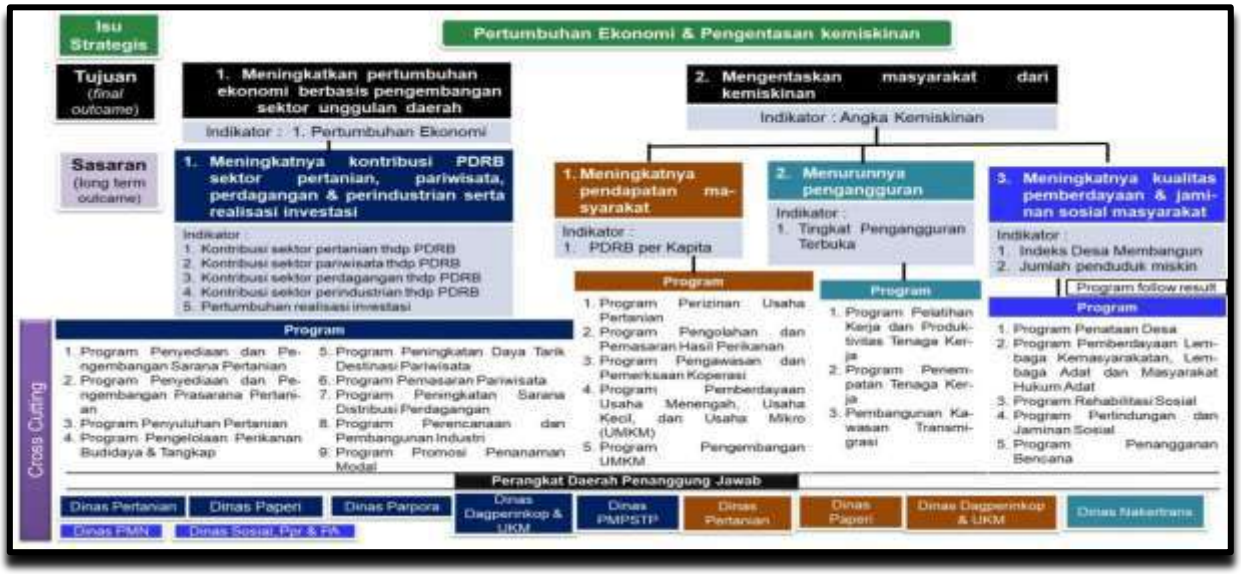


Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

2. Arsitektur kinerja misi meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3
Arsitektur Kinerja Misi 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

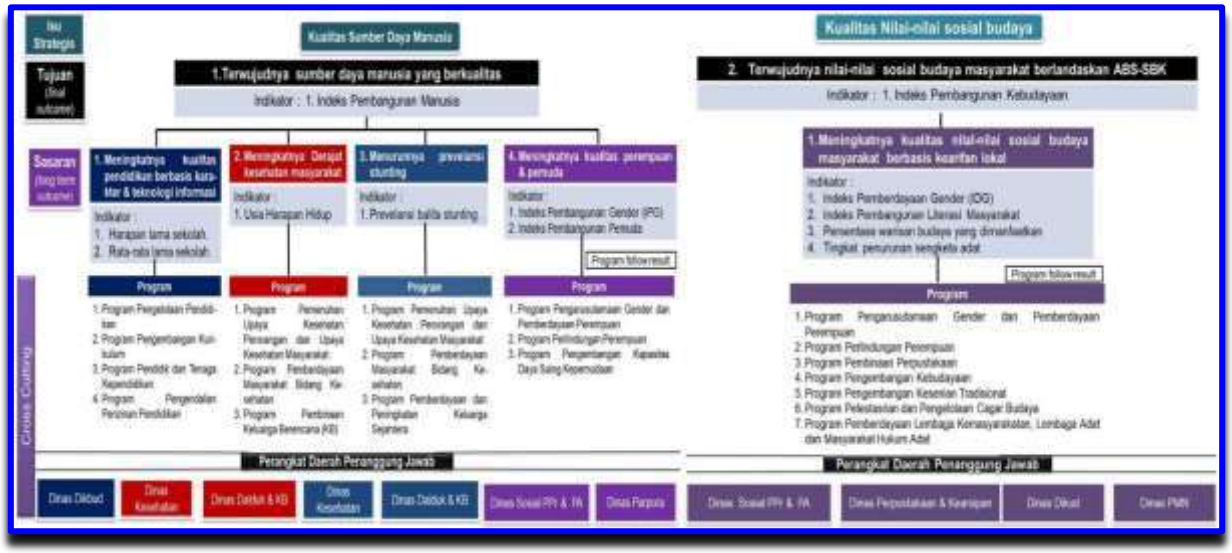


Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

3. Arsitektur kinerja misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.4
Arsitektur Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

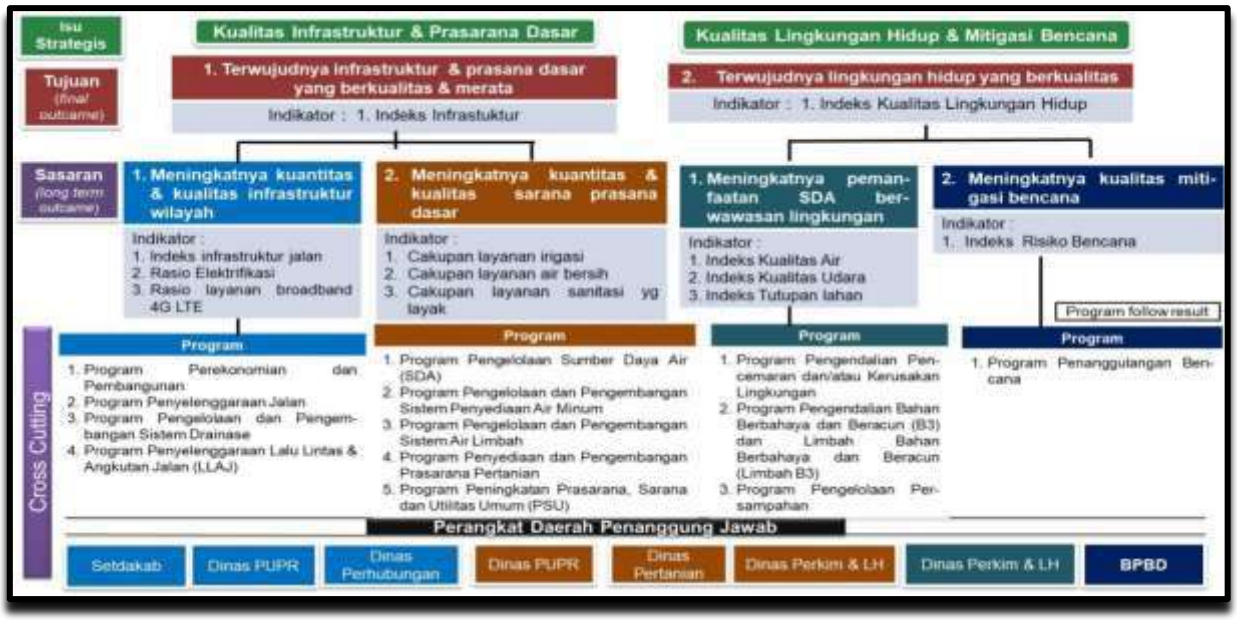


Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

4. Arsitektur kinerja misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.5
Arsitektur Kinerja Misi 4 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026



Sumber: Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

2.1.1.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Berdasarkan Pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Oleh sebab itu, IKU merupakan alat atau instrumen evaluasi terhadap penerapan SAKIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah setiap tahun kinerja.

Penentuan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/70/KPTS-BPT-2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026. Penyesuaian penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 tersebut, sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Kementerian PANRB terhadap evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023. Sehingga ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja, sehingga berimplikasi terhadap pengurangan IKU dan diturunkan menjadi IKU Perangkat Daerah seperti; opini BPK terhadap LKPD,rata-rata lama sekolah, usia harapan sekolah.

IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2024 merujuk pada Keputusan Bupati tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	1. Indeks Reformasi Birokrasi
	2. Nilai SAKIP Pemda
	3. Manajemen Risiko Indeks
2. Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	4. Indeks Pelayanan Publik
	5. Indeks Inovasi Daerah
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi
	7. Gini Rasio
	8. PDRB perkapita (ADHB)
4. Menurunnya kemiskinan	9. Angka Kemiskinan
5. Memperluas kesempatan kerja	10. Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	11. Indeks Pembangunan Manusia
	12. Prevalensi balita stunting
	13. Indeks Pembangunan Gender
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	14. Indeks Infrastruktur
	15. Indeks Infrastruktur jalan
8. Meningkatnya kualitas lingkungan	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Definisi operasional masing-masing IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Merujuk pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, sehingga ditetapkan target kinerja untuk Tahun 2025 yang mencerminkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung di bawah kepemimpinan Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2021-2025 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,1
	2. Nilai SAKIP Pemda	Nilai	73,0
	3. Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,000
2. Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	4. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00
	5. Indeks Inovasi Daerah	Skor	60,1
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86
	7. Gini Rasio	Nilai	0,239
	8. PDRB perkapita (ADHB)	Rp Juta	52,74
4. Menurunnya kemiskinan	9. Angka Kemiskinan	%	5,36
5. Memperluas kesempatan kerja	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	11. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,98
	12. Prevalensi balita stunting	%	20,0
	13. Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,30

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Satuan	Target
7.	Meningkatnya kualitas infra-struktur wilayah	14.	Indeks Infrastruktur	Nilai	64,0
		15.	Indeks Infrastruktur jalan	Nilai	43,10
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan	16.	Indeks Kualitas Ling-kungan Hidup	Skor	77,23

2.1.3 Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui 130 (tiga puluh) dengan anggaran belanja sebesar Rp. 1.144.316.334.393,-. Rencana kerja dan anggaran dalam upaya pencapaian IKU Pemerintah Daerah tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.777.390.850	Sekdakab
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	850.189.964	Sekdakab
3	Program Administrasi Umum	273.096.400	Sekdakab
4	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	15.579.590.677	Sekretariat DPRD
5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	758.223.150	Bapppeda
6	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	956.869.650	Bapppeda
7	Program penelitian dan pengembangan daerah	964.949.000	Bapppeda
8	Program pengelolaan keuangan daerah	142.733.519.512	BKAD
9	Program pengelolaan barang milik daerah	406.725.250	BKAD
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.065.786	BKAD
11	Program kepegawaian daerah	1.588.429.888	BKPSDM
12	Program pengembangan SDM	474.521.368	BKPSDM
13	Program penyelenggaraan pengawasan	756.692.000	Inspektorat Daerah
14	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	431.670.560	Inspektorat Daerah
15	Program pengelolaan pendidikan	88.237.120.164	Dinas Dikbud
16	Program pendidik dan tenaga kependidikan	59.997.450	Dinas Dikbud
17	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	41.111.105.836	Dinas Kesehatan
18	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	770.521.294	Dinas Kesehatan
19	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	456.330.600	Dinas Kesehatan
20	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	327.385.500	Dinas Kesehatan
21	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.401.689.750	Dinas PUPR
22	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4.895.681.700	Dinas Perkim dan LH
23	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	525.004.050	Dinas Perkim dan LH
24	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.020.957.475	Dinas Perkim dan LH

No.	Program	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
25	Program pengembangan permukiman	1.147.861.574	Dinas Perkim dan LH
26	Program penataan bangunan gedung	1.851.980.475	Dinas PUPR
27	Program penataan bangunan dan lingkungannya	1.870.437.975	Dinas PUPR
28	Program penyelenggaraan jalan	45.846.565.749	Dinas PUPR
29	Program pengembangan jasa konstruksi	458.602.100	Dinas PUPR
30	Program penyelenggaraan penataan ruang	662.252.486	Dinas PUPR
31	Program pengembangan perumahan	129.852.030	Dinas Perkim dan LH
32	Program kawasan permukiman	1.147.861.574	Dinas Perkim dan LH
33	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.434.002.350	Dinas Perkim dan LH
34	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.523.553.750	Dinas Satpol PP dan Damkar
35	Program penanggulangan bencana	797.429.371	BPBD
36	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.632.124.850	Dinas Satpol PP dan Damkar
37	Program pemberdayaan sosial	343.441.550	Dinas Sosial PPr dan PA
38	Program rehabilitasi sosial	132.327.050	Dinas Sosial PPr dan PA
39	Program perlindungan dan jaminan sosial	44.700.000	Dinas Sosial PPr dan PA
40	Program penangganan bencana	393.180.350	Dinas Sosial PPr dan PA
41	Program pengelolaan taman makam pahlawan	30.073.000	Dinas Sosial PPr dan PA
42	Program perencanaan tenaga kerja	150.000.000	Dinas Nakertrans
43	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.380.210.400	Dinas Nakertrans
44	Program penempatan tenaga kerja	228.737.400	Dinas Nakertrans
45	Program hubungan industrial	2.249.408.700	Dinas Nakertrans
46	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	59.287.238	Dinas Sosial PPr dan PA
47	Program perlindungan perempuan	105.204.500	Dinas Sosial PPr dan PA
48	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	37.228.900	Dinas Sosial PPr dan PA
49	Program perlindungan khusus anak	373.543.150	Dinas Sosial PPr dan PA
48	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	117.695.321	Dinas Paperi
49	Program penanganan kerawanan pangan	125.065.750	Dinas Paperi
50	Program pengawasan keamanan pangan	58.028.950	Dinas Paperi
51	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	41.004.500	Dinas PUPR
52	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	48.769.550	Dinas PUPR

No.	Program	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
53	Program penetapan tanah ulayat	25.800.000	Dinas PUPR
54	Program penatagunaan tanah	36.894.000	Dinas PUPR
55	Program perencanaan lingkungan hidup	104.094.650	Dinas Perkim dan LH
56	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	458.104.360	Dinas Perkim dan LH
57	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	113.108.120	Dinas Perkim dan LH
58	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.902.250	Dinas Perkim dan LH
59	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	97.732.320	Dinas Perkim dan LH
60	Program pengelolaan persampahan	3.213.232.682	Dinas Perkim dan LH
61	Program pendaftaran penduduk	180.512.950	Dinas Dukcapil
62	Program pencatatan sipil	101.548.700	Dinas Dukcapil
63	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	101.960.250	Dinas Dukcapil
64	Program pengelolaan profil kependudukan	17.770.900	Dinas Dukcapil
65	Program peningkatan kerjasama desa	25.000.000	Dinas PMN
66	Program administrasi pemerintahan desa	2.195.634.850	Dinas PMN
67	Program pemberdayaan lembaga ke-masyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.974.443.800	Dinas PMN
68	Program pengendalian penduduk	268.029.250	Dinas PP dan KB
69	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.639.427.930	Dinas PP dan KB
70	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.594.828.550	Dinas PP dan KB
71	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.894.410.898	Dinas Perhubungan
72	Program informasi dan komunikasi publik	1.463.175.490	Dinas Kominfo
73	Program aplikasi informatika	1.721.231.300	Dinas Kominfo
75	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	22.186.550	Dinas Dagperinkop dan UKM
76	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	13.985.750	Dinas Dagperinkop dan UKM
77	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	11.815.139	Dinas Dagperinkop dan UKM
78	Program pemberdayaan dan pelindungan koperasi	318.422.642	Dinas Dagperinkop dan UKM
79	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	80.229.550	Dinas Dagperinkop dan UKM
80	Program pengembangan UMKM	150.329.750	Dinas Dagperinkop dan UKM
81	Program pengembangan iklim penanaman modal	58.441.650	Dinas PMPTSP
82	Program promosi penanaman modal	247.607.950	Dinas PMPTSP
83	Program pelayanan penanaman modal	272.476.750	Dinas PMPTSP
85	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	21.648.450	Dinas PMPTSP

No.	Program	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
86	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	358.968.866	Dinas Parpora
87	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.543.930.216	Dinas Parpora
89	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000	Dinas Parpora
90	Program penyelenggaraan statistik sektoral	296.246.659	Dinas Kominfo
91	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	138.389.650	Dinas Kominfo
92	Program pengembangan kebudayaan	807.350.100	Dinas Dikbud
93	Program pengembangan kesenian tradisional	230.000.000	Dinas Dikbud
94	Program pembinaan sejarah	104.062.500	Dinas Dikbud
95	Program pelestasrian dan pengelolaan cagar budaya	382.460.200	Dinas Dikbud
96	Program pembinaan perpustakaan	670.043.847	Dinas Pusip
97	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	26.449.400	Dinas Pusip
98	Program Pengelolaan Arsip	227.419.430	Dinas Pusip
99	Program pengelolaan perikanan tangkap	288.750.000	Dinas Paperi
100	Program pengelolaan perikanan budidaya	417.878.200	Dinas Paperi
101	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13.000.000	Dinas Paperi
102	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	417.878.200	Dinas Paperi
103	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.238.508.226	Dinas Parpora
104	Program pemasaran pariwisata	1.518.504.144	Dinas Parpora
105	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	409.414.580	Dinas Parpora
106	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.317.167.475	Dinas Pertanian
107	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.811.862.250	Dinas Pertanian
108	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	375.773.295	Dinas Pertanian
109	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	93.714.650	Dinas Pertanian
110	Program penyuluhan pertanian	2.044.561.478	Dinas Pertanian
111	Program perizinan usaha pertanian	139.649.000	Dinas Pertanian
112	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	897.000.000	Dinas Pertanian
113	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	97.908.100	Dinas Dagperinkop dan UKM
114	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	53.159.900	Dinas Dagperinkop dan UKM
115	Program pengunaaan dan pemasaran produk dalam negeri	139.781.500	Dinas Dagperinkop dan UKM
116	Program perencanaan dan pembangunan industri	500.652.150	Dinas Dagperinkop dan UKM
117	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	22.168.800	Dinas Dagperinkop dan UKM

No.	Program	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
118	Program pembangunan kawasan transmigrasi	12.674.950	Dinas Nakertrans
119	Program pengembangan kawasan transmigrasi	464.605.450	Dinas Nakertrans
120	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	687.695.850	Kantor Kesbang dan Politik
121	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	20.151.046.600	Kantor Kesbang dan Politik
122	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.164.139.892	Kantor Kesbang dan Politik
123	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80.811.050	Kantor Kesbang dan Politik
124	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	393.707.150	Kantor Kesbang dan Politik
125	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	288.621.400	Kecamatan
126	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	965.793.319	Kecamatan
127	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	57.919.800	Kecamatan
128	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	946.116.774	Kecamatan
129	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	518.205.275	Kecamatan
130	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	673.146.371.419	Seluruh OPD
	Total	**1.144.316.334.393**	

Sumber: Perbup No. 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA.2025

2.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030 yang dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025. Sehingga secara eksplisit rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mengalami perubahan seiring ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Agustus 2025.

2.2.1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

2.2.1.1. Visi

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang. Perencanaan pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya, namun lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan perspektif visi tersebut, perumusan visi RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 yang menawarkan ide dan gagasan untuk membangun dan mengembangkan

Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata serta sumber daya manusia yang berdaya saing dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinamis diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas.

Merujuk pada visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih serta memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan secara teknokratik serta menyelaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045, visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sehingga dirumuskan visi RPJMD Tahun 2025-2029 berikut ini.



Pernyataan visi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, secara narasi dan esensinya mempunyai kesamaan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih. Esensial dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung merupakan gerakan untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung semakin sejahtera dan lebih maju sesuai dengan harapan dan cita-cita *stakeholders* yang tertuang dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045. Mengingat kondisi daerah yang terbatas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar para pelaku pembangunan, baik secara sinergitas program maupun integrasi program serta pembiayaan. Sehingga visi RPJMD Tahun 2025-2029 dimiliki oleh seluruh para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

Arti dan makna dari masing-masing kata kunci visi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, berdasarkan kata-kata kunci, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Arti dan Makna Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri	Berkolaborasi	Gerakan bersama untuk memanfaatkan potensi dan peluang pembangunan daerah melalui sinergitas dan integrasi program seluruh pelaku pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing dan kemandirian daerah menuju Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan tahun 2045
	Sijunjung Inovatif	Terwujudnya transformasi pengelolaan potensi ekonomi daerah berwawasan lingkungan hidup secara optimal dengan mendorong kreativitas dan inovasi pelaku pembangunan melalui sinergitas program antar pemerintahan daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditandai meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, indeks lingkungan hidup dan indeks infrastruktur jalan serta diikuti menurunnya angka kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka

Visi	Pilar Visi	Deskripsi Pilar Visi
	Sijunjung Daya Saing	Terwujudnya daya saing sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berkarakter berlandaskan ketahanan sosial budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) melalui transformasi sosial dan peningkatan kualitas ketahanan sosial budaya. Hal ini ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, indeks layanan infrastruktur dasar, tingkat produktivitas tenaga kerja dan Indeks ABS-SBK
	Sijunjung Msandiri	Terwujudnya kemandirian daerah melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas serta layanan publik yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi dalam upaya mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, hal ini ditandai meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

2.2.1.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dalam segala bidang, guna mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian yang berkelanjutan dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang kuat sehingga terciptanya pemerintahan yang profesional, berintegritas dan adaptif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus mengubah pendekatan kebijakan pembangunan yang digunakan saat ini (*business as usual*), karena upaya reformasi struktural dan birokrasi belum optimal untuk mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sehingga perlu diperkuat melalui transformasi secara menyeluruh diberbagai bidang pembangunan serta menggeser peran pemerintah, dari administrator menjadi fasilitator dan katalisator pembangunan. Sehingga transformasi memiliki arti penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Memperhatikan dan memedomani misi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih tersebut, sehingga dirumuskan 5 (lima) misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan perencanaan secara teknokratik. Kelima misi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, memiliki keterkaitan dengan esensi dan substansi yang sama dengan misi pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029



Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Arti dan makna masing-masing misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang urutannya berdasarkan isu strategis daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Arti dan Makna Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Misi	Deskripsi Misi
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable-resources*)
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	Pemantapan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya merupakan esensi dari penguatan transformasi sosial serta didukung ketahanan sosial budaya yang adaptif berbasis ABS-SBK. Sehingga sumber daya manusia semakin berkualitas, produktif dan berdaya saing serta beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya kontemporer diharapkan dapat menggerakan dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Misi	Deskripsi Misi
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	Pemantapan kualitas layanan publik secara efektif, terintegratif dan kolaboratif merupakan upaya untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan berbasis digitalisasi. Sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif guna terwujudnya pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing serta berintegritas untuk mendorong kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim. Sehingga terwujudnya ke-seimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan ling-kungan untuk keberlanjutan kehidupan dimasa yang akan datang
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar serta fasilitas lainnya yang berkualitas dan merata merupakan kerangka transformasi dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, energi listrik dan jaringan telekomunikasi terjangkau seluruh wilayah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan yang inklusif secara berkesinambungan

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Perumusan misi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan langkah-langkah strategis untuk menanggani isu strategis daerah lima tahun mendatang. Keterkaitan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan isu-isu strategis daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis Daerah Tahun 2025-2029

Misi	Isu Strategis Daerah
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	Isu 1: Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	Isu 2 : Penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif Isu 6 : Peningkatan kualitas ketahanan budaya masyarakat
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	Isu 4 : Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas

Misi	Isu Strategis Daerah
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	Isu 5: Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	Isu 3 : Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

2.2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan hasil dari perumusan capaian strategis yang merepresentasikan atau menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Perumusan tujuan dan sasaran yang efektif dirumuskan melalui pendekatan penjenjangan kinerja sesuai pembagian peran dan kinerja secara berjenjang (*cascading*). Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dimaksud merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus media untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun rencana berjalan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjJP).

Perumusan dan penetapan target IKU memedomani target kinerja sasaran visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Sehingga adanya kesinambungan pencapaian visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045 setiap pelaksanaan lima tahunan. Kinerja sasaran utama visi dan sasaran pokok indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pelaksanaan Tahun 2025-2029 mengacu pada target tahun 2030 sebagai landasan penetapan target IKU RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan penjenjangan kinerja (*cascading outcome*) berlandaskan 6 (enam) isu strategis daerah, diuraikan berikut ini.

1. **Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

Tujuan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian misi memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dikuantifikasikan melalui indikator indeks pembangunan ekonomi inklusif. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga terwujudnya visi Sijunjung Inovatif.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, 2) meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi dan 3) meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja. Ke-3 sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 6 (enam) indikator, yaitu; 1) laju pertumbuhan ekonomi, 2) PDRB per kapita, 3) angka kemiskinan, 4) tingkat kemiskinan ekstrem, 5) gini rasio dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Tujuan dan Sasaran Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	1.1 Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.1.2 PDRB per kapita
		1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	1.2.1 Angka Kemiskinan 1.2.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem 1.2.3 Gini Rasio
		1.3 Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	1.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

2. Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif.

Tujuan pembangunan misi memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif, dirumuskan 2 (dua) tujuan, yaitu; 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas tenaga kerja dan 2) meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks ABS-SBK. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari; 1) isu penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter serta ketahanan keluarga dan perlindungan sosial yang adaptif dan 2) pemantapan ketahanan sosial budaya, sehingga terwujudnya visi Sijunjung Daya Saing.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, 2) meningkatnya produktivitas masyarakat, 3) meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas dan 4) meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS- SBK. Ke-4 sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 4 (empat) indikator, yaitu; 1) Indeks Pembangunan Manusia, 2) tingkat produktivitas tenaga kerja, 3 Indeks Pembangunan Keluarga dan 4) Indeks ABS-SBK. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8.
Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif	1.1 Indeks Pembangunan Manusia	1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia
	1.2 Tingkat produktivitas tenaga kerja	1.2 Meningkatnya produktivitas masyarakat	1.2.1 Tingkat produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan kualitas ketahanan sosial budaya	2.1 Indeks Pembangunan Keluarga	2.1 Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	2.1.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
	2.2. Indeks ABS-SBK	2.2 Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlan-daskan ABS-SBK	2.2.1 Indeks ABS-SBK

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

3. Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital.

Tujuan pembangunan misi memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital, dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas, sehingga terwujudnya visi Sijunjung Mandiri.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing dan 2) meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih. Kedua sasaran strategis tersebut, dikuantifikasikan melalui 3 (tiga) indikator, yaitu; 1) Indeks Reformasi Birokrasi, 2) nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.9.
Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi 1.1.2 Nilai EKPPD
		1.2 Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	1.2.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

4. Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana secara Berkelanjutan.

Tujuan pembangunan misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan, maka dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, sehingga mendukung terwujudnya visi Sijunjung Inovatif.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan 2) meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana. Ke-2 sasaran strategis tersebut,

dikuantifikasikan melalui 2 (dua) indikator, yaitu; 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan 2) Indeks Risiko Bencana. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana secara Berkelanjutan

Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1.2 Indeks Risiko Bencana	1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	1.2.1 Indeks Risiko Bencana

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

5. Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan.

Tujuan pembangunan misi memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan, maka dirumuskan 1 (satu) tujuan, yaitu; meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar yang dikuantifikasikan melalui indikator kinerja Indeks Infrastruktur Jalan dan Indeks Layanan Infrastruktur Dasar. Secara eksplisit tujuan tersebut, merupakan jawaban dari isu pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata, sehingga mendorong terwujudnya visi Sijunjung Inovatif dan Sijunjung Daya Saing.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan tersebut, dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu; 1) meningkatnya kualitas infrastruktur wialayah dan 2) meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar. Ke-2 sasaran strategis tersebut, diukur capaiannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu; 1) Indeks Infrastruktur Jalan dan 2) Indeks Layanan Infrastruktur Dasar. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator yang digunakan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.
Tujuan dan Sasaran Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan

Visi : Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri			
Tujuan	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	1.1 Indeks Infra-struKtur Jalan 1.2 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	1.1.1 Indeks Infra-struktur Jalan
		1.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	1.2.1 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

2.2.1.4 Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan arsitektur kinerja yang akan memperlihatkan adanya keterkaitan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, sehingga dapat terlihat dengan jelas.

1. **Arsitektur Kinerja Misi Memperkuat Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan berbasis Hilirisasi Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.**

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Arsitektur Kinerja Misi 1 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

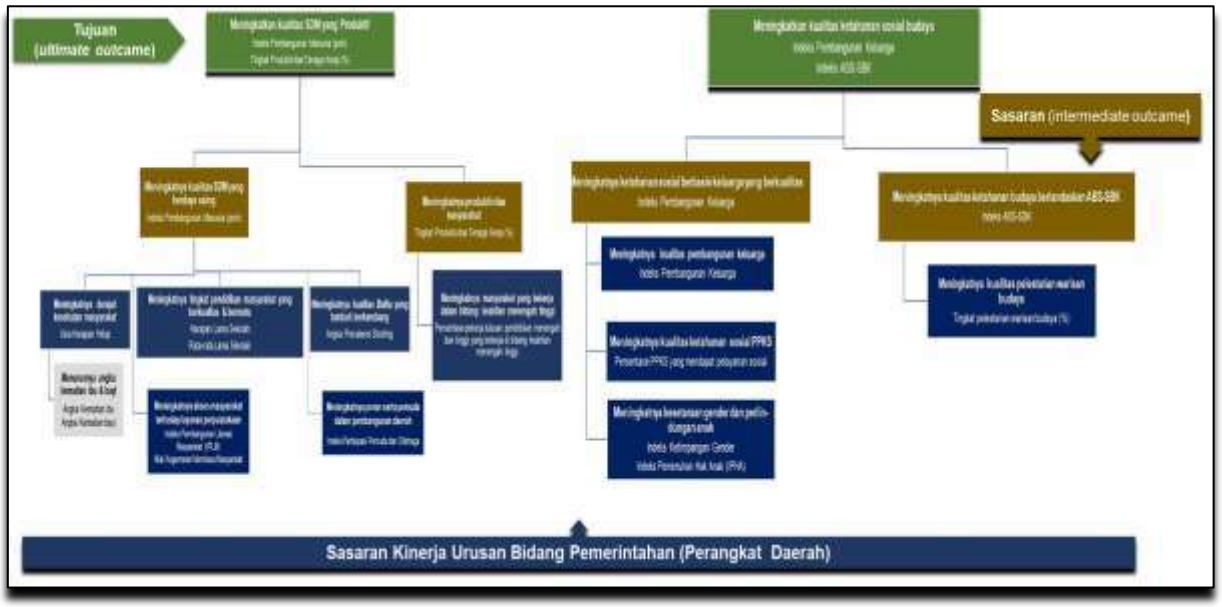


Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

2. **Arsitektur Kinerja Misi Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Produktif, Berkarakter dan Berbudaya melalui Penguatan Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya yang Adaptif.**

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8
Arsitektur Kinerja Misi 2 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

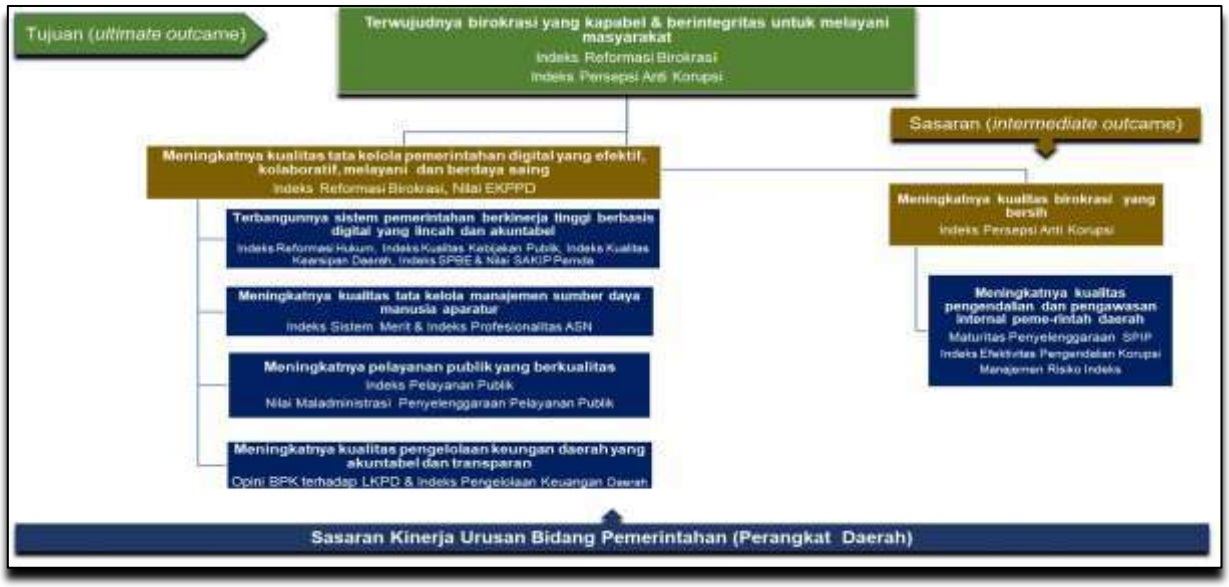


Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

3. **Arsitektur Kinerja Misi Memantapkan Kualitas Layanan Publik yang Efektif, Terintegratif dan Kolaboratif melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Digital**

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9
Arsitektur Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029



Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

4. **Arsitektur Kinerja Misi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana secara Berkelanjutan**

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10
Arsitektur Kinerja Misi 4 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

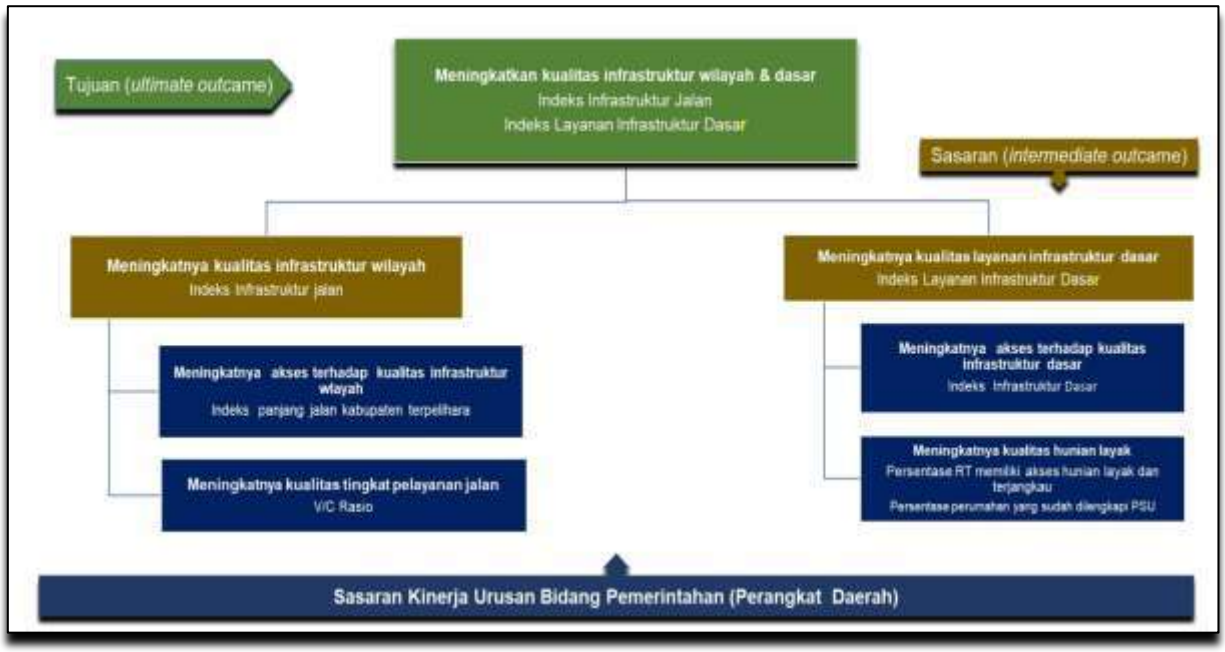


Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

5. **Arsitektur Kinerja Misi Memantapkan Infrastruktur Wilayah dan Dasar yang Berkualitas dan Merata secara Berkesinambungan**

Arsitektur kinerja misi RPJMD ini, melalui pendekatan *cascading* kinerja, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11
Arsitektur Kinerja Misi 5 RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029



Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

2.2.1.5 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 merujuk pada target sasaran utama visi dan indikator kinerja utama RPJPD Tahun 2025-2045 pada target tahun 2030 serta bersifat imperatif dari turunan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Target indikator IKU Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 dan tahun 2030 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya untuk pedoman dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Sat.	Capaian Tahun 2024	*Baseline* 2025	Tahun dan Target Kinerja 2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 : Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif										
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,89	4,22	5,67	6,82	6,86	7,17	5,90
		2) PDRB per kapita	Rp juta	50,61	55,44	61,55	68,39	75,77	83,89	93,16
2	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3) Angka Kemiskinan	Persen	5,78	5,20	4,86	4,62	4,38	4,07	3,78
		4) Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,55	0,40	0,25	0	0	0	0
		5) Gini Rasio	Nilai	0,239	0,236	0,235	0,233	0,230	0,229	0,225
3	Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	6) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,73	4,41	4,25	4,15	4,06	3,97	3,90
Misi 2 : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif										
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	7) Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,88	73,45	74,01	74,59	75,19	75,78	76,37
5	Meningkatnya produktivitas masyarakat	8) Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	59,90	61,20	63,3	64,0	67,0	69,0	69,62
6	Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	9) Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,81	60,6	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0
7	Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	10) Indeks ABS-SBK	Nilai	72,82	72,93	76,38	78,12	80,32	82,58	85,08
Misi 3 : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital										
8	Meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	11) Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77,26	78,50	79,50	80,20	82,50	84,10	85,10
		12) Nilai EKPPD	Nilai	3,050	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	3,700
9	Meningkatnya kualitas birokrasi ysang bersih	13) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	78,34	81,34	82,20	83,50	84,50	85,0	86,0
Misi 4 : Misi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan										
10	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,84	77,33	77,45	77,66	77,87	78,08	78,29
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	15) Indeks Risiko Bencana	Nilai	105,64	105,45	105,44	104,16	102,88	101,6	100,32
Misi 5 : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan										
12	Meningkatnya kualitas infastruktur wilayah	16) Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	45,53	46,43	49,04	53,05	57,38	63,21	68,49
13	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	17) Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Nilai	62,75	63.62	64,21	66,31	70,60	74,65	78,20

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Definisi operasional masing-masing IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

2.2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Seiring ditetapkannya sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga berimplikasi terhadap penyesuaian IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta target kinerjanya sebagai cerminan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung di bawah kepemimpinan Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030 yang dituangkan ke dalam perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
			Awal	Revisi
1. Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,84	4,10
	2. PDRB perkapita (ADHB)	Rp Juta	52,74	51,60
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3. Angka Kemiskinan	Persen	5,36	5,70
	4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	-	0,40
	5. Gini Rasio	Nilai	0,239	0,236
3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,58	4,65
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,98	73,10
5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	8. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	-	61,20
6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	9. Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	-	60,6
7. Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	10. Indeks ABS-SBK	Nilai	-	72,93
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	11. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,1	78,50
	12. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	-	3,200
9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	13. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	-	81,34
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	77,23	69,20
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	15. Indeks Risiko Bencana	Nilai	-	105,0
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	16. Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	43,10	46,43
13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	17. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Nilai	-	62,28

Merujuk pada tabel diatas, secara substansi Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung Tahun 2025 mengalami perubahan terhadap esensinya yang cukup signifikan. Namun pada perubahan perjanjian kinerja tersebut, terdapat IKU yang masih relevan dengan perjanjian

kinerja awal sebanyak 9 (sembilan) indikator. Sedangkan target ke-9 IKU tersebut, mengalami penyesuaian hal ini disebabkan karena memedomani capaian tahun 2024 serta adanya kebijakan imperatif dari pemerintah pusat dalam penetapan target IKU pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dengan target kinerja RPJMN Tahun 2025-2029.

2.2.3 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan melalui 127 (seratus dua puluh tujuh) program dengan perubahan anggaran belanja dari total anggaran awal sebesar Rp. 1.144.316.334.393,- dirubah menjadi sebesar Rp. 1.055.484.188.211,-. Perubahan anggaran belanja pada tahun anggaran 2025 tersebut, disebabkan karena keluarnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Transper ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rencana kerja dan perubahan anggaran dalam upaya pencapaian IKU Pemerintah Daerah tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.777.390.850	2.543.144.747
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	850.189.964	222.476.564
3	Program Administrasi Umum	273.096.400	163.857.840
4	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	15.579.590.677	12.951.315.735
5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	758.223.150	167.871.650
6	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	956.869.650	232.254.825
7	Program penelitian dan pengembangan daerah	964.949.000	706.315.700
8	Program pengelolaan keuangan daerah	142.733.519.512	135.459.424.205
9	Program pengelolaan barang milik daerah	406.725.250	133.399.580
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.065.786	443.828.850
.11	Program kepegawaian daerah	1.588.429.888	543.560.250
12	Program pengembangan SDMs	474.521.368	543.560.250
13	Program penyelenggaraan pengawasan	756.692.000	245.263.204
14	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	431.670.560	33.758.600
15	Program pengelolaan pendidikan	88.237.120.164	70.582.334.680
16	Program pendidik dan tenaga kependidikan	59.997.450	23.245.123
17	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	97.671.646.050	74.951.852.750
18	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	770.521.294	458.968.500
19	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	456.330.600	364.643.040
20	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	947.788.380	676.991.700

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
21	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.401.689.750	801.543.276
22	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4.895.681.700	122.852.000
23	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	525.004.050	925.322.120
24	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.020.957.475	20.008.500
25	Program pengembangan permukiman	1.147.861.574	0
26	Program penataan bangunan gedung	1.851.980.475	1.276.997.500
27	Program penataan bangunan dan lingkungannya	1.870.437.975	61.398.500
28	Program penyelenggaraan jalan	45.846.565.749	23.419.484.959
29	Program pengembangan jasa konstruksi	458.602.100	88.541.450
30	Program penyelenggaraan penataan ruang	662.252.486	142.674.371
31	Program pengembangan perumahan	129.852.030	109.337.420
32	Program kawasan permukiman	1.147.861.574	44.767.360
33	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.434.002.350	7.143.594.093
34	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.523.553.750	1.576.316.618
35	Program penanggulangan bencana	797.429.371	774.776.247
36	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.632.124.850	2.614.357.190
37	Program pemberdayaan sosial	343.441.550	104.162.500
38	Program rehabilitasi sosial	132.327.050	41.466.650
39	Program perlindungan dan jaminan sosial	44.700.000	8.873.850
40	Program penanganan bencana	393.180.350	110,494,000
41	Program pengelolaan taman makam pahlawan	30.073.000	2.276.500
42	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.380.210.400	635.283.850
43	Program penempatan tenaga kerja	228.737.400	82.492.750
44	Program hubungan industrial	2.249.408.700	3.319.642.250
45	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	59.287.238	54.290.200
46	Program perlindungan perempuan	105.204.500	189.478.000
47	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	37.228.900	6.063.400
48	Program perlindungan khusus anak	373.543.150	224.125.890
49	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	117.695.321	88.817.622
50	Program penanganan kerawanan pangan	125.065.750	111.804.614
51	Program pengawasan keamanan pangan	58.028.950	80.947.500
52	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	41.004.500	28.805.400
53	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	48.769.550	0
54	Program penetapan tanah ulayat	25.800.000	10.048.200
55	Program penatagunaan tanah	36.894.000	47.611.100
56	Program perencanaan lingkungan hidup	267.564.250	227.943.250
57	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	458.104.360	102.301.816

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
58	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	113.108.120	72.595.650
59	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.902.250	22.065.560
60	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	97.732.320	55.508.728
61	Program pengelolaan persampahan	3.213.232.682	3.475.645.335
62	Program pendaftaran penduduk	180.512.950	63.355.850
63	Program pencatatan sipil	101.548.700	86.297.400
64	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	101.960.250	30.142.250
65	Program pengelolaan profil kependudukan	17.770.900	3.989.700
66	Program peningkatan kerjasama desa	25.000.000	0
67	Program administrasi pemerintahan desa	2.195.634.850	1.369.825.020
68	Program pemberdayaan lembaga kemasya-rakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.974.443.800	416.952.045
69	Program pengendalian penduduk	268.029.250	279.527.700
70	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.106.748.120	6.958.217.069
71	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.594.828.550	1.305.570.600
72	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.894.410.898	10.825.122.691
73	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	419.942.214	296.074.660
74	Program pengelolaan aplikasi informatika	378.368.850	499.838.309
75	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	22.186.550	17.823.850
76	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	13.985.750	16.606.050
77	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	11.815.139	0
78	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	318.422.642	140.134.750
79	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	80.229.550	26.886.385
80	Program pengembangan UMKM	150.329.750	17.558.100
81	Program pengembangan iklim penanaman modal	58.441.650	47.000.750
82	Program promosi penanaman modal	247.607.950	50.203.450
83	Program pelayanan penanaman modal	272.476.750	148.213.390
84	Program pengendalian pelaksanaan penana-man modal	502.826.750	57.618.400
85	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	21.648.450	2.613.550
86	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	358.968.866	62.033.658
87	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.543.930.216	2.152.606.605
89	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000	200.000.000
90	Program penyelenggaraan statistik sektoral	296.246.659	45.172.770
91	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	138.389.650	6.251.300
92	Program pengembangan kebudayaan	2.962.092.900	2.339.685.450

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
93	Program pengembangan kesenian tradisional	250.000.000	359.017.500
94	Program pembinaan sejarah	104.062.500	94.048.600
95	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	382.460.200	227.672.200
96	Program pembinaan perpustakaan	1.016.959.447	696.578.898
97	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	26.449.400	19.798.000
98	Program Pengelolaan Arsip	185.590.000	87.543.950
99	Program pengelolaan perikanan tangkap	50.854.480	35.266.388
100	Program pengelolaan perikanan budidaya	364.541.605	302.107.414
101	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13.000.000	4.067.920
102	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	117.384.815	70.633.699
103	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.238.508.226	998.161.354
104	Program pemasaran pariwisata	239.657.959	161.539.583
105	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	187.458.620	57.046.058
106	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.363.055.024	1.116.498.334
107	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.811.862.250	3.286.994.787
108	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	375.773.295	310.868.080
109	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	141.734.950	49.341.450
110	Program penyuluhan pertanian	1.257.043.825	1.001.960.000
111	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	552.115.256	322.851.463
112	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	37.820.100	17.597.650
113	Program penggunaaan dan pemasaran produk dalam negeri	90.124.075	86.181.000
114	Program perencanaan dan pembangunan industri	481.500.700	233.315.350
115	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	17.978.000	12.808.500
116	Program pembangunan kawasan transmigrasi	193.395.350	172.413.250
117	Program pengembangan kawasan transmigrasi	205.131.000	125.497.300
118	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	859.424.400	710.842.050
119	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.114.164.920	1.048.473.120
120	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	64.060.500	0
121	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	393.707.150	403.952.550
122	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	288.621.400	38.563.200
123	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	965.793.319	151.491.050
124	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	57.919.800	5.640.000

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
125	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	946.116.774	60.031.100
126	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	518.205.275	162.707.290
127	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	673.146.371.419	661.198.109.508
	Total	**1.144.316.334.393**	**1.055.484.188.211**

Sumber: Perbup No. 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2025



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini mencakup pengelolaan data, pengukuran dan pelaporan kinerja disertai analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta akuntabilitas keuangan.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis RPJMD Kabupaten SijunjungTahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/AA.01/2025, perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025. Sedangkan muatan akuntabilitas kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa capaian sasaran strategis dikuantifikasi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Merujuk pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian pengukuran dengan skala ordinasi berikut ini.

No	*Range* Capaian	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 disajikan berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang dikuantifikasi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2021-2025 yang diuraikan berikut ini.

3.1.1 *Overview* Capaian Kinerja

Merujuk pada Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/70/KPTS-BPT-2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 terdapat adanya penyesuaian jumlah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Penyesuaian Jumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran serta Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2025

Misi RPJMD 2021-2026	Jumlah Sasaran		Jumlah Indikator Sasaran		Jumlah Capaian Indikator Sasaran sesuai Kategori
	Awal	Revisi	Awal	Revisi	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	2	2	6	5	Sangat Tinggi : 3 Tinggi : 1 Sedang : 1 Rendah : - Sangat Rendah : -
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	4	3	9	5	Sangat Tinggi : 4 Tinggi : - Sedang : 1 Rendah : - Sangat Rendah : -
3. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan ABS-SBK	5	1	9	3	Sangat Tinggi : 2 Tinggi : - Sedang : 1 Rendah : - Sangat Rendah : -
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan	4	2	8	3	Sangat Tinggi : 3 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
Jumlah	**15**	**8**	**32**	**16**	

Berlandaskan capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 berdasarkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator sasaran, sehingga capaian kinerja kategori “sangat tinggi” tercapai proporsi 75,0 persen dan diikuti kategori “sedang’ sebesar 18,75 persen, hal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2025

`No.	Kategori	Jumlah Capaian Indikator Sasaran	Persentase
1.	Sangat Tinggi	12	75,0
2.	Tinggi	1	6,25
3.	Sedang	3	18,75
4.	Rendah	0	0
5.	Sangat Rendah	0	0

Sedangkan capaian rata-rata masing-masing sasaran strategis Pemerintah Daerah pada tahun 2025, dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 3.3
Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	3	93,37
2.	Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	2	90,19
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	3	88,95
4.	Menurunnya kemiskinan	1	108,04
5.	Memperluas kesempatan kerja	1	105,88
6.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	3	90,23
7.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	2	99,35
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan	1	100,22

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan suatu tujuan yang akan diwujudkan setiap tahunnya yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis daerah pada tahun 2025. Analisis capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dapat diuraikan berikut ini.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ini dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 93,37 persen atau berada pada kategori “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 1 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	60,1	68,21	113,49	Sangat Tinggi
2.	Nilai SAKIP Pemda	73,0	66,58	91,21	Sangat Tinggi
3.	Manajemen Resiko Indeks (skor)	3,000	2,262	75,40	Sedang
	Rata-rata capaian sasaran 1			**93,37**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Kementerian PANRB, BPKP dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 1, dijelaskan berikut ini.

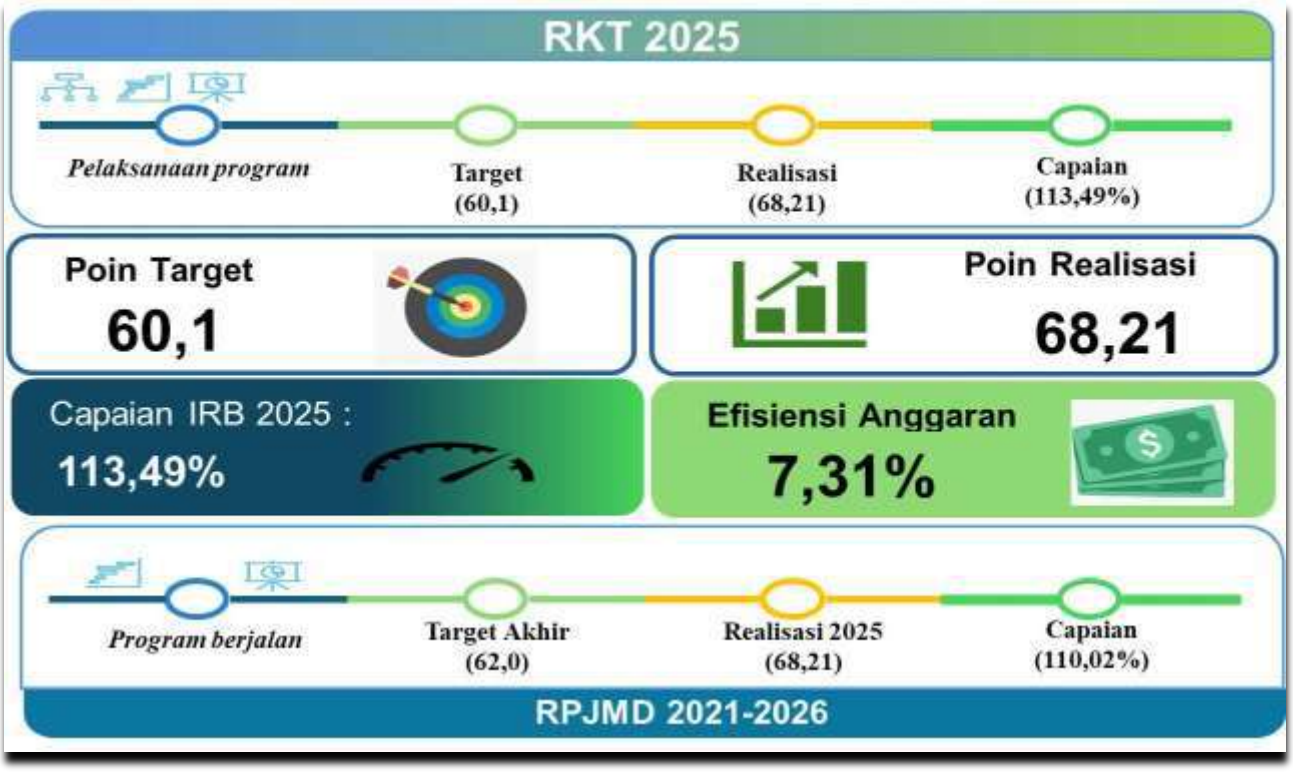
1. Indeks Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 cenderung membaik. Kondisi ini mencerminkan birokrasi yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta mencerminkan baiknya tata kelola dalam berbagai aspek reformasi birokrasi, termasuk efektivitas pemerintahan, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur, penguatan pengawasan, pengelolaan anggaran yang lebih transparan

dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan digital.

Gambaran tata kelola pemerintahan tersebut, terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Daerah pada tahun 2025 tercapai sebesar 113,49 persen dari target IRB sebesar 60,1 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi" dengan realisasi sebesar 68,21 poin. Sedangkan capaian IRB tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 sebesar 110,02 persen dari target 62,0 poin, hal ini tergambar pada infografis berikut ini.

Gambar 3.1
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

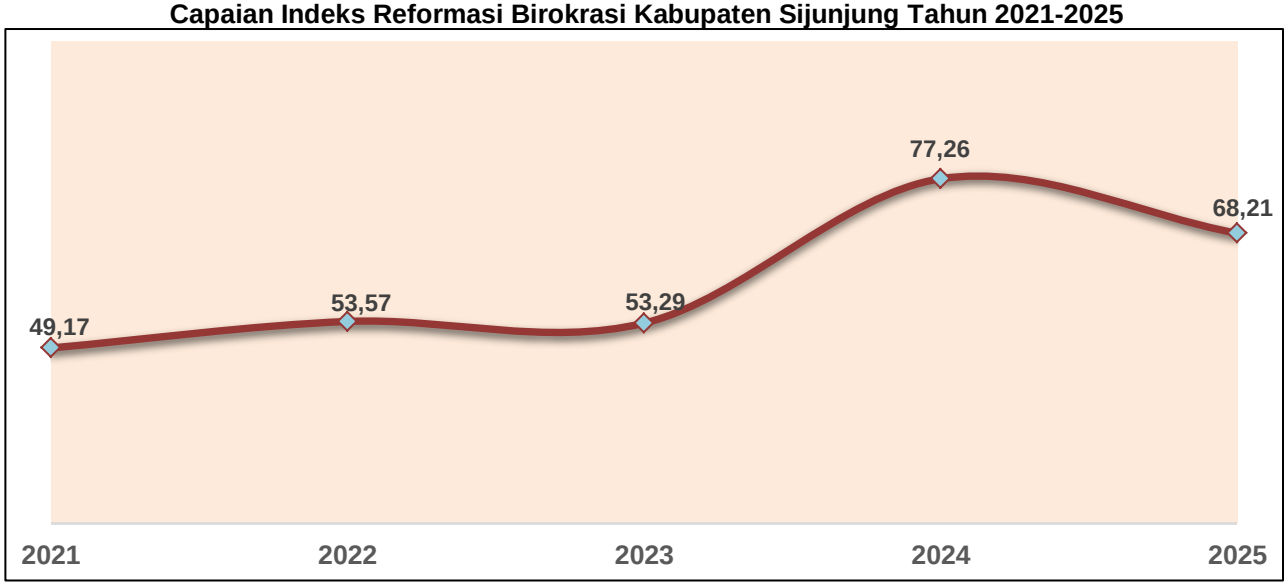


Sumber: Kementerian PANRB dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sementara itu, pencapaian IRB tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,05 poin, dari 77,26 poin tahun 2024 turun menjadi 68,21 poin tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan terjadinya penurunan kualitas reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung secara siginifikan. Sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sijunjung dibutuhkan transformasi tata kelola pemerintahan secara efektif, terintegratif dan kolaboratif serta adaptif.

Perbandingan capaian IRB Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Mengingat keterbatasan data yang tersedia perbandingan capaian IRB Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional serta daerah lain tidak dapat disajikan pada laporan kinerja ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Nilai IRB Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik (SPBE), hal ini ditandai pencapaian Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 3,52 poin dengan kategori sangat baik. Kondisi tersebut menunjukkan antara lain:

a. transformasi digital berjalan dengan baik.
b. kekuatan pada arsitektur SPBE dan integrasi layanan sangat baik.
c. area perbaikan pada manajemen risiko dan keamanan informasi terpenuhi.
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur berjalan baik.



Faktor kedua, yang mempengaruhi keberhasilan Nilai IRB adalah pengadaan barang dan jasa berpihak pada produk dalam negeri, yang ditandai dengan persentase penyedia ber-PDN yang mendapatkan nilai preferensi harga dan menentukan peringkat penawaran. Pencapaian ini didukung oleh regulasi PDN diterapkan secara efektif dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang ditandai dengan persentase penerapan regulasi diterapkan secara efektif sebesar 100 persen. Upaya yang mendorong pengadaan barang dan jasa berpihak pada produk dalam negeri, yaitu: 1) penerapan 5 (lima) regulasi spesifikasi PDN dalam pelaksanaan pengadan barang dan jasa, dan 2) evaluasi kandungan PDN dalam produk pekerjaan melalui evaluasi

harga timpang, dokumen evaluasi kewajaran harga (bila penawaran di bawah 80%), dan dokumen evaluasi prevalensi harga.

Faktor ketiga, produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tertata dengan baik yang ditandai dengan persentase produk hukum yang harmonis. Pencapaian ini ditandai oleh; 1) produk hukum daerah sesuai standar yang ditandai dengan persentase produk hukum daerah yang sesuai standar sebesar 100 persen, 2) meningkatnya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang ditandai dengan persentase permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang terlayani sesuai ketentuan sebesar 100 persen dari 35 permohonan, 3) meningkatnya penyebarluasan layanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat, yang ditandai oleh persentase produk hukum dan informasi hukum yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sebesar 100 persen atau 120 produk hokum, dan 4) meningkatnya nagari/desa sadar hukum di Kabupaten Sijunjung yang ditandai dengan persentase peningkatan nagari/desa sadar hukum sebesar 63,43% atau 45 nagari/desa,

Faktor keempat, penguatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Terintegrasi melalui pelaksanaan bimbingan teknis bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang disupervisi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat. Hasil pelaksanaan Bimtek ini berdampak terhadap peningkatan kualitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.



Faktor kelima, *continuous improvement* reformasi birokrasi, yang ditandai dengan persentase perangkat daerah dengan IRB perangkat daerah minimal kategori “B” meningkat. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi, yang ditandai dengan; 1) persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi sebesar 100 persen dari 34 perangkat daerah, dan 2) persentase kebijakan tata kelola reformasi birokrasi yang diinternalisasikan sebesar 100 persen.



Faktor keenam, terbangunnya sistem kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang lebih luwes dan lincah seiring adanya penyerdehaaan birokrasi. Penerapan sistem kerja tersebut, didukung dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai IRB, namun terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian nilai IRB, antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Rendahnya kualitas *softkill management* dalam menerapkan reformasi birokrasi • Keterbatasan sumber daya dalam pemenuhan standarisasi reformasi birokrasi • Belum adanya kesamaaan pemahaman konsep dalam penerapan reformasi birokrasi antar manajerial ddengan pelaksana	Belum tersedianya regulasi yang jelas dan akurat terhadap penerapan reformasi birokrasi di tataran instansi pemerintahan sesuai dengan isu strategis pembangunan nasional lima tahun ke depan.

Mengatasi faktor penghambat peningkatan nilai IRB tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas tingkat manajerial dan ASN melalui pendampingan penyusunan rencana aksi berdasarkan substantif
2. Pemenuhan standarisasi penerapan reformasi birokrasi secara efektif melalui penguatan kapasitas ASN secara efektif dan adaptif.
3. Penguatan kapasitas APIP dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi melalui pelatihan secara berkesinambungan.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Pencapaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 belum menunjukkan angka yang optimal. Hal ini ditandai capaian kinerja nilai AKIP sebesar 91,21 persen dari target nilai SAKIP yang ditetapkan sebesar 73,0 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi” dengan realisasi sebesar 66,58 poin (kategori “B”). Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 capaian nilai AKIP sebesar 88,77 persen dari target sebesar 75,0 poin. Gambaran pencapaian nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

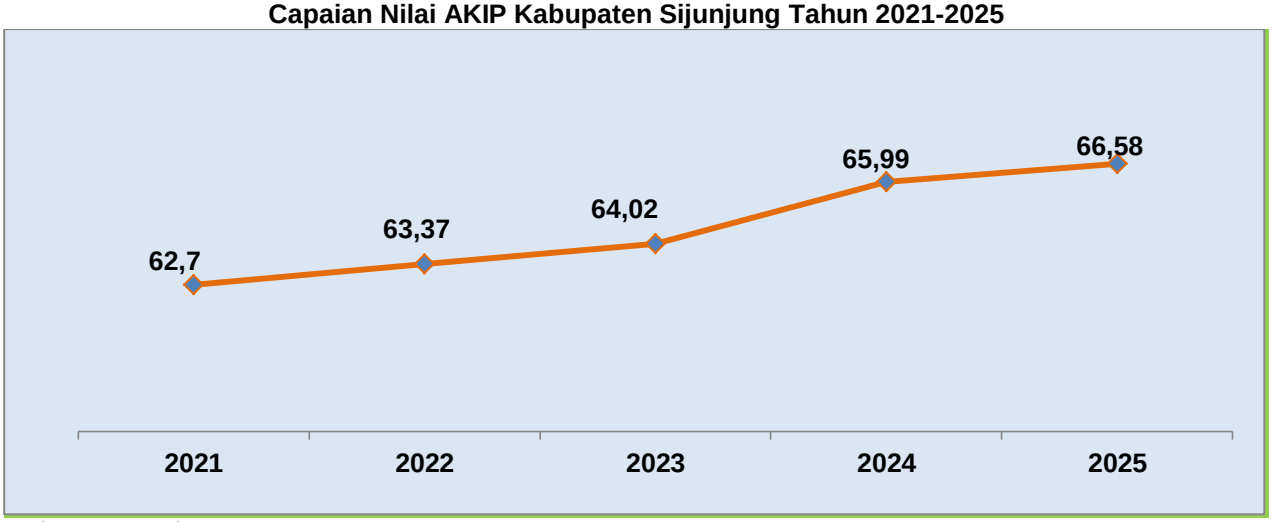
Gambar 3.2
Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026



Sumber: Kementerian PANRB dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Realisasi nilai AKIP pada tahun 2025 bertumbuh sebesar 0,59 poin, dari 65,99 poin tahun 2024 naik menjadi 66,58 poin tahun 2025. Meningkatnya nilai AKIP pada tahun 2025 menunjukkan adanya kencenderungan terus membaik penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, walaupun di sisi lain belum tercapai sesuai dengan target. Perbandingan capaian nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.2.
Capaian Nilai AKIP Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Pencapaian nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun lima tahun terakhir, tidak terlepas dari pencapaian nilai komponen AKIP yang optimal. Capaian nilai nilai komponen AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2025 cenderung meningkat namun belum diangka optimal. Kondisi ini menunjukkan penerapan SAKIP belum berjalan secara maksimal karena belum efektifnya dalam pemenuhan elemen-elemen penilaian SAKIP secara terintegratif dan kolaboratif.

Capaian nilai komponen AKIP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian Nilai Komponen AKIP Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2025

No	Komponen Penilaian	Tahun/Nilai			
		2022	2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	21,41	21,52	22,36	22,61
2.	Pengukuran Kinerja	18,71	18,99	19,73	19,87
3.	Pelaporan Kinerja	10,05	10,16	10,40	10,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	13,20	13,35	13,50	13,70
	Nilai AKIP	**63,37**	**64,02**	**65,99**	**66,58**

Sumber: Kementerian PANRB, 2026

Mengingat keterbatasan data yang tersedia perbandingan capaian nilai AKIP Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional serta daerah lain tidak dapat disajikan pada laporan kinerja ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, dokumen perencanaan pada setiap level organisasi telah menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil serta menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Sehingga perencanaan dipastikan selalu selaras satu dan lainnya serta sinkron untuk mencapai kinerja level jabatan yang lebih tinggi.



Faktor kedua, memperbaiki penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF serta menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya.

Faktor ketiga, mengkaji ulang rencana aksi yang disusun pada sebagian perangkat daerah dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut serta pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dengan mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.





Faktor keempat, mengembangkan aplikasi e-SAKIP melalui pengembangan Laporan Harian Kerja (LHK) berbasis bukti (*evidence*) setiap hari dan dievaluasi setiap mingguan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah dan perangkat daerah. Aplikasi tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward dan punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

Faktor kelima, peningkatan kapabilitas APIP ditandai meningkatnya tingkat kematangan APIP, sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai AKIP, namun terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian nilai AKIP, antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum optimalnya kualitas dan kapasitas ASN dalam memahami penerapan SAKIP secara komprehensif • Belum semuanya Perangkat Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk penerapan SAKIP	Adanya penerapan efisiensi anggaran, sehingga mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya pemerintahan daerah dalam menerapkan SAKIP

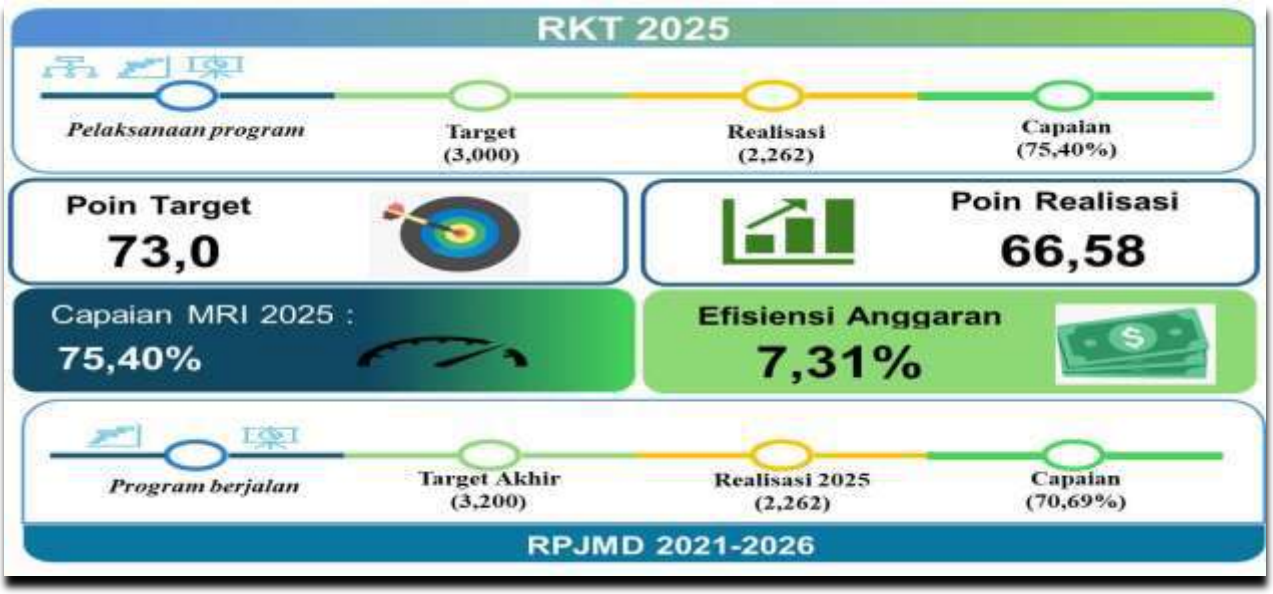
Mengatasi faktor penghambat pencapaian nilai AKIP tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Penerapan SAKIP secara tepat dan berorientasi hasil melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang jelas dan terukur serta mengembangkan aplikasi e-Sakip sebagai media pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja.
2. Peningkatan kualitas APIP dalam merumuskan kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level perangkat daerah.
3. Pemanfaatan sumber daya aparatur yang produktif dalam membangun SAKIP secara bertransformasi berbasis inovasi secara efektif dan berkesinambungan.

3. Manajemen Risiko Indeks

Penerapan menajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung belum berjalan secara optimal, hal ini ditandai capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada tahun 2025 sebesar 75,50 persen dari target MRI yang ditetapkan sebesar 3,000 poin atau berada pada kategori “sedang” dengan realisasi nilai sebesar 2,262 poin. Sementara itu, dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, capaian MRI pada tahun 2025 sebesar 70,69 persen dari target sebesar 3,200. Gambaran pencapaian nilai MRI Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.3
Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

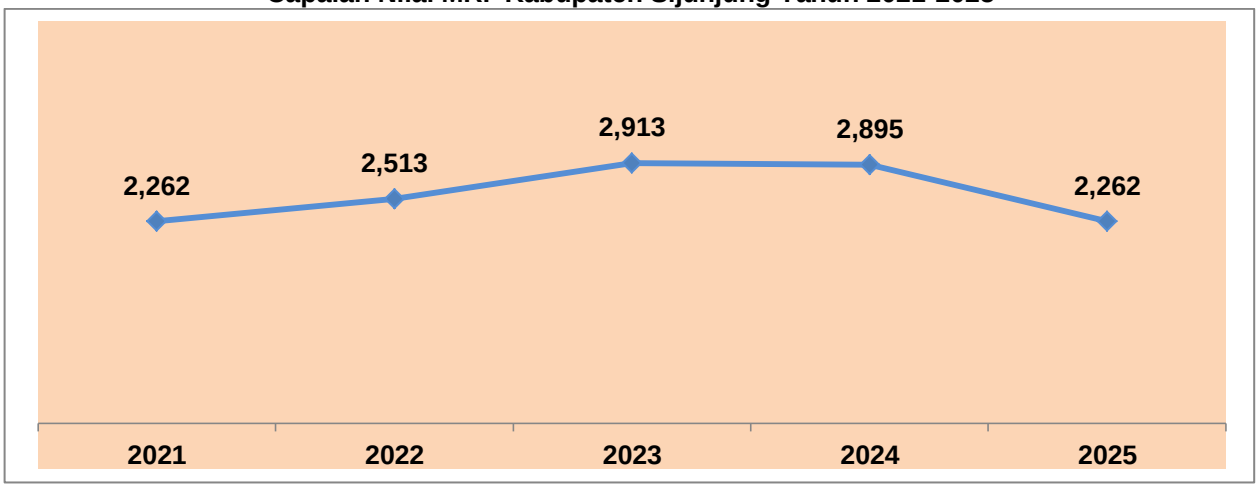


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Inspekorat Daerah Kab. Sijunjung, 2026

Sementara itu, pencapaian MRI pada tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 633 poin, dari 2,895 poin tahun 2024 turun menjadi 2,262 poin tahun 2025. Menurunnya nilai MRI menunjukkan penerapan manajemen risiko dari mulai perencanaan hingga pengawasan belum sesuai dengan standar yang dikeluarkan BPKP sebagai pengampu penerapan manajemen risiko.

Perbandingan capaian nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.3.
Capaian Nilai MRI Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025



Sumber: Inspekorat Daerah Kab. Sijunjung, 2026

Mengingat keterbatasan data yang tersedia sehingga perbandingan capaian MRI Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional serta daerah lain tidak dapat disajikan pada laporan kinerja ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai MRI Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, penerapan manajemen risiko menjadi keharusan dalam sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung, sebagaimanana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta implementasi kebijakan dapat diminimalisir risiko secara efektif.

Faktor kedua, manajemen risiko menjadi bahagian dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan secara jangka menengah, agar perumusan dan penetapan target kinerja pembangunan dapat dipetakan risiko yang akan terjadi. Sehingga target kinerja pembangunan dapat tercapai secara optimal dengan tingkat risiko kecil. Penerapan manajemen risiko tersebut, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 serta diturunkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.





Faktor ketiga, penguatan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang berkolaborasi dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga penerapan manajemen risiko meningkat secara berkualitas yang ditandai naiknya nilai MRI.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai MRI, namun terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian nilai MRI, antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum terintegrasinya pengelolaan risiko oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan • Kepala Perangkat Daerah belum maksimal melakukan monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan pencatatan atas keterjadian risiko	Penerapan manajemen risiko sangat tergantung dengan pemantauan dan evaluasi oleh BPKP sesuai dengan urgensi seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Mengatasi faktor penghambat pencapaian nilai MRI tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik pada tingkat strategis Pemda, Perangkat Daerah dan operasional/kegiatan melalui :
   - ✓ arahan dan pembinaan dari Komite Pengelolaan Risko;
   - ✓ monitoring oleh Unit Kepatuhan
   - ✓ evaluasi oleh APIP selaku Unit Pengawasan
2. Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana tindak pengendalian yang lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan dan mitigasi risiko setiap tahun anggaran.
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian Risiko serta mencatat atas keterjadian risiko untuk perbaikan dokumen pengelolaan risiko dan penilaian mandiri atas pengelolaan risiko.
4. Meningkatkan kualtas dan kompetensi serta profesionalisme sumber daya aparatur melalui pelatihan, workshop dan bentuk lainnya dengan melibatkan seluruh ASN secara terus menerus.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.777.390.850	2.266.130.857
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	850.189.964	216.327.294
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	273.096.400	12.493.571.951
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	15.579.590.677	156.754.900
5	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	758.223.150	202.405.976
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	142.733.519.512	113.877.725.594
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	406.725.250	98.590.158
8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.065.786	362.548.450
9	Program Kepegawaian Daerah	1.588.429.888	349.191.981
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	474.521.368	59.324.319
11	Program Penyelenggaraan Pengawasan	756.692.000	214.739.824
12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.721.231.300	496.292.471
13	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.463.175.490	289.393.095
14	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	296.246.659	43.285.900
15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	138.389.650	5.856.300
16	Program Pengelolaan Arsip	227.419.430	87.113.700
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.195.634.850	1.346.084.182
18	Program Penataan Bangunan Gedung	1.851.980.475	1.255.604.821
19	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	687.695.850	697.210.763
20	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.164.139.892	1.008.006.433
21	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	393.707.150	384.057.830
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	518.205.275	139.049.238
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	673.146.371.419	624.145.383.674

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja tercapai rata-rata sebesar 90,19 persen atau termasuk pada predikat “tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 2 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Indeks pelayanan publik (skor)	4,0	3,99	99,75	Sangat Tinggi
2.	Indeks inovasi daerah (skor)	60,1	48,45	80,62	Tinggi
	Rata-rata capaian sasaran 2			**90,19**	**Tinggi**

Sumber:Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

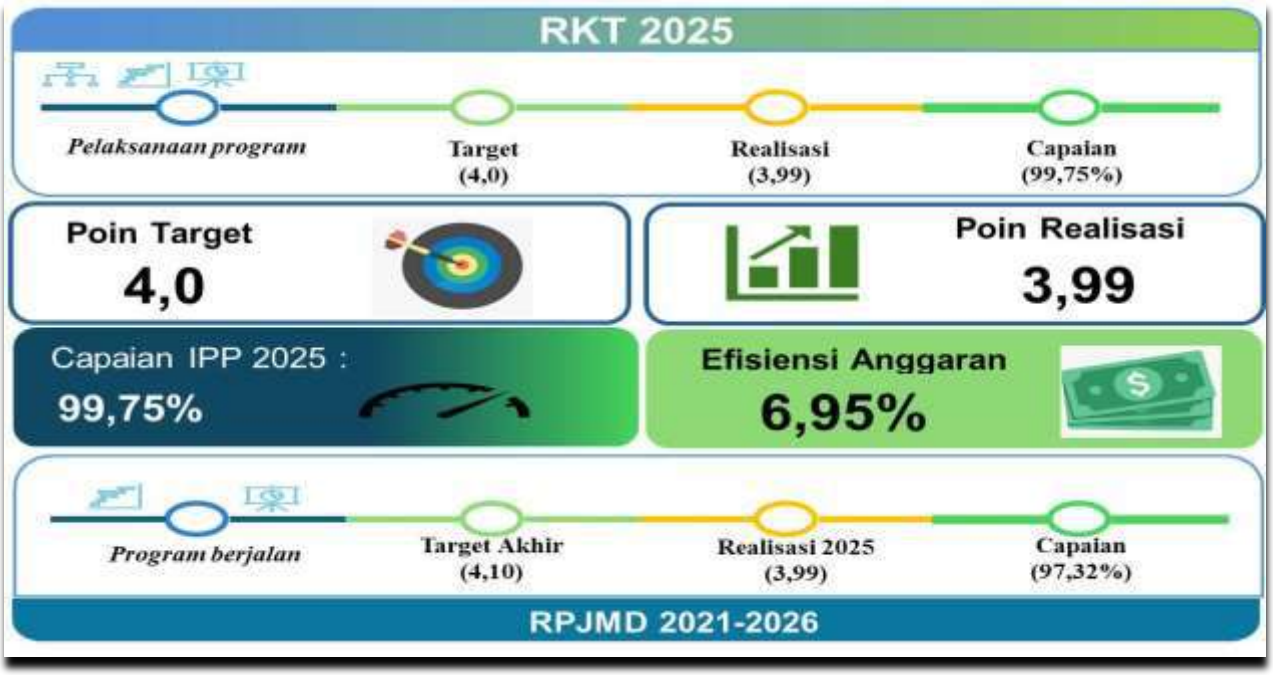
Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 2, dijelaskan berikut ini..

1. Indeks Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal dari sisi target. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 99,75 persen dari target IPP sebesar 4,0 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi" dengan realisasi sebesar 3,99 poin. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 capaian kinerja IPP sebesar 97,32 persen dari target IPP sebesar 4,10 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi" dengan realisasi sebesar 3,99 poin. Capaian IPP tersebut, mencerminkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah.

Gambaran pencapaian nilai IPP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.4
Capaian Nilai IPP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

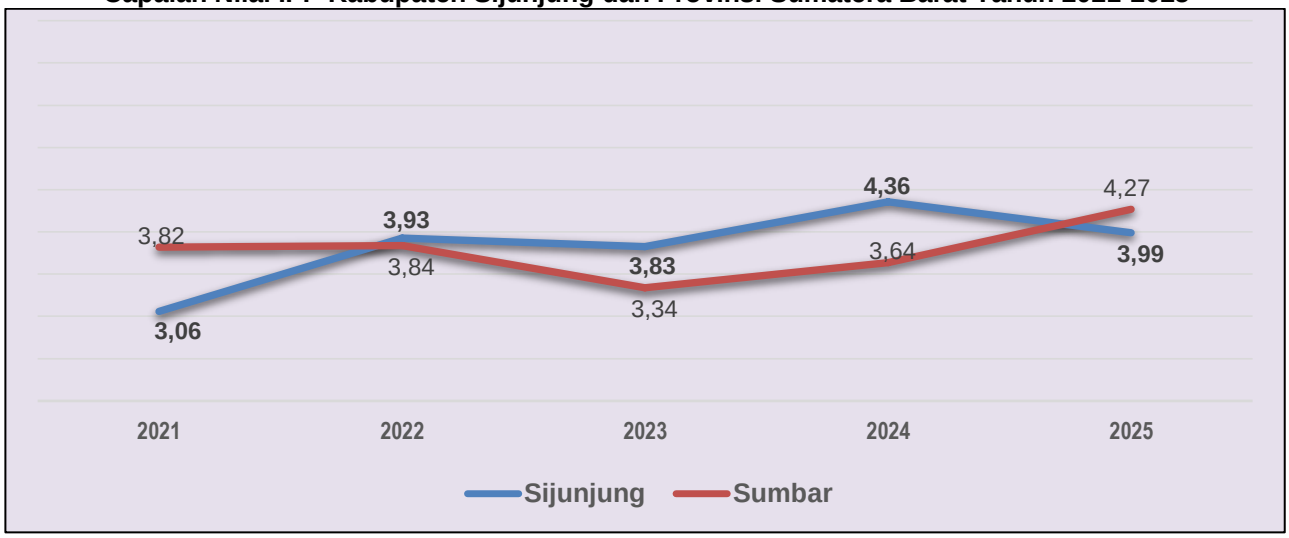


Sumber:Kementerian PANRB dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sementara itu, realisasi IPP pada tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan sebesar 0,37 poin, dari 4,36 poin tahun 2024 turun menjadi 3,99 poin tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan masih terdapatnya Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) belum maksimal memenuhi standar pelayanan publik berdasarkan standar kualitas pelayanan publik dari Kementerian PANRB. Disamping itu, capaian nilai IPP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, walaupun periode tahun 2022-2024 berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sedikit menurun kinerjanya dibandingkan Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan capaian nilai IPP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian IPP dibandingkan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.4.
Capaian Nilai IPP Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber:Kementerian PANRB , 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai IPP Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, meningkatnya kualitas penilaian maladministrasi pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman RI pada tahun 2024 sebesar 89,33 (Zona Hijau) dengan kategori A atau opini kualitas tertinggi. Capaian kinerja tersebut, mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 78,78 (Zona Hijau) dengan kualitas B dengan opini tinggi. Kondisi ini menunjukkan ini adanya peningkatan kualitas kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat dan modal dasar bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitasnya.


OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

No	Unit Layanan	Nilai
1	Dinas Sosial	90,73
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,02
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,91
4	Puskesmas Sungai Isnaek	91,89
5	Dinas Pendidikan	88,77
6	Puskesmas Padang Laweh	99,69
Nilai Akhir dan Zona		89,33
Kategori		A
Opini		Kualitas Tertinggi



Faktor kedua, peningkatan kualitas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik agar terhindar dari praktek maladministrasi melalui kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk pendampingan UKPP untuk memenuhi standar kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring akan adanya penilaian tingkat kepatuhan penyelengaraan pelayanan publik Ombudsman RI pada tahun 2026 ini di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan sampel UKPP, yaitu; Dinas Sosial, PPr dan PA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan RSUD Ahmad Syafii Maarif.

Faktor ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, responsif dan transparansi berbasis digitalisasi, terutama pada UKPP Pemerintahan Nagari/Desa yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. Sehingga diharapkan pelayanan publik pada UKPP yang berhubungan langsung dengan masyarakat lebih cepat dan responsif serta melayani berbasis teknologi informasi secara merata dan inklusif serta berkelanjutan.



Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai IPP, namun terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian nilai IPP, antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Keterbatasan sumber daya UKPP dalam memenuhi standar pelayanan pelayanan publik karena sempitnya ruang fiskal pembangunan	Terbatasnya jangkauan jaringan informasi pada beberapa nagari/desa untuk pengem-bangan pelayanan publik berbasis digital.
• Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam menerapkan standar pelayanan publik	

Mengatasi faktor penghambat pencapaian nilai IPP tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Mendorong TAPD agar mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik pada UKPP, terutama yang langsung melayani masyarakat.
2. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan melalui pendampingan dan bimbingan teknis secara efektif dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui aplikasi SPANLAPOR.

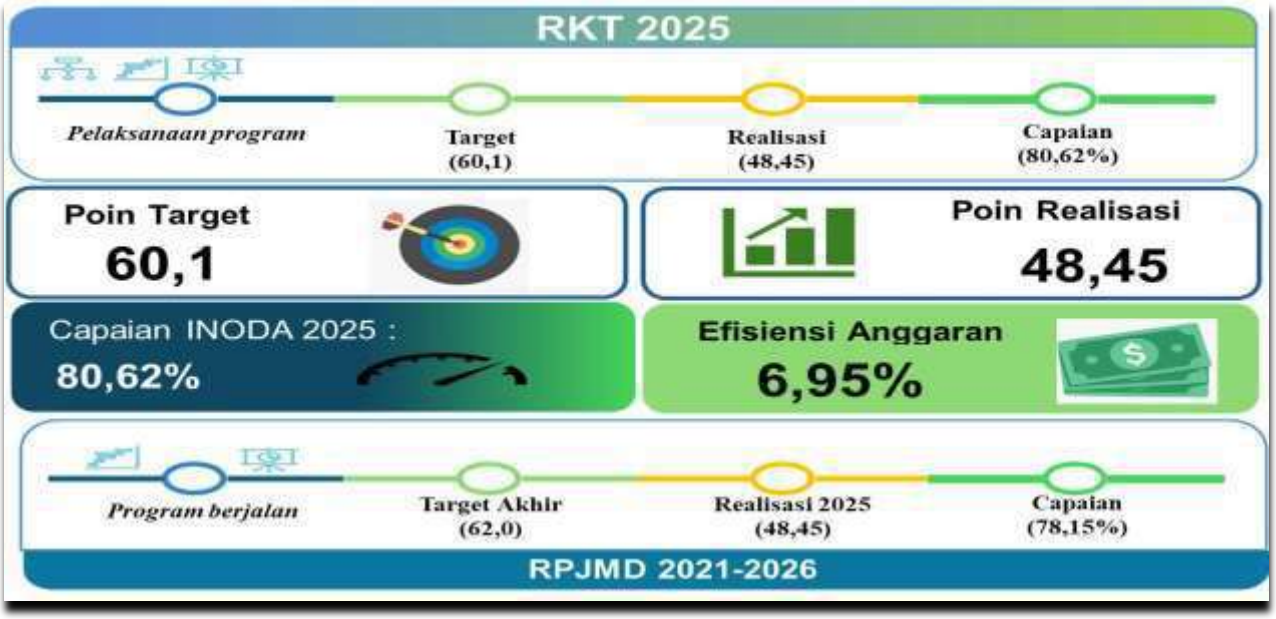
4. Meningkat kualitas daya saing UKPP melalui evaluasi dan penilaian kinerja secara internal setiap tahunan sebagai alat pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

2. Indeks Inovasi Daerah

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai belum optimal. Hal ini ditandai tingkat capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (INODA) sebesar 80,62 persen dari target INODA sebesar 60,1 poin atau berada pada kategori "tinggi" dengan realisasi sebesar 48,45 poin. Kondisi ini menunjukkan belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif karena ekosistem inovasi daerah belum terbangun secara optimal pada tahun 2025. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 capaian nilai INODA sebesar 78,15 persen dari target 62,0 poin atau berada pada kategori "tinggi". Capaian nilai INODA tersebut, mencerminkan tingkat penerapan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung belum berjalan sesuai dengan rencana jangka menengah secara maksimal.

Gambaran pencapaian nilai INODA Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.5
Capaian Nilai INODA Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026



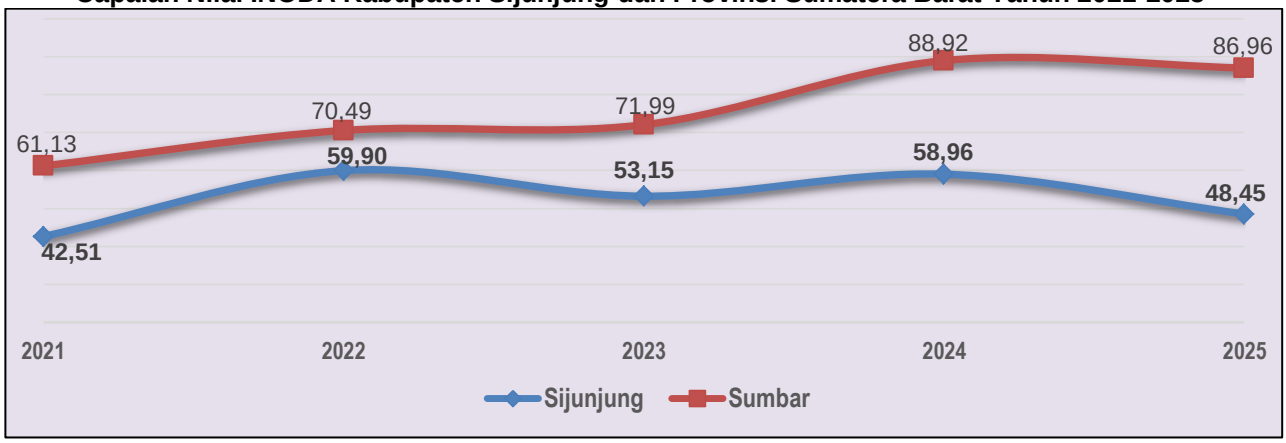
Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sementara itu, realisasi nilai INODA Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sangat signifikan sebesar 10,51 poin, dari 58,96 poin tahun 2024 turun menjadi 48,45 poin tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kualitas pemerintahan yang inovatif karena terjadinya stagnasi pembangunan ekosistem inovasi daerah pada tahun 2025. Disamping itu, capaian nilai INODA Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2021-2025 berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, Kondisi ini menunjukkan kualitas inovasi daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat lima tahun terakhir.

Perbandingan capaian nilai INODA Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian nilai INODA dibandingkan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

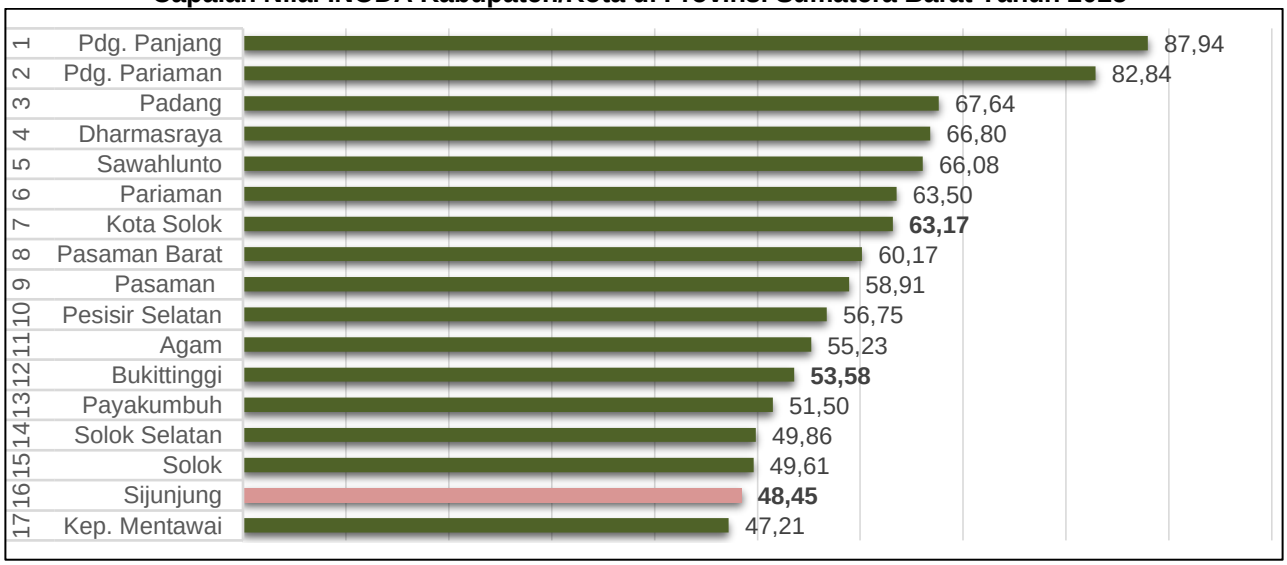
Grafik 3.5.
Capaian Nilai INODA Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber: Balitbang Prov. Sumbar dan Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Di sisi lain, capaian nilai INODA Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 16 diantara 17 kabupaten/kota berdasarkan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan daya saing Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung masih jauh tertinggal dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan nilai INODA Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6.
Capaian Nilai INODA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:Kementerian Dalam Negeri, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai INODA Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.435, 2023 KEMENDAGRI. BRIDA. Pembentukan. Nomenklatur. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN, PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Faktor pertama, penguatan kelembangaan inovasi daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran oleh pemerintah pusat melalui Menteri dalam Negari ditandai dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sehingga penerapan inovasi daerah di tataran Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien.

Faktor kedua, implementasi inovasi daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi keharusan karena salah satu kata kunci dalam visi Kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang. Esensial penerapan inovasi daerah dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 tidak sebatas dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, namun memperkuat transformasi ekonomi daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Faktor ketiga, penguatan terhadap penerapan inovasi daerah melalui kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga pemerintahan dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta lembaga lainnya. Sehingga dapat memberikan dampak terhadap pembangunan ekosistem inovasi secara terstruktur dan efektif serta adaptif. Mengingat inovasi merupakan salah satau alat atau kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahateraan masyarakat.





Faktor keempat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi di tataran perangkat daerah secara berkala untuk mendorong peningkatan kualitas inovasi daerah. Sehingga berimplikasi terhadap mening-katnya nilai INODA dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, agar inovasi dapat berkembang serta meluasnya penerapan inovasi seluruh sektor pembangunan.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian nilai INODA, namun terdapat beberapa faktor penghambat peningkatan nilai INODA, antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum optimalnya penerapan inovasi daerah pada tataran perangkat daerah ditandai dengan tidak maksimalnya pendokumen-tasian ekosistem inovasi sesuai dengan standarisasi IGA.	Pengembangan sistem penilaian IGA oleh Kementerian Dalam Negeri tiap tahun mengalami penyesuaian agar lebih berkualitas dan adaptif.
• Belum optimalnya komitmen seluruh ASN dalam menerapkan inovasi layanan publik, sehingga sedikit data yang disampaikan.	

Mengatasi faktor penghambat pencapaian nilai INODA tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Peningkatan komitmen Kepala Perangkat Derah untuk melahirkan dan melaksanakan inovasi daerah secara terstruktur dan berkesinambungan.
2. Penguatan ekosistem inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Klinik Inovasi Daerah dalam melakukan pendampingan untuk menciptakan inovasi daerah.
3. Pengembangan budaya inovasi melalui menanamkan nilai-nilai inovasi dilingkungan kerja dan masyarakat.
4. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan *evidence* yang diminta melalui pendampingan pengisian data inovasi secara berkala.
5. Memeberikan *reward* kepada inovator dan *punishment* kepada perangkat daerah yang tidak memiliki inovasi.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	964.949.000	654.012.771
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	431.670.560	30.117.200
3	Program Pendaftaran Penduduk	180.512.950	59.554.448
4	Program Pencatatan Sipil	101.548.700	83.226.472
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Ke-pendudukan	101.960.250	30.142.250
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	17.770.900	3.935.408
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	272.476.750	128.168.363
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	770.521.294	624.621.682
9	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.523.553.750	1.363.152.525
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.632.124.850	2.555.190.352
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	288.621.400	31.175.200

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 88,95 persen atau berada pada predikat "tinggi". Capaian rata-rata sasaran strategis 3 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,86	3,26	67,09	Sedang
2. Gini Rasio (nilai)	0,239	0,246	97,15	Sangat Tinggi
3. PDRB per-kapita (Rp juta)	52,74	54,11	102,60	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 3			**88,95**	**Tinggi**

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 3 dijelaskan berikut ini.

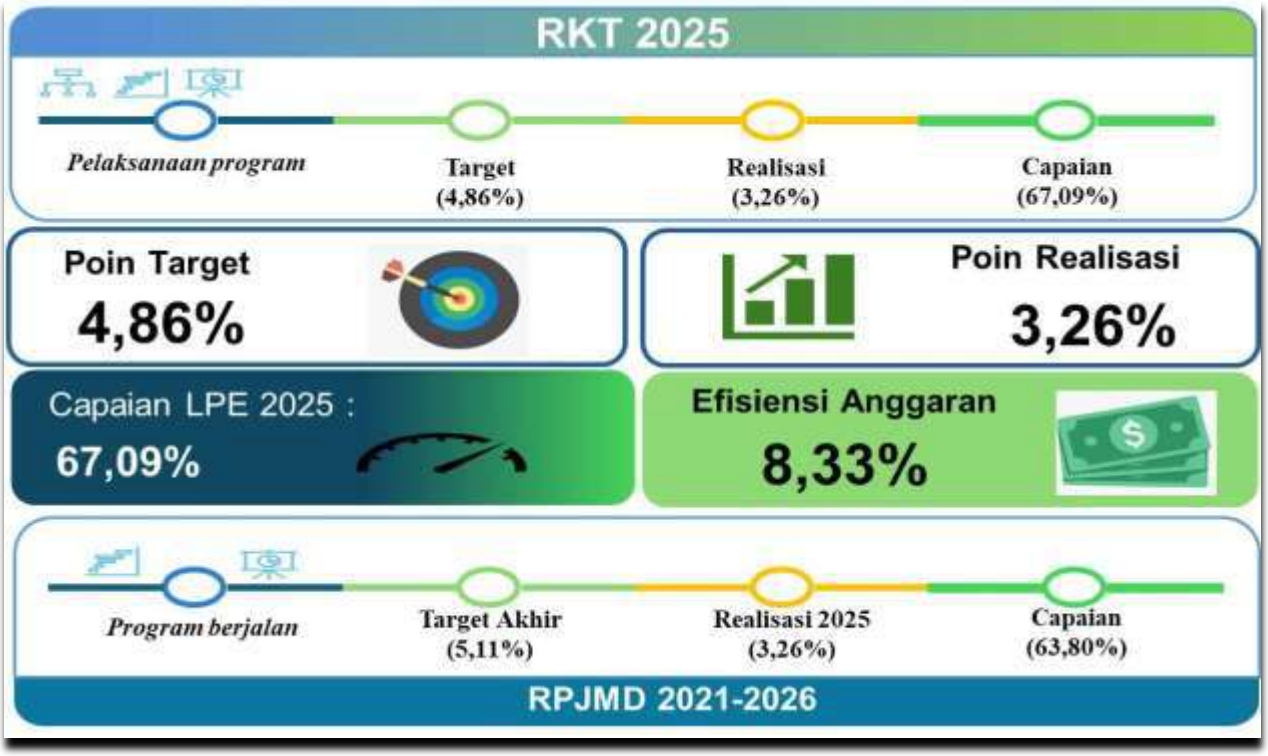
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan daya saing daerah melalui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2025 menunjukkan angka yang belum optimal. Hal ini ditandai capaian kinerja LPE tahun 2025 sebesar 67,09 persen dari target LPE sebesar 4,86 persen atau berada pada kategori "sedang" dengan realisasi sebesar 3,26 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 tidak tercapai sesuai dengan rencana.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 63,80 persen dari target akhir sebesar 5,11 persen. Hal ini mencerminkan kinerja laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 belum berjalan secara *on the track*. Sehingga memberi dampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan dalam jangka waktu menengah. Kondisi ini menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kinerja berikutnya.

Gambaran pencapaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.6
Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

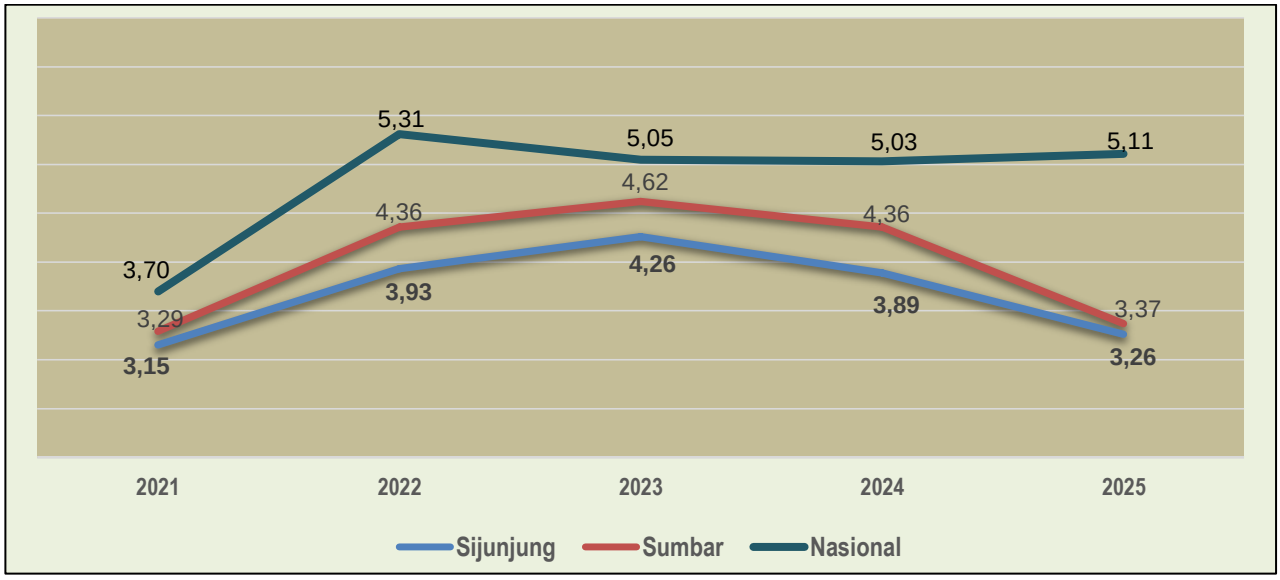


Sumber:Sijunjung Dalam Angka 2026 dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Di sisi lain, LPE daerah pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami pelambatan pertumbuhannya sebesar 0,63 poin, dari 3,89 persen tahun 2024 terkontraksi sebesar 3,26 persen tahun 2025. Hal ini disebabkan karena tidak terkendalinya laju inflasi di Provinsi Sumatera Barat akhir tahun 2025 akibat terjadinya bencana hidrometeorologi. Sehingga berdampak terhadap infrastruktur konektivitas wilayah rusak dan putus dan berimplikasi terhadap ongkos transportasi arus barang dan jasa melonjak tinggi. Kondisi ini ditandai melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan berada dibawah nasional.

Perbandingan capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

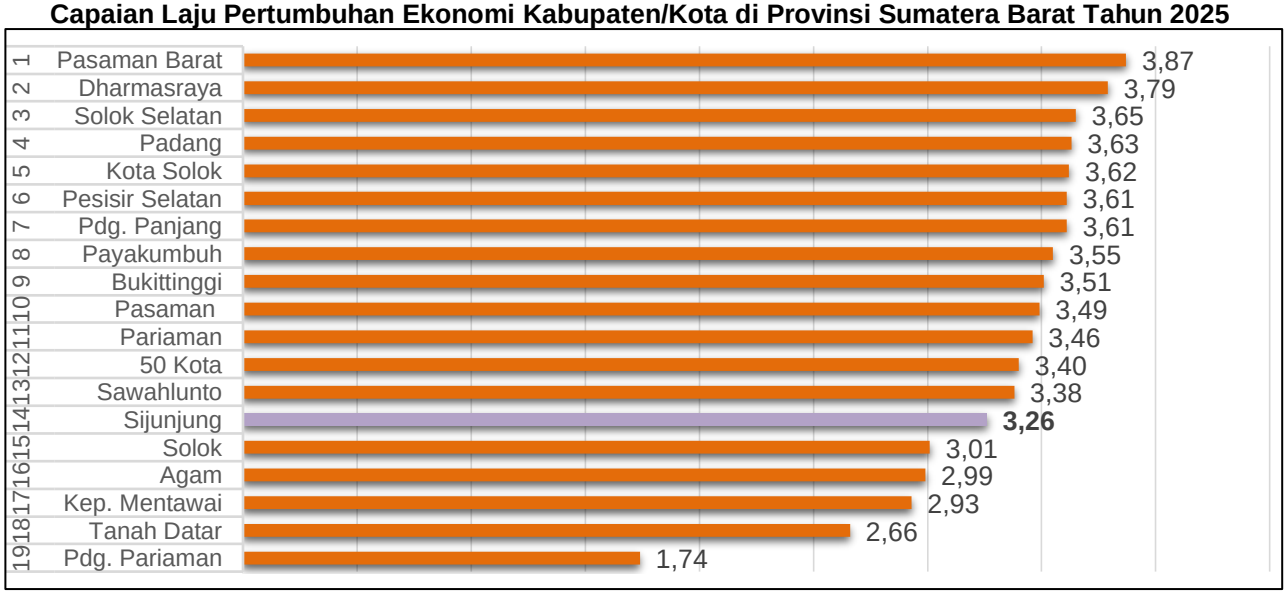
Grafik 3.7.
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber:BPS, 2026

Sementara itu, capaian LPE Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada di peringkat ke-14 diantara 19 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan daya saing ekonomi Kabupaten Sijunjung tertinggal dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.8.
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, Kabupaten Sijunjung mempunyai potensi sumber daya alam, baik mineral maupun non mineral yang dapat dikembangkan melalui peningkatan realisasi investasi yang berkelanjutan. Potensi investasi yang dapat dikembangkan hilirisasi migas blok sinamar serta hilirisasi komoditas karet dan kelapa sawit. Selain itu, pengembangan kawasan peternakan sapi potong berbasis investasi padat karya.



Faktor kedua, Kabupaten Sijunjung termasuk kawasan prioritas nasional swasembada pangan, air dan energi wilayah Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi di sektor energi karena Kabupaten Sijunjung mempunyai potensi pembangunan PLTS terapung dan PLTA.

Faktor ketiga, Kabupaten Sijunjung termasuk kawasan prioritas nasional pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan wilayah Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sehingga memberikan dampak terhadap pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan Berbasis komunitas untuk bergeraknya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif



Faktor keempat, penguatan tata kelola pemantauan dan evaluasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sehingga dapat dipantau secara berkala terkait dengan percepatan investasi PMA/PMDN, peningkatan produktivitas sektor unggulan, hlirisasi industri dan promosi pariwisata, perluasan kesempatan kerja, reformasi perizinan berusaha, percepatan pembangunan infrastruktur dan aspek lainnya.

Faktor kelima, pemanfaatan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2026 secara efektif. Sehingga tersedia data sektor ekonomi yang akurat dan valid sebagai pedoman dalam upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi melambatnya laju pertumbuhan ekonomi antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Keterbatasan sumber daya manusia yang unggul berdaya saing dalam upaya meningkatkan kualitas nilai tambah produk unggulan.	• Perubahan ekonomi global, seperti krisis perubahan harga komoditas, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat
• Ketergantungan dengan satu sektor ekonomi, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas	• Kebijakan pemerintah terkait pe-ngurangan Transper ke Daerah, sehingga berpengaruh menurunnya kontribusi investasi pemerintah terhadap nilai PDRB
• Cukup tingginya kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga mempengaruhi menurunnya konsumsi masyarakat dan investasi	• Bencana alam hidrometeoroogi yang mengakibatkan kerusakan infrastruk-tur wilayah dan dasar, sehingga berdampak terhadap laju inflasi harga
• Infrastruktur wilayah yang kurang memadai untuk memperlancar aksesibilitas arus barang dan jasa.	

Mengatasi faktor penghambat pencapaian laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Meningkatkan konsumsi masyarakat melalui program stimulus ekonomi, seperti subsidi atau bantuan langsung.
2. Mengurangi pengangguran melalui program pelatihan kerja dan penempatan kerja.
3. Mengoptimalkan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
4. Meningkatkan investasi melalui program insentif investasi dan peningkatan kualitas infrastruktur.
5. Mengembangkan sektor pertanian dan industri melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.
7. Mengembangkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

2. Gini Rasio

Capaian kinerja gini rasio atau ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 sebesar 97,15 persen dari target gini rasio sebesar 0,239 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan poin realisasi sebesar 0,246. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja gini rasio pada tahun 2025 cukup berjalan sesuai dengan rencana, walaupun capaiannya belum optimal. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja gini rasio pada tahun 2025 sebesar 97,56 persen dari target gini rasio sebesar 0,240. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sijunjung berjalan sesuai dengan rencana jangka menengah.

Gambaran pencapaian kinerja gini rasio Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.7
Capaian Kinerja Gini Rasio Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

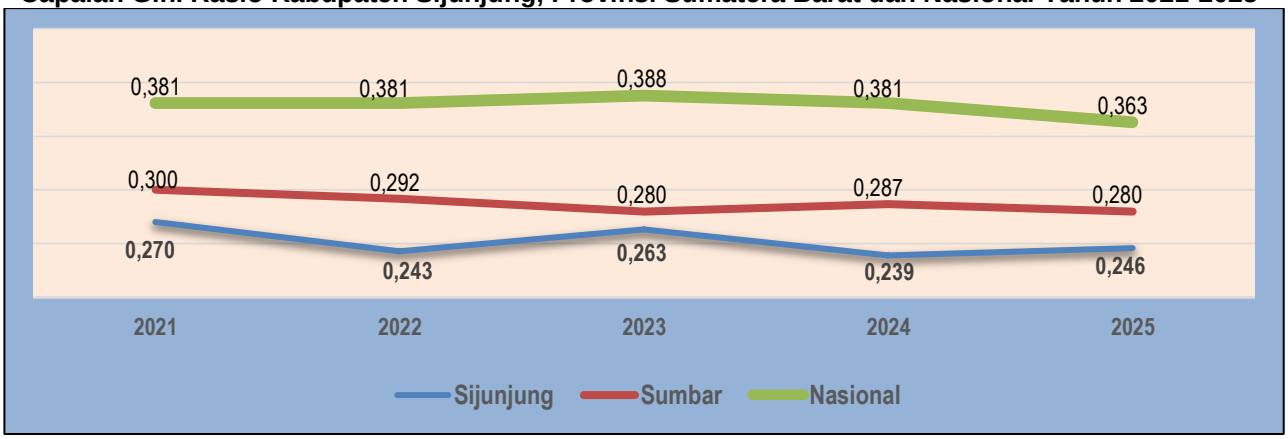


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka

Di sisi lain, gini rasio Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin, dari 0,239 poin tahun 2024 naik menjadi 0,246 poin tahun 2025. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan kategori rendah dengan masyarakat kategori menengah. Sementara itu, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional pada tahun 2025, gini rasio Kabupaten Sijunjung masih tetap terjaga di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Perbandingan capaian kinerja gini rasio Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan gini rasio dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

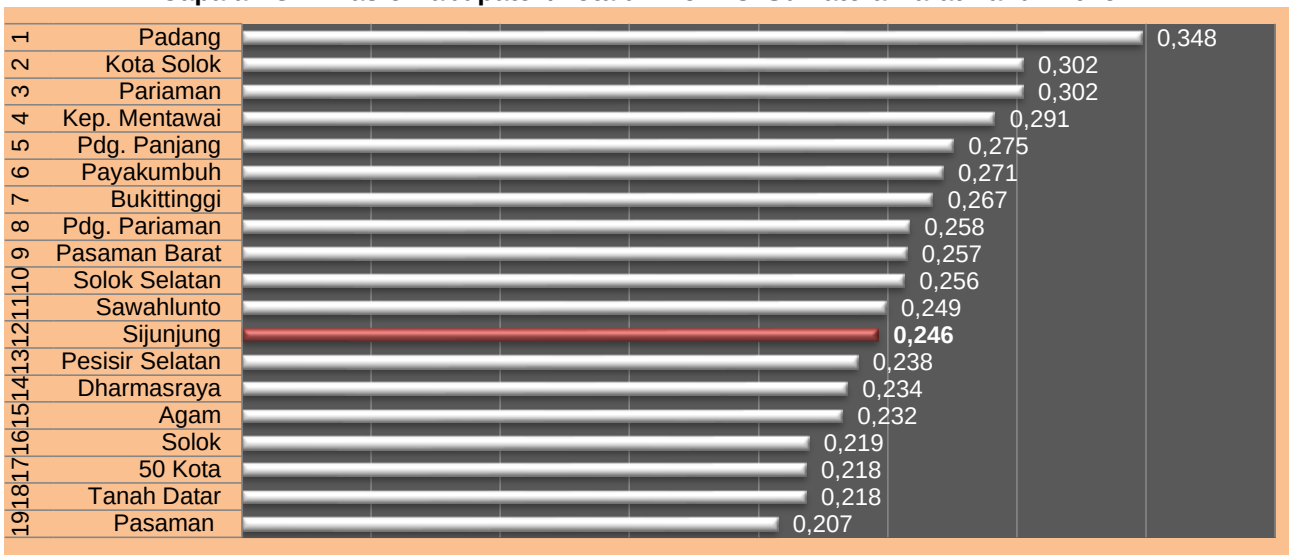
Grafik 3.9.
Capaian Gini Rasio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber:BPS, 2026

Sementara itu, capaian gini rasio Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada di peringkat 12 terendah diantara 19 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan gini rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.10.
Capaian Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian gini rasio Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, pengembangan kawasan transmigrasi Muaro Takung sebagai kawasan prioritas nasional tahun 2025-2029 yang diimplementasi melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmingasi oleh Kementerian Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sehingga memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan setiap wilayah agar tidak terjadinya ketimpangan pendapatan.

Faktor kedua, Kabupaten Sijunjung sebagai salah kawasan *geopark* nasional yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan nama "Geopark Ranah Minang Silokek". Sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan yang merata di setiap nagari/desa karena dapat mengembangkan potensi *geosite*. Saat ini Geopark Ranah Minang Silokek menjadi salah satu calon aspiring *Unesco Global Geopark*.



Faktor ketiga, penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan lebih mengedepankan pendekatan tematik-holistik, integrasi dan spasial. Sehingga terciptanya arah kebijakan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta dapat berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian gini rasio, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi menurunnya gini rasio antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Cukup tingginya kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga mempengaruhi melebar ketimpangan pendapatan masy-arakat	• Situasi ekonomi global tidak menentu, sehingga mempengaruhi pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM
• Infrastruktur wilayah dan dasar kurang memadai dalam rangka pemeraataan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.	• Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur wilayah dan dasar, sehingga berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Mengatasi faktor penghambat penurunan gini rasio tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

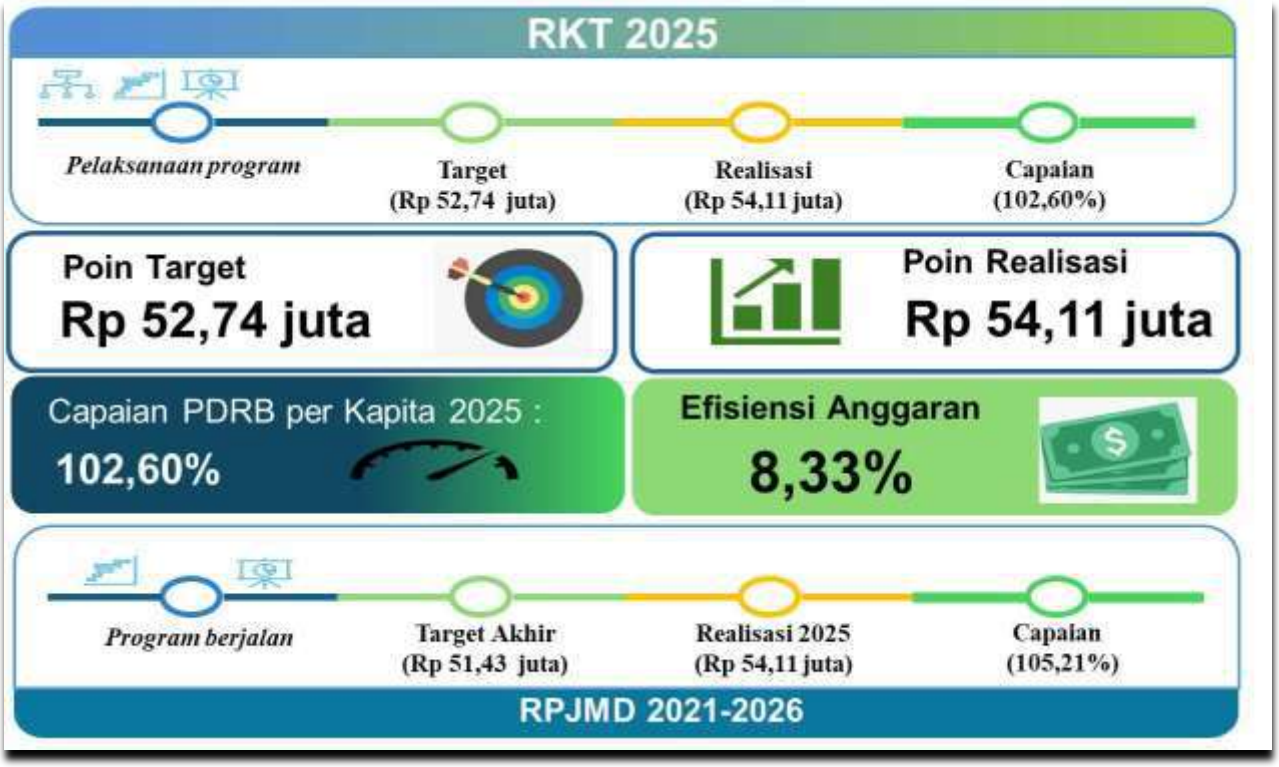
1. Perluasan akses lapangan kerja melalui investasi pada karya secara efektif.
2. Peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan akses ke fasilitas dan layanan.
4. Pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dan wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan inklusif.

3. PDRB per-Kapita (ADHB)

Capaian kinerja PDRB per-kapita (ADHB) Kabupaten Sijunjung tahun 2025 sebesar 102,60 persen dari target PDRB per-kapita sebesar Rp 52,74 juta atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar Rp 54,11 juta. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja PDRB per-kapita pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja PDRB per-kapita pada tahun 2025 sebesar 105,21 persen dari target sebesar Rp 51,43 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang melebihi target.

Gambaran pencapaian kinerja PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.8
Capaian Kinerja PDRB per-Kapita Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

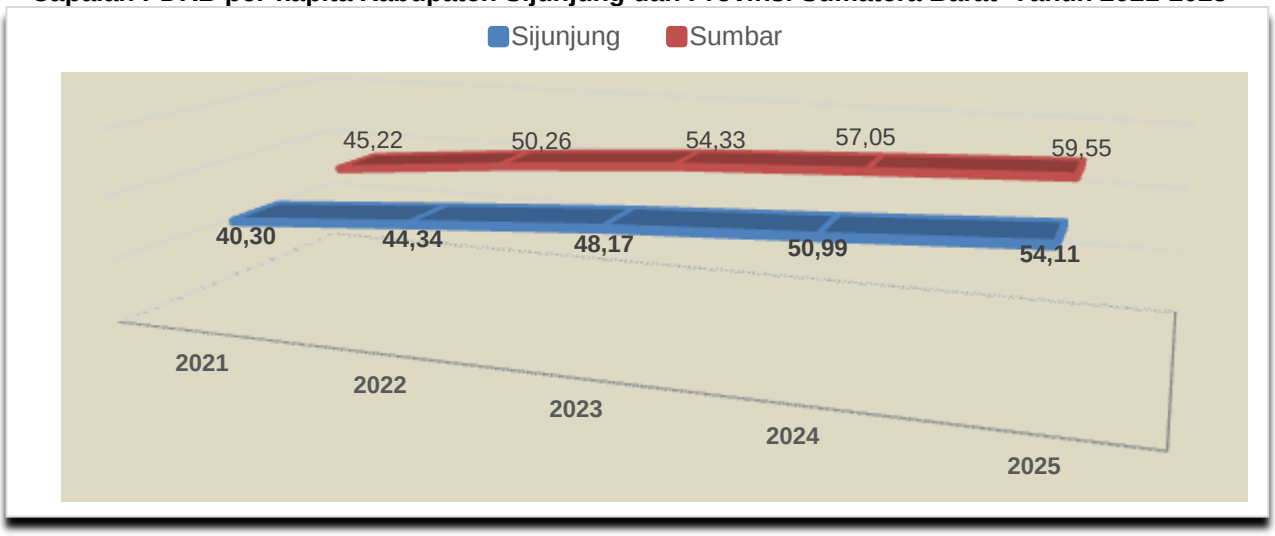


Sumber:Sijunjung Dalam Angka 2026 dan Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sementara itu, PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp 3,12 juta, dari Rp 50,99 juta tahun 2024 naik menjadi Rp 54,11 juta tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung masih berada dibawah. Kondisi ini mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah.

Perbandingan capaian kinerja PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan PDRB per-kapita dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

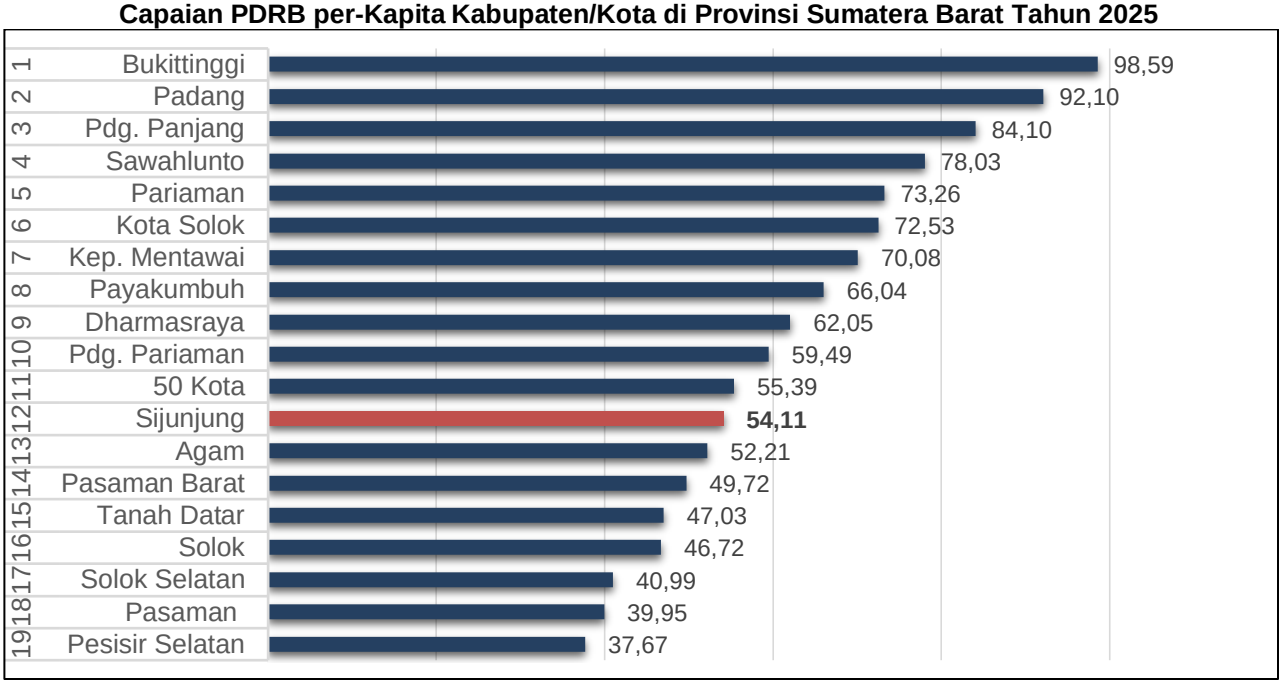
Grafik 3.11.
Capaian PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber:Sijunjung Dalam Angka 2026

Di satu sisi, capaian PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada di peringkat 12 diantara 19 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan PDRB per-kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.12.
Capaian PDRB per-Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 2,71 persen tahun 2024 tumbuh menjadi 3,93 persen tahun 2025. Selain itu diikuti tumbuhnya sektor industri pengolahan secara signifikan, dari 3,17 persen tahun 2024 naik menjadi 8,53 persen tahun 2025. Sehingga secara rata-rata berimplikasi terhadap peningkatan PDRB per-kapita masyarakat Kabupaten Sijunjung.





Faktor kedua, peningkatan produktivtas dan nilai tambah tanaman pangan dan holtikultura melalui perluasan areal lahan dan peningkatan kapasitas petani dalam menggunakan teknologi tepat guna serta perluasan akses pasar hasil pertanian. Selain itu, meningkatnya jumlah bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian/Lembaga. Sehingga bertumbuhnya pendapatan petani yang mengungkit peningkatan PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian PDRB per-kapita, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi menurunnya PDRB per-kapita antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum optimalnya pengembangan hiirisasi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan petani	• Kondisi ekonomi global yang mempengaruhi terhadap perubahan harga komoditas, sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan petani
• Infrastruktur wilayah dan dasar kurang memadai dalam upaya memperluas kesempatan kerja .	• Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur wilayah dan dasar, sehingga berdampak terhadap sempitnya perluasan lapangan kerja .

Mengatasi faktor penghambat peningkatan PDRB per-kapita tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Memberikan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui katalisator penyediaan lahan akan dibangun.
2. Peningkatan kualitas hiliriasasi pertanian dari hulu sampai dengan hilir.
3. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif melalui bantuan fasilitasi memperoleh akses permodalan dan keahlian.
4. Peningkatan kualitas penerapan ekonomi digital sebagai media memperluas akses pasar pelaku ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.317.167.475	913.387.417
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.811.862.250	3.215.557.373
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	375.773.295	281.841.905
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	93.714.650	30.519.473
5.	Program Penyuluhan Pertanian	2.044.561.478	886.137.185
6.	Program pengelolaan perikanan tangkap	288.750.000	32.108.900
7.	Program pengelolaan perikanan budi daya	417.878.200	294.210.740
8.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13.000.000	.2728.450
9.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	417.878.200	66.765.150
10.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	500.652.150	227.574.641
11.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	22.168.800	12.409.521
12.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	897.000.000	255.326.200
13	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	97.908.100	25.675.907
14.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	53.159.900	16.304.354
15.	Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	139.781.500	85.018.855
16.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	58.441.650	356.66.621
17.	Program Promosi Penanaman Modal	247.607.950	3.199.694
18.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	57.618.400	50.483.580
19.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.648.450	2.400.412
20.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.238.508.226	971.218.747
21.	Program Pemasaran Pariwisata	1.518.504.144	158.965.553
22.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	409.414.580	55.472.975
23.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	17.823.850	16.869.438
24.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	16.606.050	145.73.703
25.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	140.134.750	54.637.586
26.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	80.229.550	26.630.688
27.	Program Pengembangan UMKM	150.329.750	13.949.095
38.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	12.674.950	163.748.436
29.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	464.605.450	118.699.257

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 4 : Menurunnya kemiskinan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran menurunnya kemiskinan dengan 1 (satu) indikator kinerja tercapai sebesar 104,08 persen atau berada pada kategori predikat "sangat tinggi". Capaian rata-rata sasaran straegis 4 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Angka Kemiskinan (%)	5,36	5,15	104,08	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 4			**104,08**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 dijelaskan berikut ini.

1. Angka Kemiskinan

Capaian kinerja angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 sebesar 104,08 persen dari target angka kemiskinan sebesar 5,36 persen atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan angka realisasi sebesar 5,15 persen. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja angka kemiskinan pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara optimal karena melebihi dari target. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja angka kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 107,38 persen dari target sebesar 5,53 persen. Kondisi ini mencerminkan program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi modal dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Gambaran pencapaian angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.9
Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

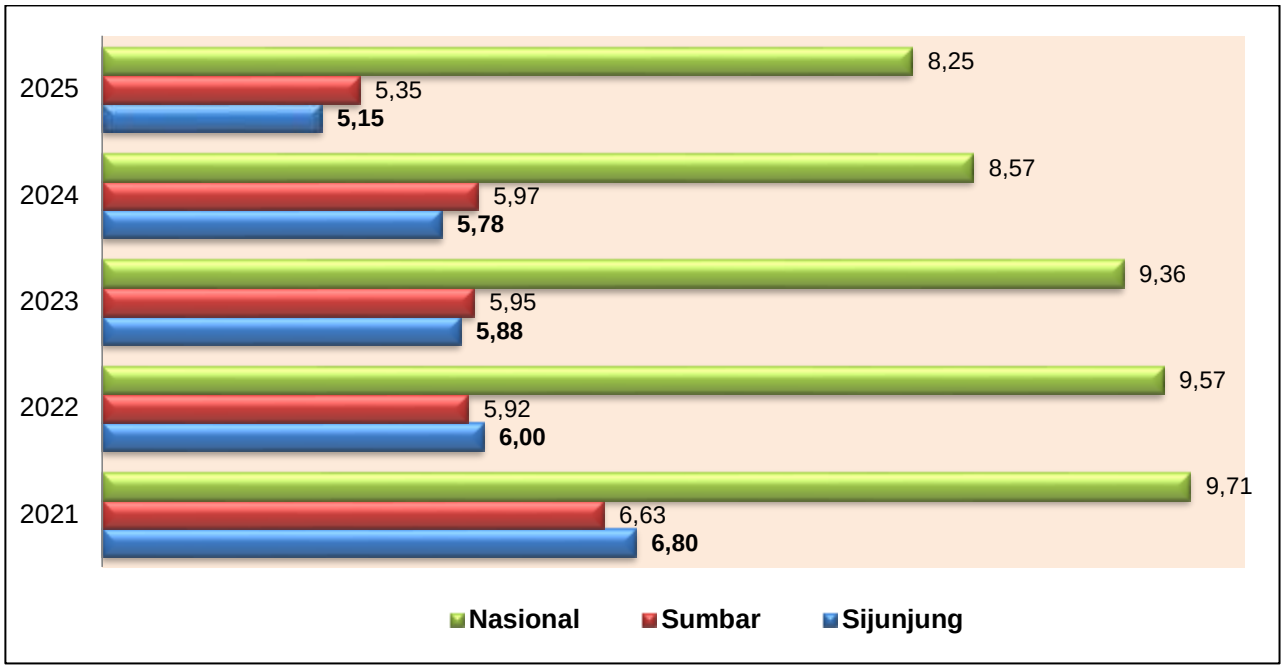


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sementara itu, capaian angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 0,63 poin, dari 5,78 persen tahun 2024 turun menjadi 5,15 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan berjalannya program pengentasan kemiskinan lintas sektor secara terintegratif dan inklusif. Di satu sisi, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional pada tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung tetap terjaga berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional sejak tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan konsistensinya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, sehingga memberikan dampak terhadap posisi selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perbandingan capaian angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan angka kemiskinan dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

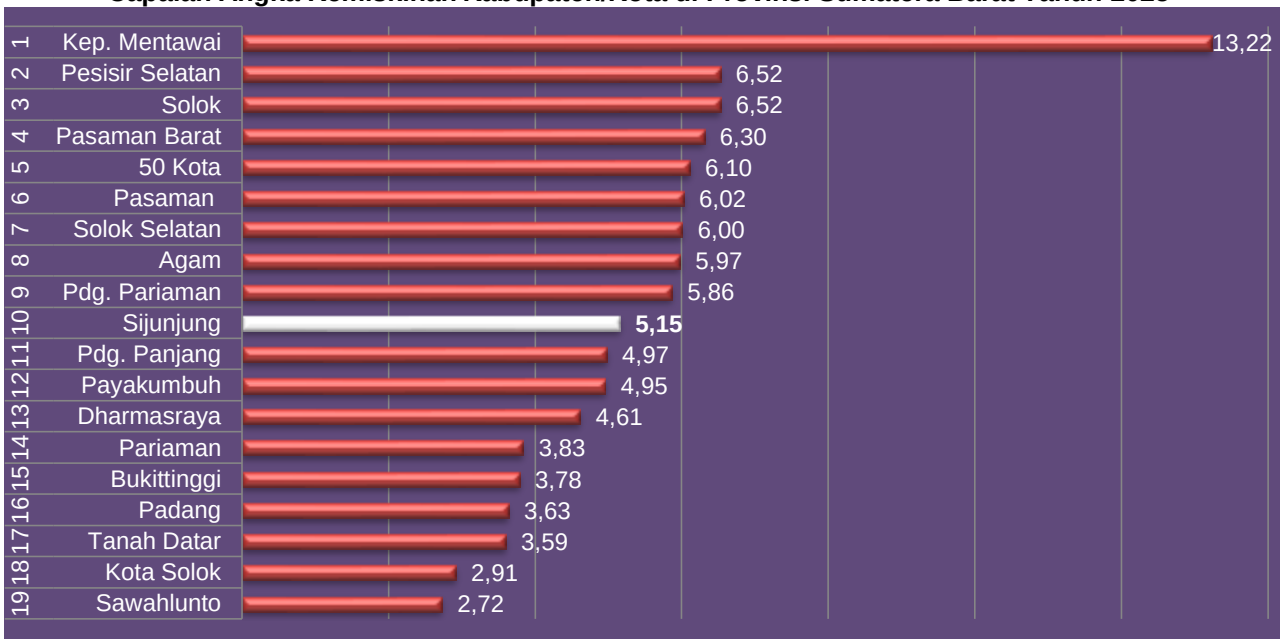
Grafik 3.13.
Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber; BPS, 2026

Sementara itu, capaian angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada di peringkat 10 terbawah diantara 19 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.14.
Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, peningkatan kualitas perlindungan sosial melalui pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kaum miskin dan masyarakat rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program tersebut, merupakan program unggulan daerah sejak empat tahun terakhir. Sehingga memberikan dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Selain itu, memberikan pelatihan untuk pengembangan ekonomi produktif.

Faktor kedua, kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) melalui sinergi program pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan pra sejahtera secara berkesinambungan. Sehingga sinergi program ini berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih layak. Kondisi tersebut, berdampak terhadap terpenuhinya standar hidup masyarakat secara inklusif.



Faktor ketiga, pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan melalui sinergi program dengan BAZNAS terkait dengan peningkatan kualitas ekonomi produktif bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial. Sehingga pemberian bantuan sosial ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara signifkan dengan sendirinya dapat menurun angka kemiskinan.





Faktor keempat, konsistensi pelaksanaan program bea siswa untuk keluarga berpenghasilan rendah dalam upaya mengurangi beban pengeluaran. Sehingga memberikan dampak terhadap berkurangnya angka putus sekolah. Program bea siswa bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah merupakan salah satu program unggulan daerah sejak lima tahun terakhir melalui sinergi Program Sijunjung Cerdas dengan BAZNAS.

Faktor kelima, peningkatan kualitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui penguatan tata kelola secara efektif dan efisien. Sehingga dapat terpantau pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara berkala serta menyampaikan laporan kinerja program pengentasan kemiskinan secara tepat waktu kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan angka kemiskinan, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Cenderung melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga berimplikasi terhadap penurunan pendapatan masyarakat.	• Kondisi ekonomi global yang berpengaruh terhadap perubahan harga komoditas, sehingga mempengaruhi pendapatan petani
• Terbatas aksesbilitas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan dan ekonomi.	• Belum meratanya program strategis nasional setiap wilayah.
• Infrastruktur wilayah dan dasar kurang memadai dalam upaya meningkatkan aksesbilitas aspek sosial ekonomi masyarakat	• Perubahan iklim mengakibatkan sering terjadinya bencana kekeringan, sehingga berdampak terhadap pendapatan masyarakat petani .

Mengatasi faktor penghambat penurunan angka kemiskinan tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program strategis nasional pembanguan Sekolah Rakyat sebagai meningkatkan aksesbilitas jenjang pendidikan bagi keluarga miskin dan pra sejahtera.

2. Pegembangan sinergi program dengan BAZNAS dan perusahaan dalam membantu keluarga miskin dan pra sejahtera dalam mengurangi beban pengeluaran
3. Pengembangan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah penerima manfaat secara merata.
4. Peningkatan kualitas pemberian siswa bagi keluarga miskin dan pra sejahtera secara inklusi dan merata .

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya kemiskinan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	343.441.550	93.183.650
2.	Program Rehabilitasi Sosial	132.327.050	21.932.975
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	44.700.000	8.205.250
4.	Program Penanganan Bencana	393.180.350	100.661.195
5.	Program pengembangan perumahan	129.852.030	105.366.100
6.	Program Hubungan Industrial	2.249.408.700	3.168.536.294
7.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	25.000.000	1.839.250
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	965.793.319	122.426.375

Sumber; BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 5 : Memperluas kesempatan kerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran memperluas kesempatan kerja dengan 1 (satu) indikator kinerja tercapai sebesar 105,88 persen atau berada pada kategori predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 5 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,86	4,59	105,88	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 5			**105,88**	**Sangat Tinggi**

Sumber; Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 dijelaskan berikut ini.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian kinerja dalam upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 sangat optimal, hal ini ditandai capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 105,88 persen dari target TPT sebesar 4,86 persen atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan angka realisasi sebesar 4,59 persen. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja TPT pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara optimal karena melebihi dari target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja TPT pada tahun 2025 sebesar 87,15 persen dari target sebesar 4,00 persen. Kondisi ini mencerminkan penurunan TPT di Kabupaten Sijunjung belum berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi modal dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan

lima tahun mendatang dalam upaya memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran .

Gambaran pencapaian TPT Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.10
Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

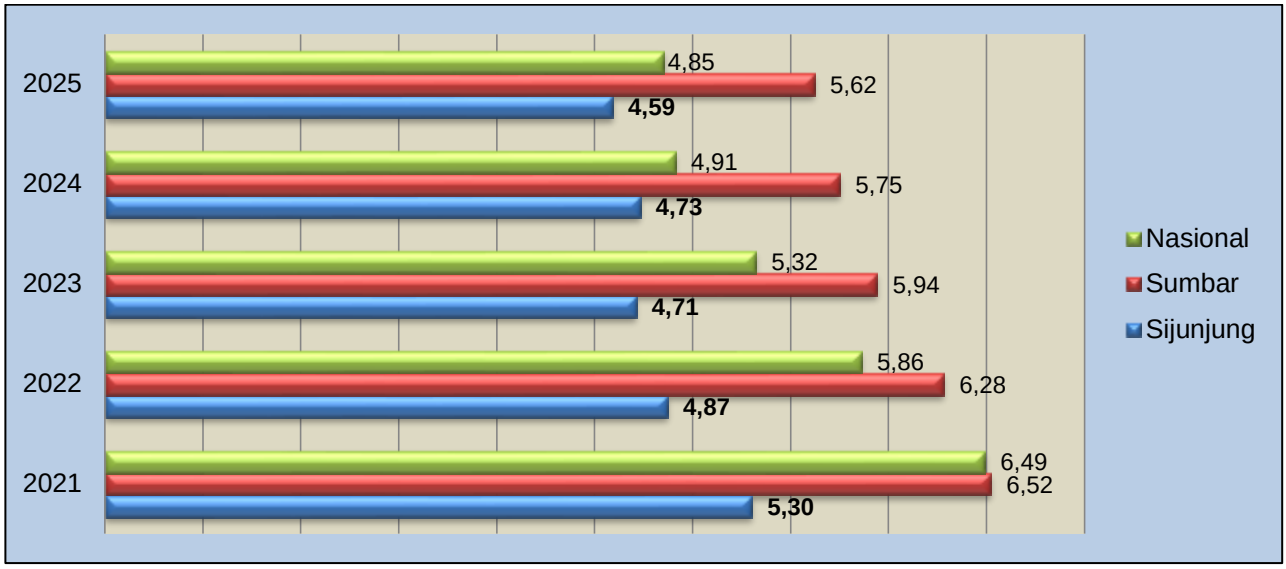


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sementara itu, capaian TPT Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,14 poin, dari 4,73 persen tahun 2024 turun menjadi 4,59 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan berjalannya program perluasan kesempatan kerja secara efektif dan terintegratif. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional pada tahun 2025, TPT Kabupaten Sijunjung tetap terjaga berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan konsistensinya pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif.

Perbandingan capaian TPT Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan TPT dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

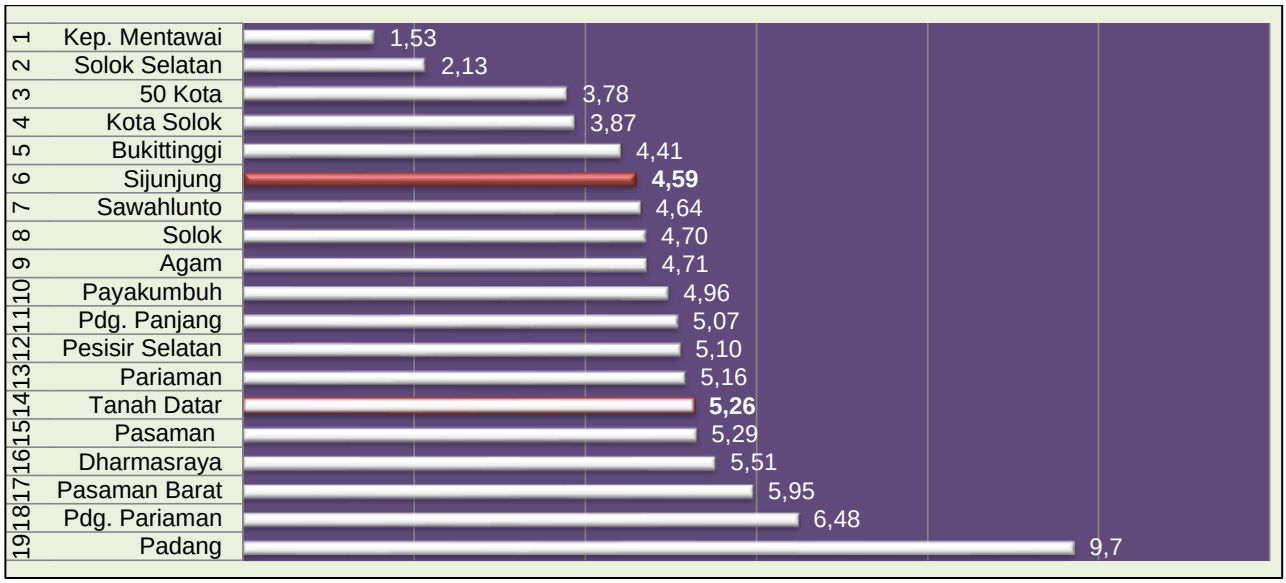
Grafik 3.15.
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber; BPS, 2026

Di satu sisi, capaian TPT Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada di peringkat 6 terendah diantara 19 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan program perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sijunjung lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

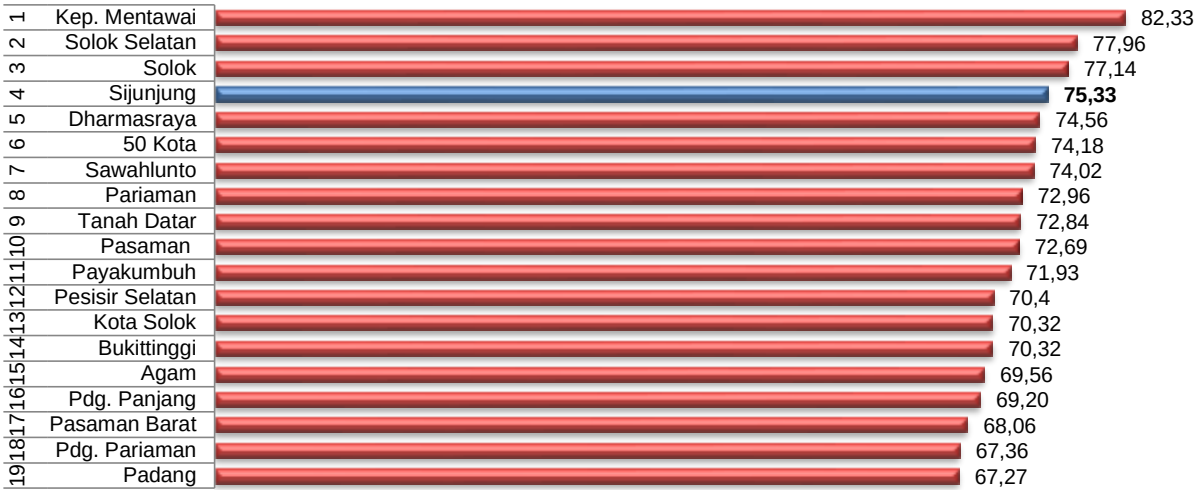
Grafik 3.16.
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan penurunan TPT tidak terlepas dari meningkatnya TPAK bagi penduduk usia produktif. Sehingga memberikan dampak terhadap berjalannya program perluasan kesempatan kerja secara efektif dan merata. Gambaran TPAK kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 berikut ini.





Faktor kedua, pengembangan program pelatihan bagi pencari kerja sesuai yang dibutuhkan di pasar kerja atau industri. Sehingga menigkatkan penerima program perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri pemula dan padat karya insfrastruktur. Selain itu, meningkatkan kuantitas pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.



Faktor ketiga, memperluas jaringan bursa kerja melalui peningkatan kapasitas petugas antar kerja pada Bursa Kerja Khusus (BKK) secara *hybrid*. Sehinggga meningkatnya jumlah sumber daya pelayanan antar kerja yang memiliki kompetensi profesional serta pemahaman yang baik terhadap regulasi ketene-gakerjaan dan kebutuhan pasar kerja

Faktor keempat, peningkatan kuallitas kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi melalui *sharing cost* pelatihan berbasis kompetensi dengan skema *boarding*. Sehinggga terciptanya tenaga kerja yang siap kerja atau berwirausaha.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan angka pengangguran, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja, sehingga berimplikasi terhadap kompetensi kerja yang dibutuhkan di pasar kerja atau dunia industri	• Penyebaran informasi lowongan kerja tidak sesuai dengan kompetensi kerja yang tersedia.
• Rendahnya motivasi pencari kerja untuk bekerja di luar daerah Kabupaten Sijunjung.	
• Rendahnya motivasi angkatan kerja berwirausaha	• Terbatasnya kesempatan memperoleh akses permodalan karena sulitnya persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan

Mengatasi faktor penghambat penurunan angka pengangguran tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Menberikan dorongan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja, sehingga mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Pelatihan kompetensi pencari kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dengan pasar kerja.
3. Peningkatan kualitas program penempatan tenaga kerja melalui kerjasama dengan dunia kerja dalam memperoleh informasi lowongan kerja secara *hybrid*
4. Pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta pengembangan industri lokal.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis memperluas kesempatan kerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.380.210.400	585.400.170
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	228.737.400	76.129.190

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 90,23 persen atau berada pada predikat “tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 6 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 6 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Pembangunan Manusia (poin)	73,98	73,73	99,66	Sangat Tinggi
2. Prevalensi Balita stunting (%)	20,0	28,2*)	70,92	Sedang
3. Indeks Pembangunan Gender (poin)	94,30	94,39	100,10	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 6			**90,23**	**Tinggi**

*) *Data SGI 2025*

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 6 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan yang layak di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai secara optimal. Hal ini ditandai kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai sebesar 99,66 persen dari target IPM sebesar 73,98 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan realisasi sebesar 73,73 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja IPM pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana karena mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja IPM pada tahun 2025 sebesar 99,23 persen dari target IPM sebesar 74,30 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IPM Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi modal dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung periode rencana kinerja berikutnya. .

Gambaran pencapaian IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.11
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

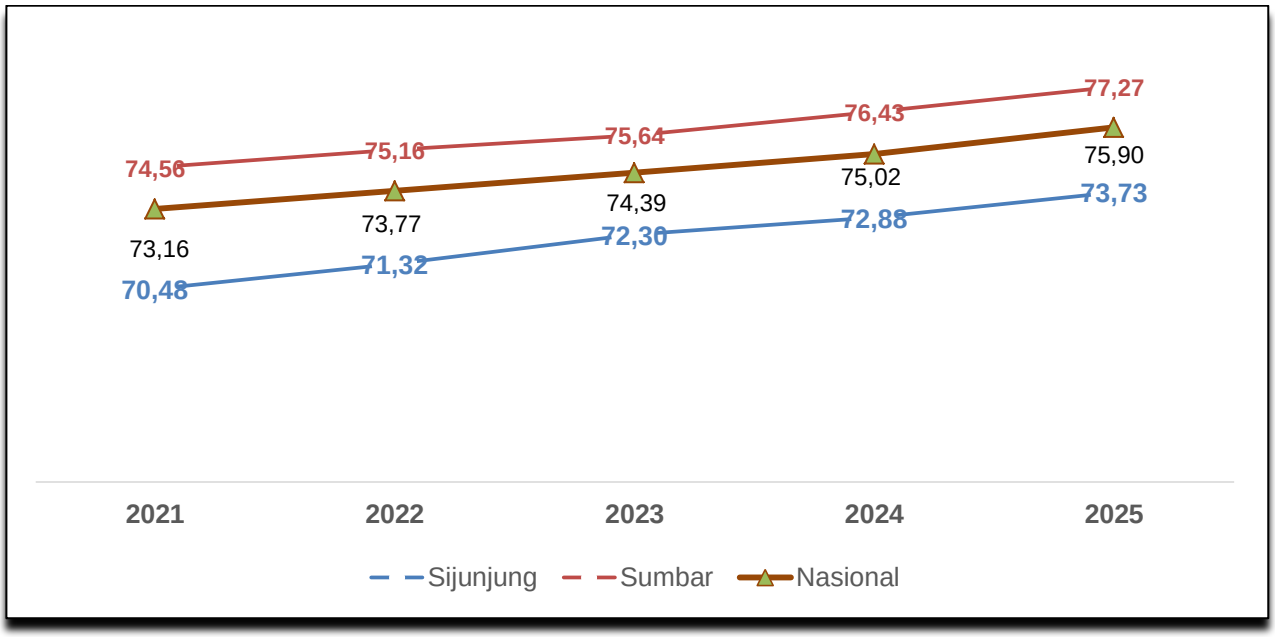


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sementara itu, capaian IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 0,85 poin, dari 72,88 poin tahun 2024 naik menjadi 73,73 poin tahun 2025. Hal ini menunjukkan berjalannya program peningkatan kualitas sumber daya manusia secara efektif, terintegratif dan kolaboratif sesuai rencana yang ditetapkan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional pada tahun 2025, IPM Kabupaten Sijunjung tetap berada dibawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan implementasi program peningkatan kualitas sumber daya manusia belum berjalan secara efektif dibandingkan dengan daerah lain.

Perbandingan capaian IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan IPM dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

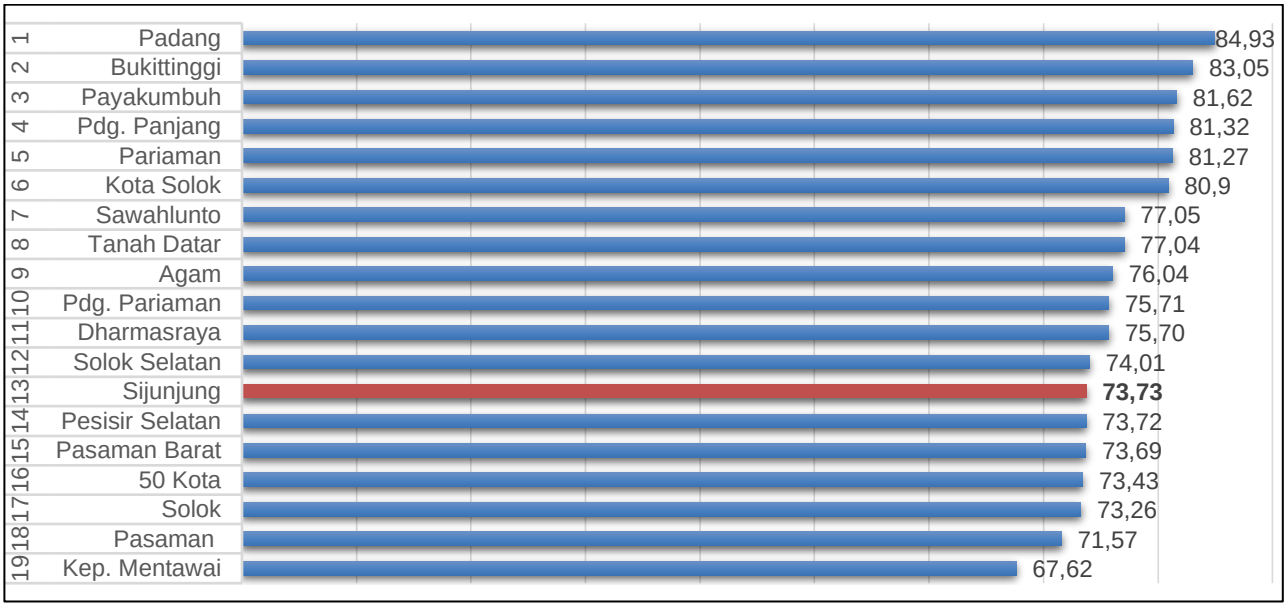
Grafik 3.17.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber:BPS, 2026

Di satu sisi, capaian IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2025 tetap berada di peringkat 13 diantara 19 kabupaten/kota sejak dua tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan program peningkatan kualitas sumber daya Kabupaten Sijunjung cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan angka IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

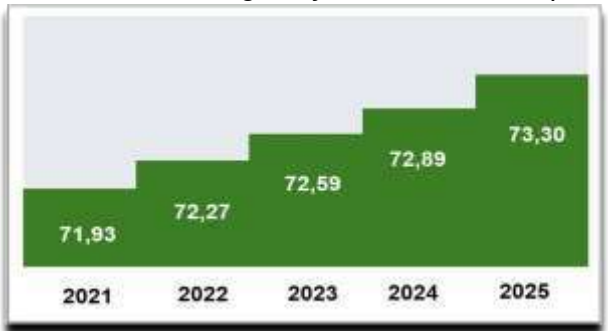
Grafik 3.18.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025



Sumber:Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan meningkatnya IPM di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, cenderung meningkatnya capaian usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir, sehingga berdampak terhadap tumbuhnya IPM dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan program di bidang kesehatan berjalan secara efektif tiap tahun kinerja berjalan, sehingga berimplikasi terhadap peningkatan IPM





Faktor kedua, implementasi program Cakupan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) dalam rangka menjamin seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan tanpa kendala finansial. Program UHC ini bersifat imperatif dari RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga Pemerintah Daerah secara eksplisit melaksanakan sesuai dengan target dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor ketiga, dukungan pelaksanaan program strategis nasional Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka memastikan kondisi kesehatan seluruh masyarakat agar tetap berproduktif dalam berkerja dan menempuh pendidikan. Program CKG ini mencakup layanan cek tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi dokter. Sehingga meningkatkan kualitas kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular





Faktor ketiga, program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang layak, sehingga dapat menekan angka putus sekolah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Faktor keempat, implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), Program ini merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengubah fungsi perpustakaan dari sekadar tempat membaca menjadi pusat belajar, pelatihan keterampilan, dan pengembangan wirausaha. Sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui literasi dan keterampilan, serta melawan kemiskinan dengan memberikan akses pengetahuan.





Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan nilai IPM, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya IPM antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Terbatas aksesbilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimum	• Terbatasnya aksesbilitas program priorita nasional di bidang kesehaan da pendidikan.

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Rendahnya motivasi masyarakat menempuh pendidikan karena lebih memprioritaskan faktor ekonomi.	• Belum tersedia program nasional untuk mendorong minat masyarakat menempuh pendidikan yang efektif
• Rendahnya kualitas infrastruktur sosial ekonomi masyarakat	• Terbatasnya jangkauan program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas infrastruktur

Mengatasi faktor penghambat peningkatan nilai IPM tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Mendukung melalui fasilitasi dan katalisasi pelaksanaan program strategis nasional bidang kesehatan dan pendidikan secara efektif dan kolaboratif
2. Mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sijunjung melalui penyediaan lahan sesuai standar nasional.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang layak dan akses pemenuhan kebutuhan dasar yang dibutuhkan.
4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Prevalensi Balita Stunting

Capaian kinerja dalam upaya peningkatan kualitas tumbuh berkembangnya Balita di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai belum optimal. Hal ini ditandai tercapainya kinerja angka prevalensi Balita stunting sebesar 70,92 persen dari target prevalensi Balita stunting sebesar 20,0 persen atau berada pada kategori “sedang”, dengan angka realisasi sebesar 28,2 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja prevalensi Balita stunting pada tahun 2025 belum berjalan sesuai dengan rencana karena capaiannya jauh dari target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja prevalensi Balita stunting pada tahun 2025 sebesar 39,0 persen dari target sebesar 11,0 persen. Kondisi ini mencerminkan pencapaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 tidak berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi isu strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung periode rencana kinerja berikutnya.

Gambaran pencapaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.12
Capaian Kinerja Prevalensi Balita Stunting Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

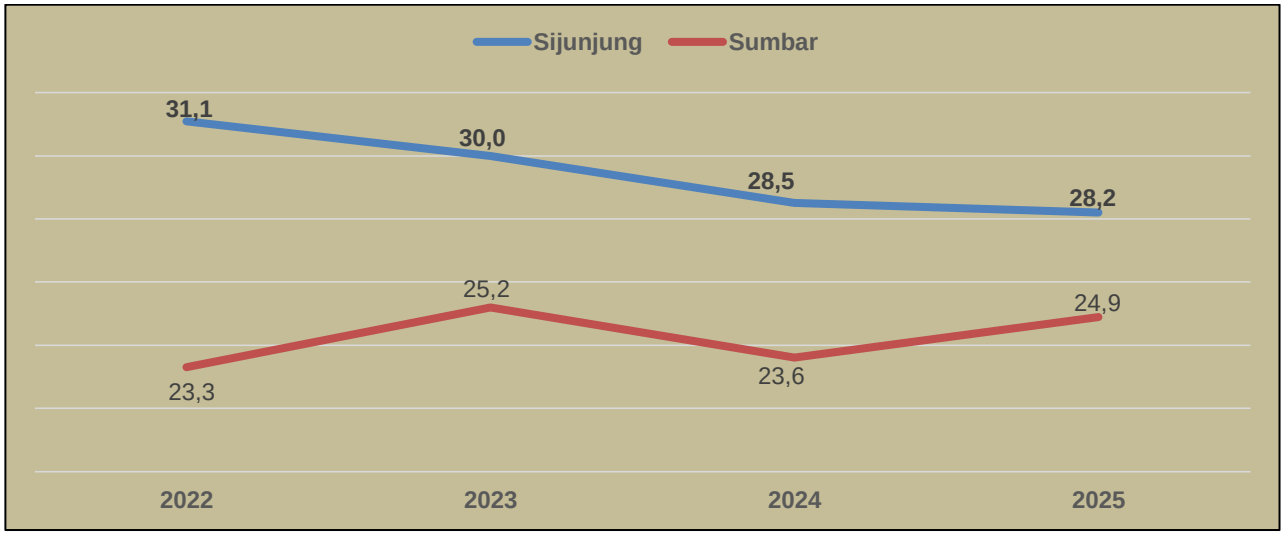


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Data SGI 2025

Sementara itu, capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,30 poin, dari 28,5 persen tahun 2024 turun menjadi 28,2 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan cukup berjalannya program penurunan angka prevalensi Balita stunting secara efektif, terintegratif dan kolaboratif sesuai rencana yang ditetapkan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung tetap berada di atas Provinsi Sumatera Barat sejak empat tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan implementasi program penurunan prevalensi Balita stunting belum berjalan secara efektif dibandingkan dengan daerah lain.

Perbandingan capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian prevalensi Balita stunting dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

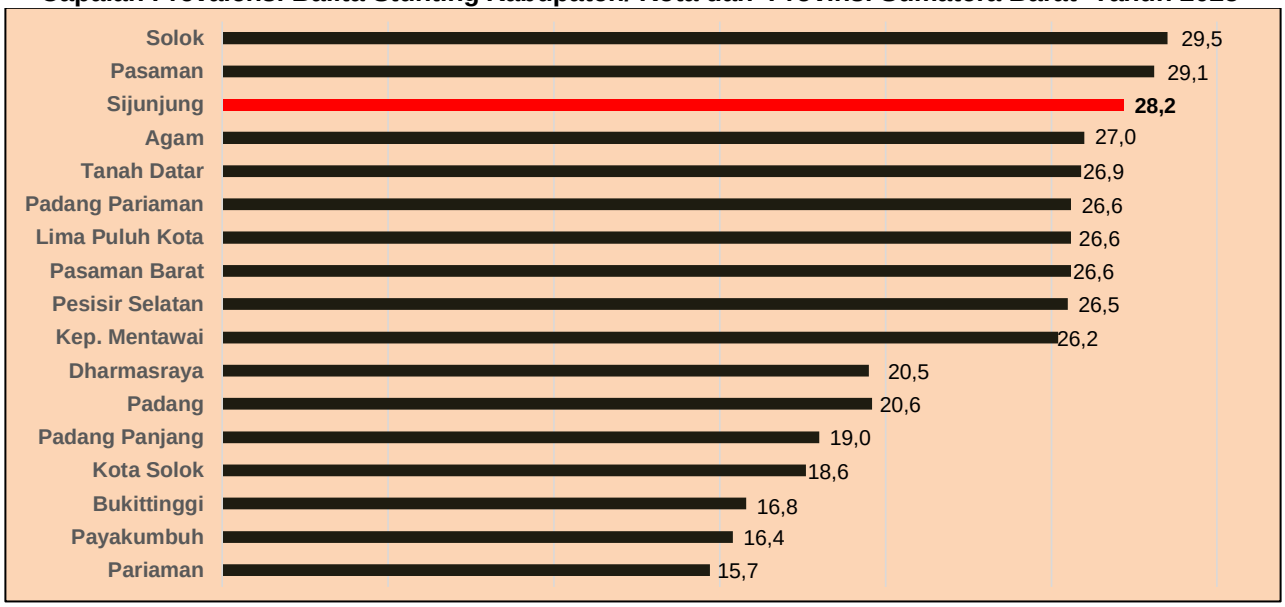
Grafik 3.19.
Capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2025



Sumber:Data SGI 2025

Di satu sisi, capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung tahun 2025 tetap berada di peringkat 3 tertinggi diantara 19 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan program penurunan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sijunjung belum berjalan secara optimal dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan angka prevalensi Balita stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.20.
Capaian Prevalensi Balita Stunting Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber; Data SGI 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan menurunkan angka prevalensi Balita stunting di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program strategis nasional melalui pembinaan rantai pasok pangan lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi di daerah dan mengawasi keamanan pangan serta memfasilitasi lembaga kemasyarakatan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, mendorong masyarakat untuk mendukung program MBG.

Faktor kedua, transformasi layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan memperluas aspek layanan terkait dengan bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Tramtibum dan sosial. Sehingga terintegrasi 6 bidang layanan dasar ditingkat nagari/desa untuk meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat dengan menurunnya perevalensi Balita stunting.





Faktor ketiga, optimalisasi pelaksanaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) dari Kementerian PU yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kawasan kumuh. Sehingga dapat mencegah stunting melalui pembangunan septik tank dan bilik kamar mandi secara swakelola

Faktor keempat, diseminasi pengukuran stunting oleh BPS dengan melibatkan Puskesmas dan Posyandu. Sehingga tersedianya data stunting yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar intervensi kebijakan program untuk penurunan perevalensi Balita stunting secara tepat sasaran.



Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan angka Prevalensi Balita Stunting, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi penurunan angka prevalensi Balita stunting antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum adanya kesamaan persepsi antar lintas sektor dalam intervensi program	• Rendahnya jumlah sampel pelak-sanaan Survei Gizi Indonesia
• Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia kader Posyandu dalam melakukan penimbangan dan pengukuran Tinggi Badan	• Penerapan Posyandu berbasis 6 SPM tidak diikuti dengan sember pembiayaan yang jelas

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum optimalnya pelaksanaan Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	

Mengatasi faktor penghambat peningkatan angka Prevalensi Balita Stunting tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Penguatan komitmen lintas sektor dalam penanganan stunting terintegrasi.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam penatalaksanaan gizi buruk dan konseling PMBA
3. Peningkatan kompetensi/ keterampilan kader dalam pemantauan pertumbuhan dan pelaksanaan posyandu melalui penyegaran kader.
4. Mendorong terciptanya Program Bapak Asuh Anak Stunting melalui kerjasama dengan Baznas, Lembaga/Instansi vertikal serta pihak ketiga lainnya.

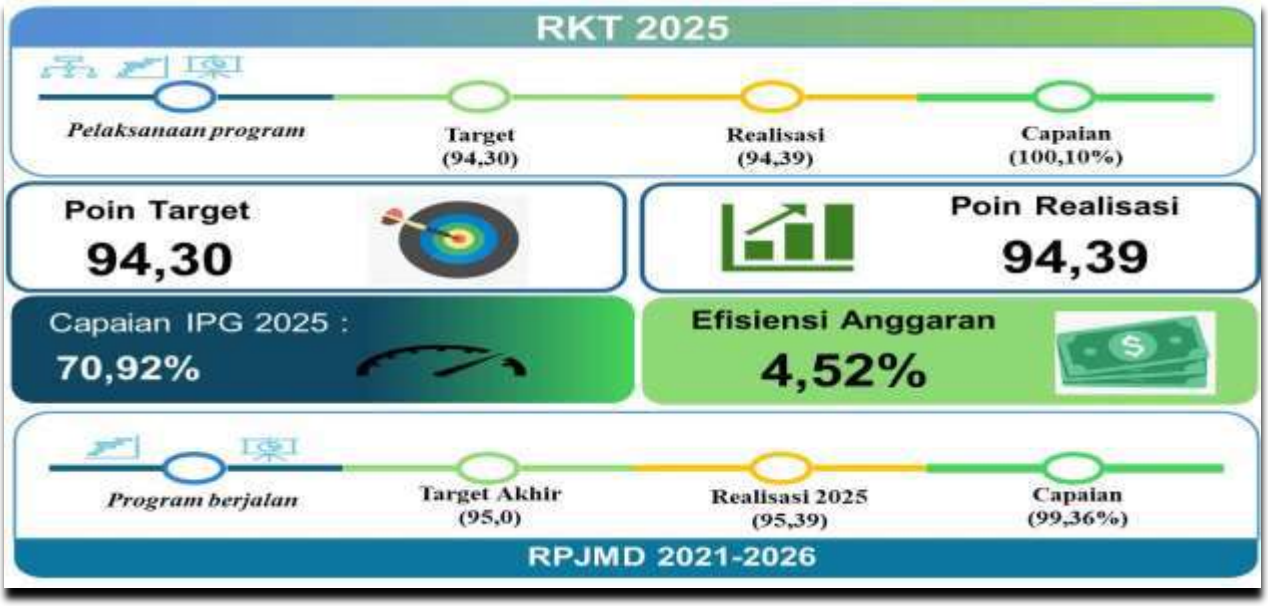
3. Indeks Pembangunan Gender

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai sebesar 100,10 persen dari target IPG sebesar 94,30 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan angka realisasi sebesar 94,39 poin. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas gender di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana karena tercapai sesuai dengan dari target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja IPG hingga tahun 2025 sebesar 99,36 persen dari target sebesar 95,0 persen. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IPG Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 tidak berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah.

Gambaran pencapaian IPG Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.13
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

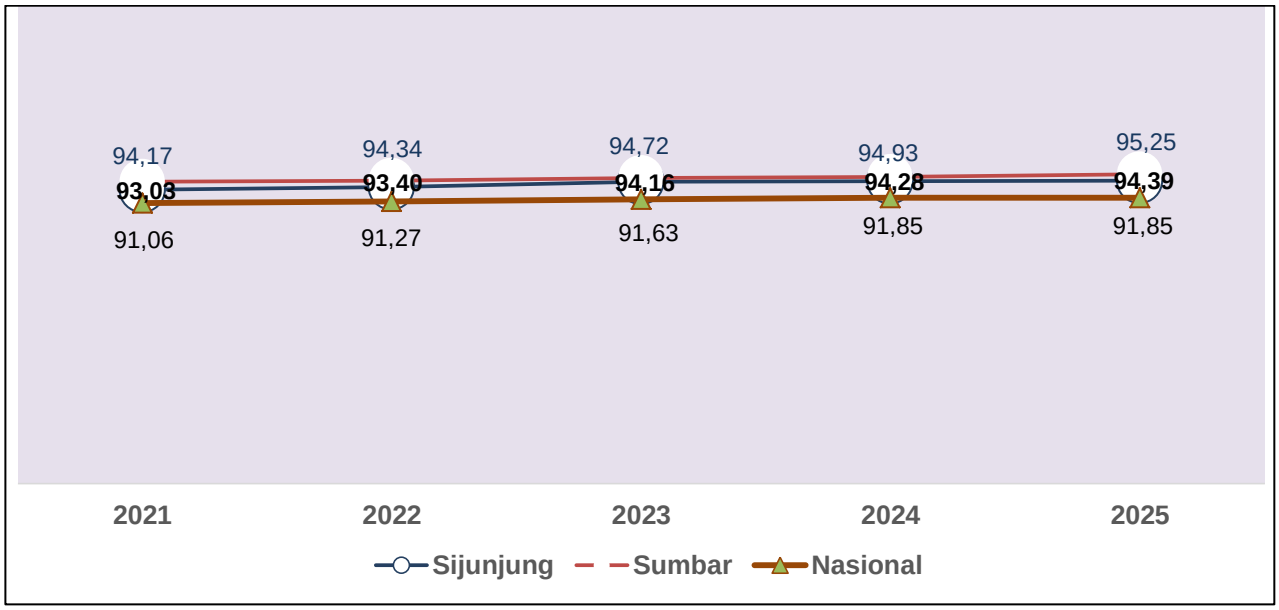


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan BPS Prov. Sumatera Barat

Sementara itu, capaian IPG Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin dari 94,28 poin tahun 2024 naik menjadi 94,39 poin tahun 2025. Hal ini menunjukkan cukup berjalannya program peningkatan kualitas gender secara efektif, terintegratif dan kolaboratif sesuai rencana yang ditetapkan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, IPG Kabupaten Sijunjung tetap berada di bawah Provinsi Sumatera Barat sejak lima tahun terakhir, namun di atas nasional. Kondisi ini mencerminkan implementasi program peningkatan kualitas gender belum berjalan secara efektif dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan capaian IPG Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian IPG dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

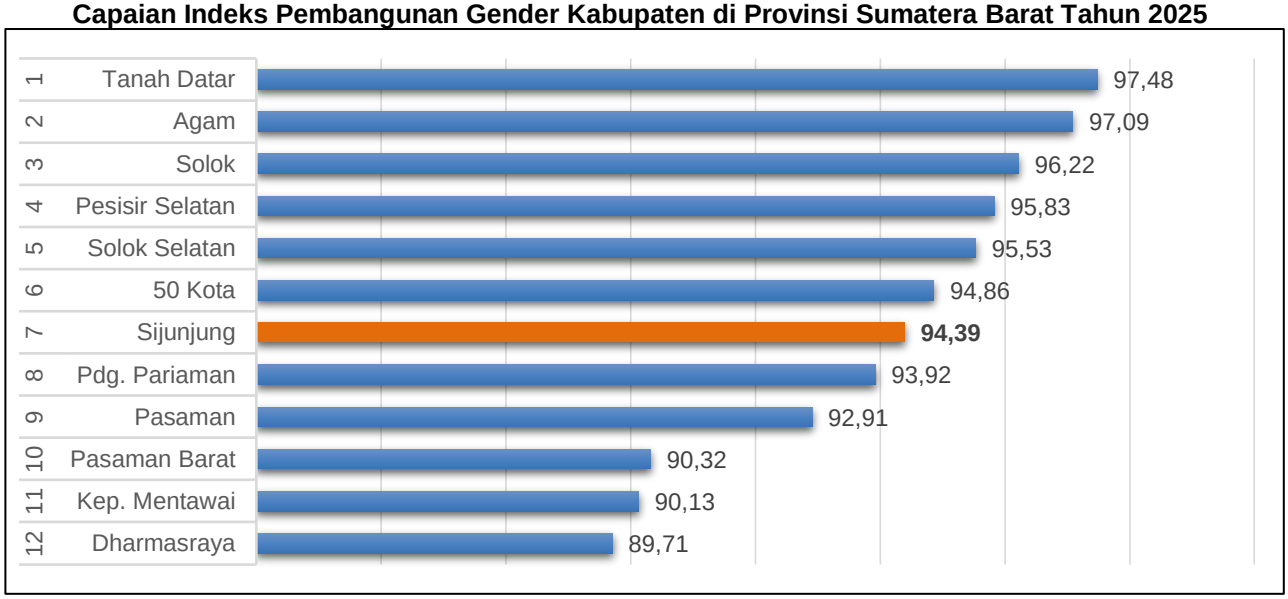
Grafik 3.21.
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber:BPS,2026

Di satu sisi, capaian IPG Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada di peringkat 7 diantara 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan program peningkatan kualitas gender di Kabupaten Sijunjung cukup baik dibandingkan dengan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan angka IPG Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.22.
Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber:BPS Prov. Sumatera Barat, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan menurunkan angka IPG di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Sehingga Pemerintah Daerah Kaupaten Sijunjung memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023.



Faktor kedua, penerapan program pemberdayaan ekonomi bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) agar berperan aktif dalam kemandirian ekonomi perempuan melalui kegiatan pertanian. Program ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan mayarakat melalui pendekatan kesetaraan gender dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan IPG, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya IPG antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum teradvokasi dan tersosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara optimal	• Aspek budaya masyarakat melihat tidak perlunya perempuan dalam memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan.
• Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam memahami program pembangunan gender secara terintegratif	• Aspek budaya serta pola pikir masyarakat dalam melibatkan perem-puan dalam mengambil kebijakan

Mengatasi faktor penghambat peningkatan angka IPG tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Implementasi percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara efektif dan terintegratif
2. Memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan terkait aspek pemenuhan kebutahan dasar
3. Memberdayakan organisasi perempuan (PKK, Gabungan Organisasi Wanita, Dharmawanita, Bundo Kanduang, Kelompok Wanita Tani, dll) melalui peningkatan peran serta perempuan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik.
4. Mendorong pihak swasta/lembaga non pemerintah serta Lembaga layanan pemberdayaan perempuan untuk berpartipasi peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti budaya politik perempuan.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.951.852.740	69.534.434.020
2.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	456.330.600	226.660.720
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	327.385.500	624.621.682
4.	Program Pengelolaan Pendidikan	88.237.120.164	69.658.141.965
5.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	59.997.450	15.713.105
6.	Program Pembinaan Perpustakaan	670.043.847	655.758.483
7.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	26.449.400	18.060.075
8.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	358.968.866	51.514.860
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.543.930.216	2.077.222.987
10.	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000	177.503.008
11.	Program Pengendalian Penduduk	268.029.250	251.117.950
12.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.639.427.930	6.689.110.779
13.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.594.828.550	1.263.167.846
14.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	59.287.238	52.559.400
15.	Program Perlindungan Perempuan	105.204.500	118.614.800
16.	Program Pemuhan Hak Anak (PHA)	37.228.900	5.687.800
17.	Program Perlindungan Khusus Anak	5.515.011.050	5.261.584.072

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 99,35 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 7 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Infrastruktur (poin)	64,0	60,18	94,02	Sangat Tinggi
2. Indeks Infrastruktur Jalan (poin)	43,10	45,11	104,65	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 7			**99,35**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 7 dijelaskan berikut ini.

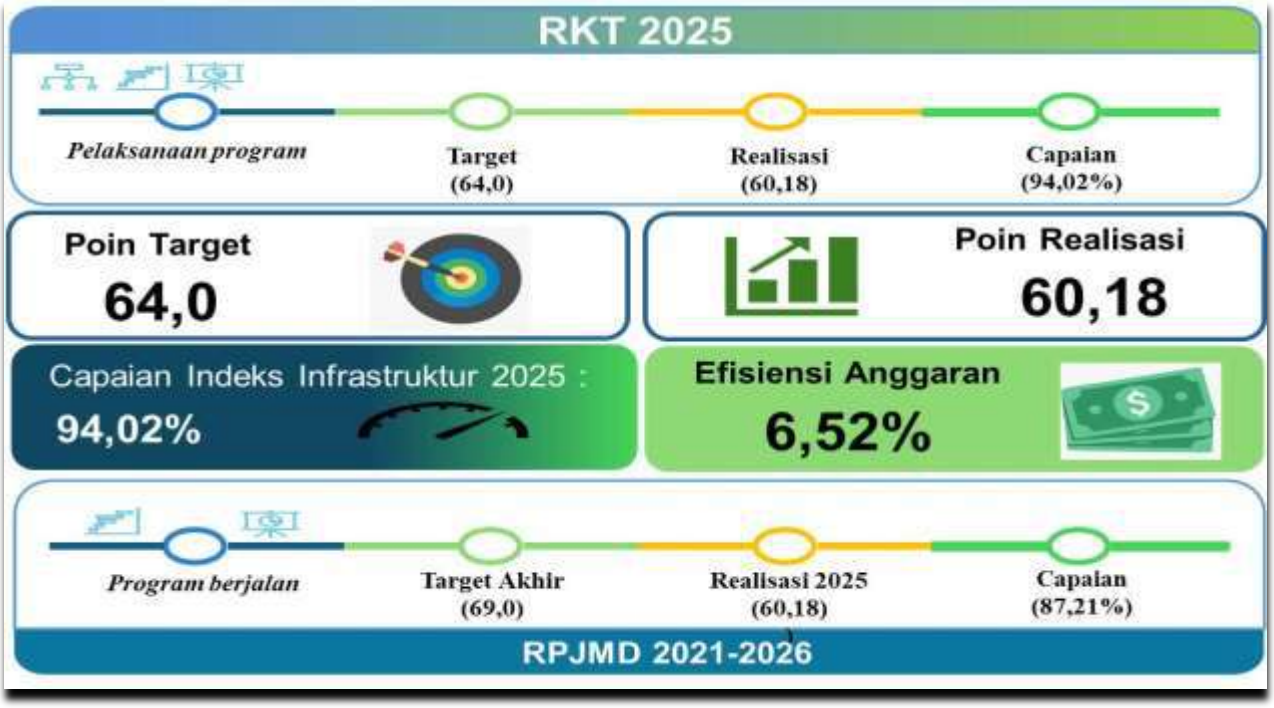
1. Indeks Infrastruktur

Capaian kinerja infrastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing daerah pada tahun 2025 belum tercapai secara optimal. Hal ini ditandai kinerja indeks Infrastruktur tercapai sebesar 94,02 persen dari target indeks Infrastruktur sebesar 64,0 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 60,18 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja indeks Infrastruktur pada tahun 2025 belum berjalan sesuai dengan rencana karena tidak tercapai secara maksimal.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja indeks Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 87,21 persen dari target indeks Infrastruktur sebesar 69,0 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian indeks Infrastruktur Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 belum optimal berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi isu strategis daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam upaya meningkatkan daya saing daerah periode rencana kinerja berikutnya. .

Gambaran pencapaian indeks Infrastruktur Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.14
Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

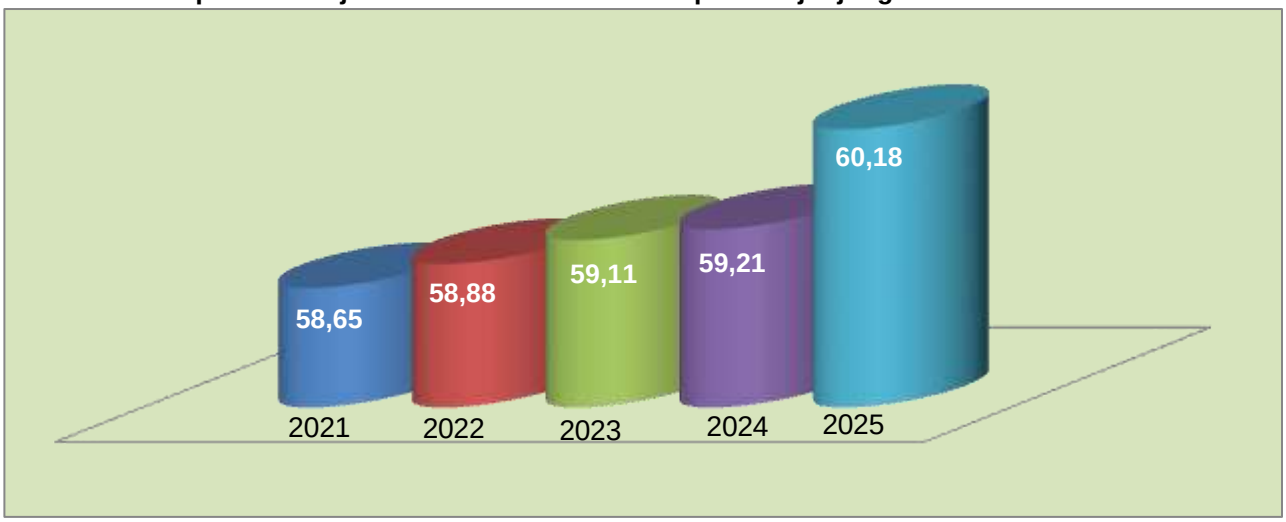


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sementara itu, capaian indeks infrastruktur Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin, dari 59,21 poin tahun 2024 naik menjadi 60,18 poin tahun 2025. Hal ini menunjukkan cukup berjalannya program peningkatan kualitas infrastrutur secara efektif, terintegratif dan kolaboratif sesuai rencana yang ditetapkan. Di satu sisi indikator kinerja indeks infrastruktur ini bersifat mandiri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, sehingga tidak dapat membandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional serta daerah lainnya.

Perbandingan capaian indeks infrastruktur Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian indeks Infrastruktur tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.23.
Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025

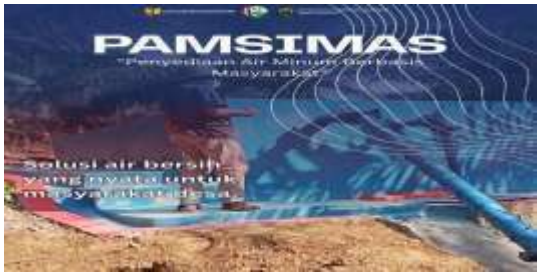


Sumber:Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja indeks infrastruktur di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, implementasi program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) salah satu program prioritas Kementerian PUPR berjalan secara efektif. Sehingga dapat memperkuat infrastruktur perdesaan untuk meningkatkan konektivitas dan menggerakkan perekonomian lokal serta memberi dampak terhadap kinerja infrastruktur daerah



Faktor kedua, sinergitas program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang bertujuan meningkatkan akses layanan air minum yang layak, aman, serta berkelanjutan bagi masyarakat miskin di perdesaan dan peri-urban, Sehingga mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sarana secara mandiri.

Faktor ketiga, sinergi program pembangunan air bersih dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan perusahaan melalui kerjasama dan kolaborasi secara efektif. Sehingga mem-beri dampak terhadap peningkatan kinerja infrastruktur dasar dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masya-rakat.



Faktor ketiga, kolaborasi pembangunan jaringan telekomunikasi dengan pihak penyedia (*vendor*) secara efektif dan berkesinambungan untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah. Sehingga berdampak terhadap berkurangnya daerah *blank spoot* di Kabupaten Sijunjung agar terjangkaunya jaringan komunikasi secara efektif.





Faktor keempat, program swadaya petani terhadap pemeliharaan jaringan irigasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada setiap Daerah Irigasi (DI). Sehingga terjaminnya infrastruktur dasar di Kabupaten Sijunjung yang layak dalam upaya terjaganya ketahanan pangan. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kinerja indeks infrastruktur, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya kinerja indeks infrastruktur antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan pendanaan jalan, jembatan, cakupan layanan irigasi, jaringan transportasi dan komunikasi	Tingginya curah hujan yang menyebabkan rusaknya jalan, jembatan, cakupan layanan irigasi, jaringan transportasi dan komunikasi.
• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan, sehingga berdampak menurunya kinerja infrastruktur	

Mengatasi faktor penghambat peningkatan kinerja infrastruktur tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Mendorong terwujudnya kawasan Geopark Ranah Minang Silokek menjadi kawasan warisan geologi global melalui penetapan UNESCO Global Geopark pada tahun 2026, sehingga dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
2. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kolaborasi dengan multi pihak dalam upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah dan dasar secara efektif dan tepat sasaran.
3. Pembinaan dan pemberdayaan kepada P3A dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah nagari/desa untuk revitalisasi P3A yang kurang aktif.

2. Indeks Infrastruktur Jalan

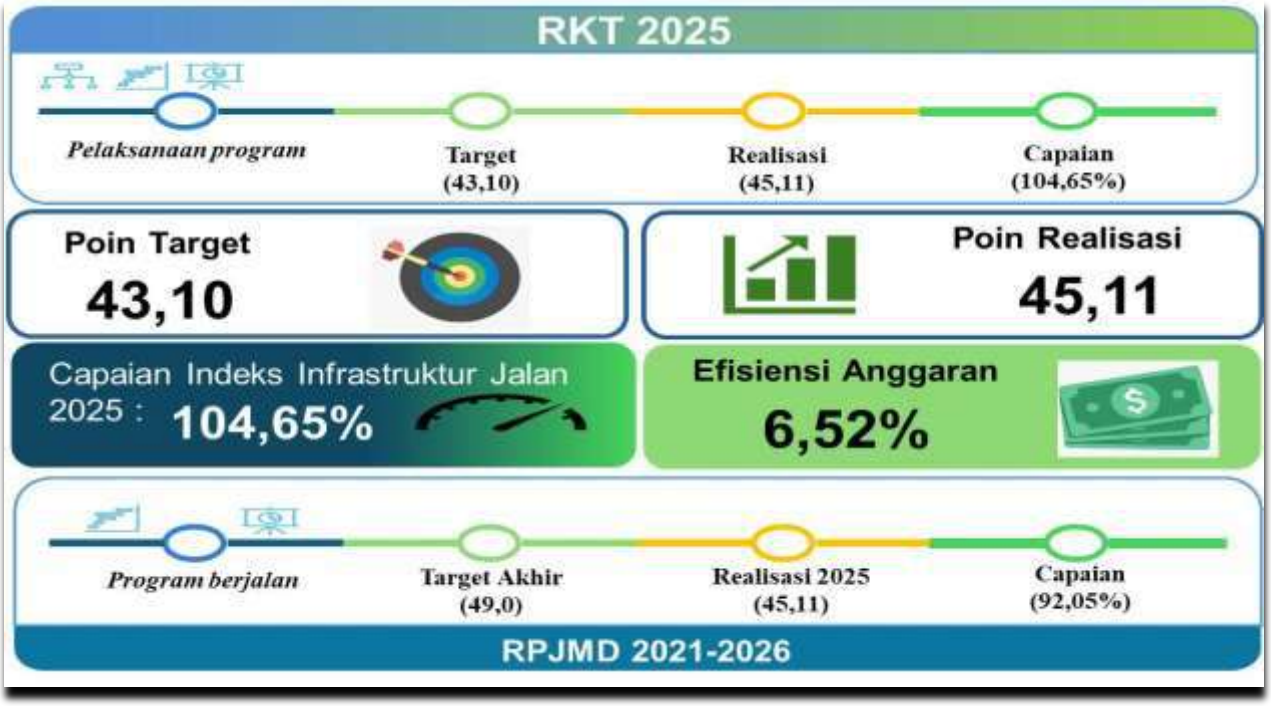
Capaian kinerja infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah pada tahun 2025 tercapai secara optimal. Hal ini ditandai kinerja indeks Infrastruktur jalan tercapai sebesar 104,65 persen dari target indeks Infrastruktur jalan sebesar 43,10 poin atau berada pada

kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 45,11 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja indeks Infrastruktur jalan pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana karena melebihi dari taget.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja indeks Infrastruktur jalan pada tahun 2025 sebesar 92,05 persen dari target indeks Infrastruktur jalan sebesar 49,0 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian indeks Infrastruktur jalan Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam upaya meningkatkan daya saing daerah periode rencana kinerja berikutnya. .

Gambaran pencapaian indeks Infrastruktur Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.15
Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Jalan Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

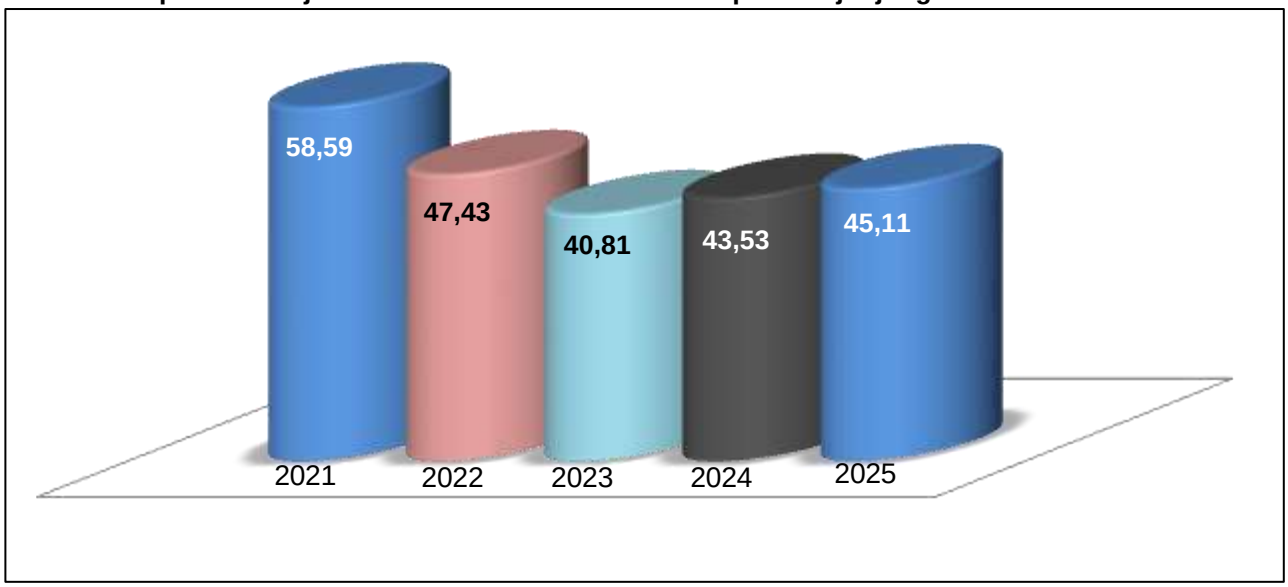


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sementara itu, capaian indeks infrastruktur jalan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,58 poin, dari 43,53 poin tahun 2024 naik menjadi 45,11 poin tahun 2025. Hal ini menunjukkan cukup berjalannya program peningkatan kualitas infrastrutur jalan secara efektif, terintegratif dan kolaboratif sesuai rencana yang ditetapkan. Di satu sisi indikator kinerja indeks infrastruktur jalan ini bersifat mandiri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, sehingga tidak dapat membandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional serta daerah lainnya.

Perbandingan capaian indeks infrastruktur jalan Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian indeks Infrastruktur jalan tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.24.
Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Jalan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025



Sumber: Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja indeks infrastruktur jalan di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, pemanfaatan insentif fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dalam pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan aksebilitas masyarakat untuk membawa hasil pertanian secara efisien. Sehingga berdampak terhadap peningkatan kinerja infrastruktur jalan secara berkelanjutan. Selain itu, mendorong masyarakat berpartisipasi masyarakat dan dunia usaha pemeliharaan jalan.





Faktor kedua, menetapkan program pembangunan infrastruktur jalan sebagai skala prioritas pembangunan, terutama akses-bilitas masyarakat dalam beraktivitas sosial ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jembatan gantung. Sehingga terjaminya masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar, terutama bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara merata dan inklusif.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kinerja indeks infrastruktur jalan, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya kinerja indeks infrastruktur jalan antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan pendanaan jalan dan jembatan serta sarana prasarana keselamatan jalan	• Tingginya curah hujan yang menye-babkan rusaknya jalan dan jembatan, sehingga
• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan	• Beban kendaraan tidak sesuai dengan Kelas Jalan

Mengatasi faktor penghambat peningkatan kinerja infrastruktur jalan tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kolaborasi dengan multi pihak dalam upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan secara efektif dan tepat sasaran.
2. Mendorong masyarakat dan dunia untuk berkolaborasi terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan secara efektif.
3. Menjadikan pembangunan infrastruktur jalan secara tepat sasaran, agar dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	45.846.565.749	21.043.999.077
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.401.689.750	799.496.985
3.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	10.825.122.691	10.556.139.293
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.895.681.700	112.768.772
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	525.004.050	910.212.963
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.020.957.475	19.194.056
7.	Program Kawasan Permukiman	1.147.861.574	24.665.802
8.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.434.002.350	7.080.606.922
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	458.602.100	111.146.483
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	458.602.100	37.400.470

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 100,22. persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 8 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 8 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	77,23	77,40	100,22	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 8			**100,22**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung, 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 8 dijelaskan berikut ini.

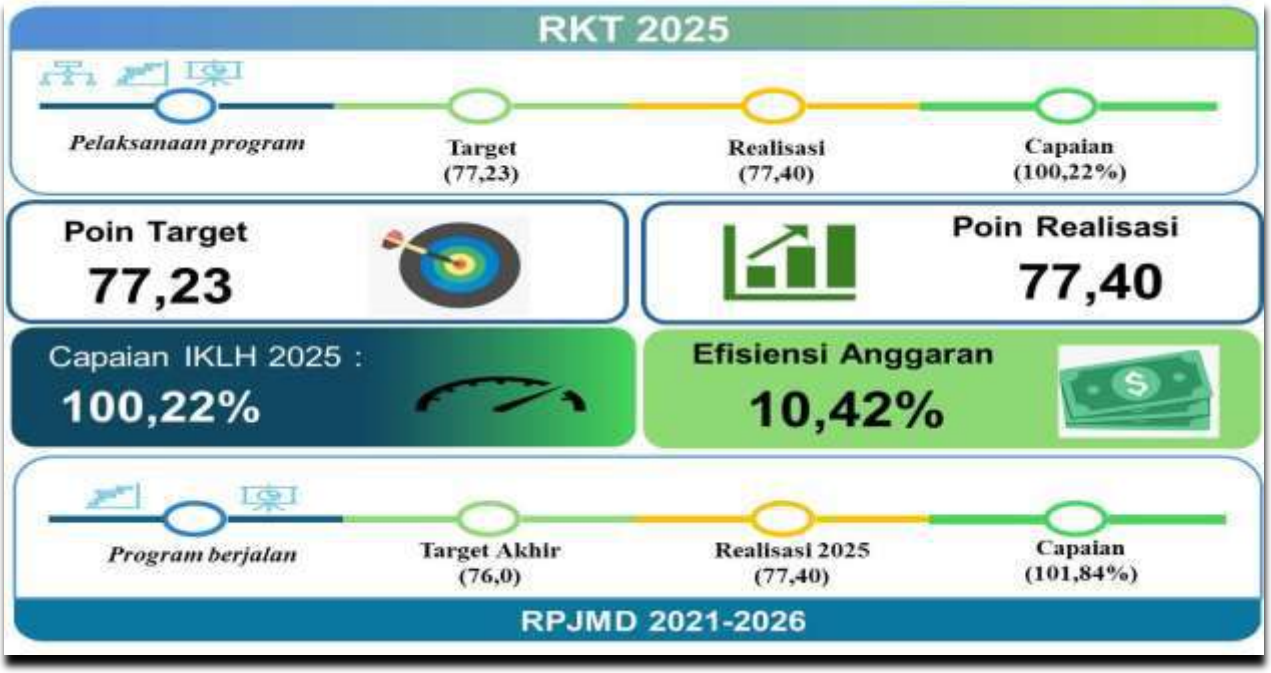
1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai secara optimal. Hal ini ditandai capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 100,22 persen dari target IKLH sebesar 77,23 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan realisasi sebesar 77,40 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja IKLH pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana karena melebihi dari taget.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja IKLH pada tahun 2025 sebesar 101,84 persen dari target IKLH sebesar 76,0 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IKLH Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dalam upaya menjaga kualitas ekosistem lingkungan hidup yang lestasi dan berkelajutan.

Gambaran pencapaian IKLH Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.16
Capaian Kinerja Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan RPJMD 2021-2026

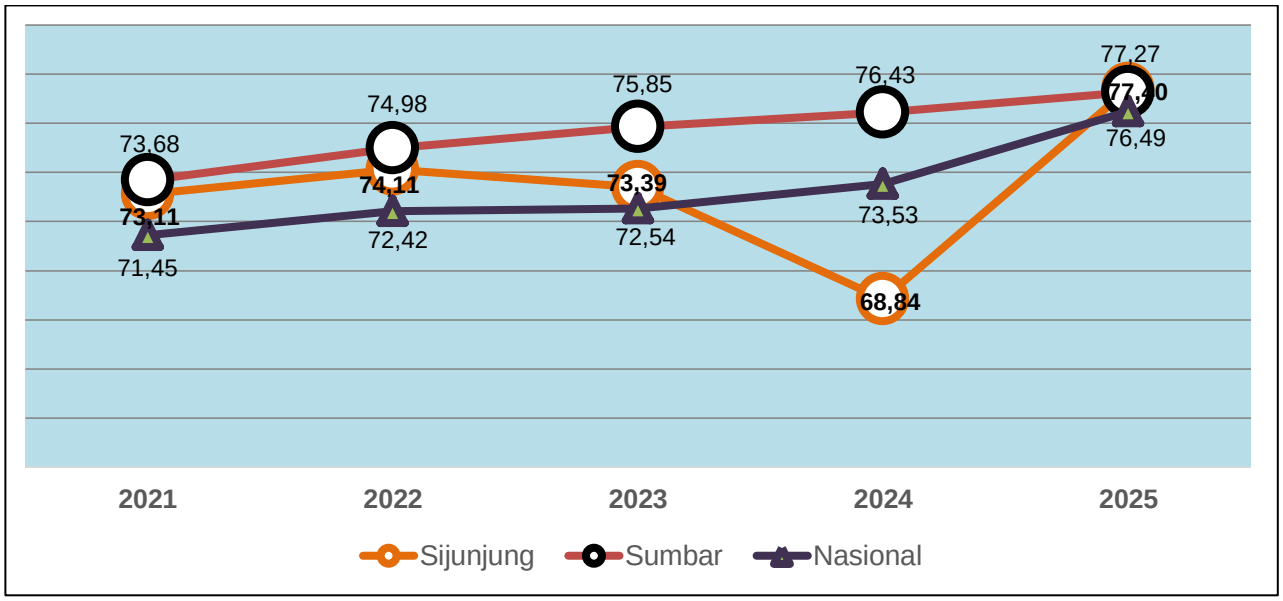


Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung,2026

Sementara itu, capaian IKLH Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 8,56 poin, dari 68,84 poin tahun 2024 naik menjadi 77,40 poin tahun 2025. Hal ini menunjukkan optimalnya pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan secara efektif, terintegratif dan kolaboratif sesuai rencana yang ditetapkan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional pada tahun 2025, IKLH Kabupaten Sijunjung tetap berada di bawah Provinsi Sumatera Barat sejak lima tahun terakhir dan berada diatas nasional, kecuali pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan implementasi program peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan belum berjalan secara efektif dibandingkan dengan daerah lain.

Perbandingan capaian IKLH Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025 serta perkembangan capaian IKLH dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2021-2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.25.
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung, 2026

Mengingat keterbatasan data yang tersedia perbandingan capaian IKLH Kabupaten Sijunjung dengan daerah lain tidak dapat disajikan pada laporan kinerja ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja IKLH di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;

Faktor pertama, terjaganya ekosistem lingkungan hidup, terutama kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Seiring ditetapkannya Kabupaten Sijunjung sebagai kawasan geopark nasional. Sehingga terjaganya konservasi hayati dalam keseimbangan ekosistem, mencegah kepunahan, dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk masa depan.





Faktor kedua, terbangun program kolaborasi pengelolaan sampah dari sumber antar perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Sehingga terjaganya lingkungan hidup yang bersih dari hasil limbah masyarakat dalam upaya menjaga kualitas udara di lingkungan pemeritahan dan pemukiman masyarakat.

Faktor ketiga, implementasi program persampahan berfokus pada penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dan Zero Waste untuk menciptakan sekolah ramah lingkungan. Sehingga diberikan apresiasi dari pemerintah kepada sekolah yang berhasil menerapkan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) secara menyeluruh, berkelanjutan, dan partisipatif melalui Penghargaan Adiwiyata setiap tahun.



Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kinerja IKLH, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi meningkatnya kinerja IKLH antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Belum tersedianya sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah karena keterbatasan fiskal pembangunan	• Ketersedaan program pembangunan IPAL dan TPA sampah dari pemerintah sangat terbatas.
• Keterbasan sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola dan menjaga ekosistem lingkungan hidup, terutama pengelolaan kualitas air dan persampahan	• Kurangnya kualitas air berasal dari hulu atau daerah tetangga
• Belum optimalnya penangganan Daerah Aliran Sungai (DAS) seiring adanya aktivitas penambangan oleh masyarakat	• Terdapatnya sumber emisi udara dari industri

Mengatasi faktor penghambat peningkatan kinerja kualitas lingkungan hidup tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan daerah tetangga terkait pengendalian pencemaran air sungai
3. Meningkatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat dalam program pengendalian pencemaran air.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait pemenuhan data dukung dan tampung lingkungan hidup serta pengendalian lahan kritis.

5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui penyebarluasan informasi dan publikasi.
6. Membangun kerjasama dan kolaborasi secara efektif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pennyediaan IPAL dan TPA sampah yang memadai.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Awal	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	227.943.250	215.775.827
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	102.301.816	94.866.606
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	72.595.650	70.942.413
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	22.065.560	17.316.286
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	55.508.728	23.351.470
6.	Program Pengelolaan Persampahan	3.475.645.335	3.330.991.204
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	61.398.500	61.201.650
8.	Program Penanggulangan Bencana	774.776.247	478.600.766

Sumber; BKAD Kab. Sijunjung, 2026

3.2 Capaian Perubahan Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Capaian perubahan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 disajikan berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang dikuantifikasi melalui IKU berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030 yang diuraikan berikut ini

3.2.1 *Overview* Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran srategis yang disertai 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran sebagai penjabaran dari 5 (lima) misi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.21
Misi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran serta Jumlah Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025

Misi RPJMD 2025-2029	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Capaian Indikator Sasaran sesuai Kategori
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	2	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : 1 Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -

Misi RPJMD 2025-2029	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Capaian Indikator Sasaran sesuai Kategori
1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif	2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3	Sangat Tinggi : 2 Tinggi : - Sedang : 1 Rendah : - Sangat Rendah : -
	3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif	4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	7. Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital	8. Meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	2	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : 1 Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	1	Sangat Tinggi : - Tinggi : 1 Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan	10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -

Misi RPJMD 2025-2029	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Capaian Indikator Sasaran sesuai Kategori
4. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan	12. Meningkatnya kualitas infastruktur wilayah	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	13. Meningkatnya kualitas la-yanan infrastruktur dasar	1	Sangat Tinggi : 1 Tinggi : - Sedang : - Rendah : - Sangat Rendah : -
	Jumlah	**17**	

Sumber: Perda No.2/2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Berlandaskan capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 melalui 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran, sehingga capaian kinerja kategori “sangat tinggi” tercapai proporsi 82,35 persen dan diikuti kategori “tinggi’ sebesar 11,76 persen, hal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Rekapitulasi Capaian Perubahan Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Tahun 2025

`No.	Kategori	Jumlah Capaian Indikator Sasaran	Persentase
1.	Sangat Tinggi	14	82,35
2.	Tinggi	2	11,76
3.	Sedang	1	5,88
4.	Rendah	0	0
5.	Sangat Rendah	0	0

Sedangkan capaian rata-rata masing-masing sasaran strategis Pemerintah Daerah pada tahun 2025, dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 3.23
Capaian Rata-Rata Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian (%)
1. Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	2	92,31
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3	s93,40
3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	1	101,31
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1	100,86
5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	1	96,75
6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	1	108,25
7. Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	1	117,36

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian (%)
8. Meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	2	91,73
9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	1	90,55
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1	111,85
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	1	98,38
12. Meningkatnya kualitas infastruktur wilayah	1	97,16
13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	1	101,60

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis capaian perubahan kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat diuraikan berikut ini.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 91,81 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 1 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 1 Perubahan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,10	3,26	79,51	Tinggi
2. PDRB per-kapita (Rp juta)	51,60	54,11	104,11	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 1			**91,81**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 1 dijelaskan berikut ini.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan daya saing daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 melalui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2025 menunjukkan angka yang belum optimal. Hal ini ditandai capaian kinerja LPE tahun 2025 sebesar 79,51 persen dari target perubahan LPE sebesar 4,10 persen atau berada pada kategori “tinggi” dengan realisasi sebesar 3,26 persen. Kondisi ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 mengalami tantangan yang sangat besar menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta inklusif pada tahun 2029.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 45,85 persen dari target akhir sebesar 7,11 persen. Hal ini mencerminkan kinerja laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 belum berjalan secara *on the track*. Sehingga memberi dampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan dalam jangka waktu menengah.

Gambaran pencapaian perubahan kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.17
Capaian Perubahan Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sedangkan perbandingan LPE Kabupaten Sijunjung dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis ketiga RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. PDRB per-Kapita (ADHB)

Capaian perubahan kinerja PDRB per-kapita (ADHB) Kabupaten Sijunjung tahun 2025 sebesar 104,86 persen dari target perubahan PDRB per-kapita sebesar Rp 51,60 juta atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar Rp 54,11 juta. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja PDRB per-kapita pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja PDRB per-kapita pada tahun 2025 sebesar 64,50 persen dari target akhir sebesar Rp 83,89,43 juta. Kondisi ini menunjukkan upaya peningkatan pendapatan masyarakat berjalan sesuai rencana pembangunan jangka menengah.

Gambaran pencapaian kinerja PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.18
Capaian Perubahan Kinerja PDRB per-Kapita Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sedangkan perbandingan PDRB per-kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis ketiga RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.116.498.334	913.387.417
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.286.994.787	3.215.557.373
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	310.868.080	281.841.905
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	49.341.450	30.519.473
5.	Program Penyuluhan Pertanian	1.001.960.000	886.137.185
6.	Program pengelolaan perikanan tangkap	35.266.388	32.108.900
7.	Program pengelolaan perikanan budi daya	302.107.414	294.210.740
8.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4.067.920	.2728.450
9.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.633.699	66.765.150

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
10.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	233.315.350	227.574.641
11.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	12.808.500	12.409.521
12.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	322.851.463	255.326.200
13	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27.437.782	25.675.907
14.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	17.597.650	16.304.354
15.	Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	86.181.000	85.018.855
16.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	706.315.700	654.012.771
17.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	47.000.750	356.66.621
18.	Program Promosi Penanaman Modal	50.203.450	3.199.694
19.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	57.618.400	50.483.580
20.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.613.550	2.400.412
21.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	998.161.354	971.218.747
22.	Program Pemasaran Pariwisata	161.539.583	158.965.553
23.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	706.315.700	654.012.771

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 93,40 persen atau berada pada predikat “tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 2 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 2 Perubahan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Angka Kemiskinan (%)	5,70	5,15	111,55	Sangat Tinggi
2. Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,40	0,55*)	72,72	Sedang
4. Gini Rasio (nilai)	0,236	0,246	95,93	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 2			**93,40**	**Sangat Tinggi**

*) *Data tahun 2024 karena data tahun 2025 belum diliiris oleh Badan Taskin dan BPS*
Sumber:TNP2K 2025, Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 2 dijelaskan berikut ini.

1. Angka Kemiskinan

Capaian kinerja angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 sebesar 111,55 persen dari target perubahan angka kemiskinan sebesar 5,70 persen atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan angka realisasi sebesar 5,15 persen. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja angka kemiskinan pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara optimal karena melebihi dari target. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029

kinerja angka kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 79,65 persen dari target akhir sebesar 4,07 persen. Kondisi ini mencerminkan program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi landasan yang kuat dalam mejalankan program pengentasan kemiskinan hingga tahun 2029 dan tahun transisi 2030.

Gambaran pencapaian angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.19
Capaian Perubahan Kinerja Angka Kemskinan Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sedangkan perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis keempat RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung melalui program penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 data capaian belum dapat disajikan karena data tersebut, belum dirilis oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berkerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Namun jika menggunakan realisasi tahun 2024 capaian tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 72,72 persen dari target sebesar 0,40 persen atau berada pada kategori “sedang”, dengan angka realisasi sebesar 0,55 persen.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 sebesar 55,0 persen dari target akhir sebesar 0 persen. Kondisi ini mencerminkan program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah yang ditarget pada tahun 2027 terhapus.

Sehingga menjadi landasan yang kuat dalam mejalankan program pengentasan kemiskinan hingga tahun 2029 dan tahun transisi 2030.

Gambaran pencapaian angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.20
Capaian Tingkat Kemskinan Ekstrem Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber:TNP2K 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sedangkan perbandingan tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional tidak dapat disajikan karena keterbatasan data. Sementara itu, penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis keempat RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Gini Rasio

Capaian perubahan kinerja gini rasio Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 sebesar 95,93 persen dari target gini rasio sebesar 0,236 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan poin realisasi sebesar 0,246. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja gini rasio pada tahun 2025 cukup berjalan sesuai dengan rencana, walaupun capaiannya belum optimal. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 capaian kinerja gini rasio pada tahun 2025 sebesar 93,09 persen dari target gini rasio sebesar 0,229. Kondisi ini menunjukkan program penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sijunjung berjalan sesuai dengan rencana jangka menengah.

Gambaran pencapaian kinerja gini rasio Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.21
Capaian Perubahan Kinerja Gini Rasio Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sedangkan perbandingan gini rasio Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis ketiga RPJMD Tahun 2021-2026 yang sebelumnya telah dijelaskan.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	232.254.825	202.405.976
2.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	172.413.250	163.748.436
3.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	125.497.300	118.699.257
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.986.450	1.839.250
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	151.491.050	122.426.375

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran memperluas kesempatan kerja dengan 1 (satu) indikator kinerja tercapai sebesar 101,31 persen atau berada pada kategori predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 3 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65	4,59	101,31	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 3			**101,31**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 dijelaskan berikut ini.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian perubahan kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 101,31 persen dari target TPT sebesar 4,65 persen atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan angka realisasi sebesar 4,59 persen. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja TPT pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara optimal karena melebihi dari target perubahan.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja TPT pada tahun 2025 sebesar 86,49 persen dari target sebesar 3,97 persen. Kondisi ini mencerminkan penurunan TPT di Kabupaten Sijunjung *on th track* sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tareget akhir RPJMD. Gambaran pencapaian TPT Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.22
Capaian Perubahan Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sedangkan perbandingan TPT Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis kelima RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	57.046.058	55.472.975
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	17.823.850	16.869.438
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	16.606.050	145.73.703
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	140.134.750	54.637.586
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	26.886.385	26.630.688
6.	Program Pengembangan UMKM	17.558.100	13.949.095

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 100,86 persen atau berada pada predikat “tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 4 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.30
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Pembangunan Manusia (poin)	73,10	73,73	100,86	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 4			**100,86**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian perubahan kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 tercapai sebesar 100,86 persen dari target IPM sebesar 73,10 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 73,73 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja IPM pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana karena melebihi dari target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja IPM pada tahun 2025 sebesar 92,29 persen dari target IPM sebesar 75,78 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IPM Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi pijakan yang kuat dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2029 .

Gambaran pencapaian IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.23
Capaian Perubahan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sementara itu, perbandingan IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis keenam RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.31
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.951.852.740	69.534.434.020
2.	Program Pemingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	458.968.500	384.219.564
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	364.643.040	226.660.720
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	676.991.700	624.621.682
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	70.582.334.680	69.658.141.965
6.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.245.123	15.713.105
7.	Program Pembinaan Perpustakaan	696.578.898	655.758.483
8.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	19.798.000	18.060.075
9.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	62.033.658	51.514.860

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.152.606.605	2.077.222.987
11.	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	200.000.000	177.503.008
12.	Program Pemberdayaan Sosial	104.162.500	93.183.650
13.	Program Rehabilitasi Sosial	41.466.650	21.932.975
14.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.873.850	8.205.250

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya produktivitas masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 96,75 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 5 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	61,20	59,50	96,75	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 5			**96,75**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 5 dijelaskan berikut ini.

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi merupakan salah satu tolak ukur terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pencapaian Produktivitas tenaga kerja pada tahun 2025 cukup optimal, hal ini ditandai capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (TPTK) tercapai sebesar 96,75 persen dari target TPTK sebesar 61,20 persen atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 59,50 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja TPTK pada tahun 2025 belum berjalan secara optimal sesuai dengan rencana karena tidak tercapai dari target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja TPTK pada tahun 2025 sebesar 86,23 persen dari target sebesar 69,0 persen. Kondisi ini mencerminkan pencapaian TPTK Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi pijakan yang kuat dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2029 .

Gambaran pencapaian IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.24
Capaian Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029

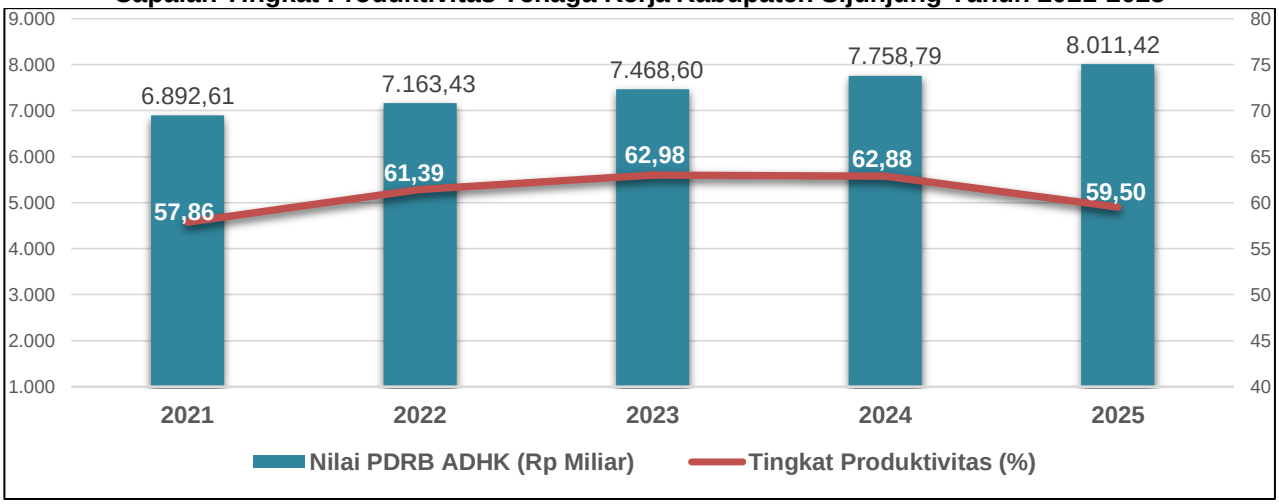


Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Sijunjung Dalam Angka 2026

Sementara itu, capaian TPTK Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 3,78 poin, dari 62,88 persen tahun 2024 turun menjadi 59,10 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah lapangan usaha PDRB. Sedangkan perbandingan capaian TPTK dengan provinsi dan nasional tidak dapat pada laporan kinerja ini karena keterbatasan data yang tersedia.

Perbandingan capaian TPTK Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.26.
Capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025



Sumber:Sijunjung Dalam Angka 2026 dan data diolah, 2026

Sedangkan perbandingan dengan provinsi dan nasional serta daerah lain tidak dapat disajikan karena keterbatasn data. Sementara itu, penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis kelima RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya produktivitas masyarakat tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.33
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	635.283.850	585.400.170
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	82.492.750	76.129.190
3.	Program Hubungan Industrial	3.319.642.250	3.168.536.294

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketahanan sosial berbasiss keluarga yang berkualitas

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 108,25 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 6 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.34
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 6 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Pembangunan Keluarga (skor)	60,60	65,50	108,25	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 6			**108,25**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Dinas PP & KB Kab. Sijunjung, 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 6 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga yang diukur melalui tingkat kesejahteraan, ketahanan dan partisipasi, sehingga diperoleh Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. IBangga salah satu indikator kinerja untuk menjawab isu peningkatan ketahanan keluarga kabupaten Sijunjung lima tahun mendatang. Capaian kinerja IBangga Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai sebesar 108,25 persen dari target IBangga sebesar 60,60 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 65,60 poin. Kondisi ini menunjukkan program pembangunan ketahanan keluarga berjalan secara optimal melalui sinergi dan kolaborasi program antar sektor dan para pemangku kepentingan.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja IBangga pada tahun 2025 sebesar 104,96 persen dari target sebesar 62,5 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IBangga Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 telah tercapai berdasarkan target

akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga pada tahun rencana kinerja berikutnya dilakukan penyesuaian target IBangga yang akan diinternalisasi ke dalam perubahan RPJMD Tahun 2025-2029. Gambaran pencapaian IBangga Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

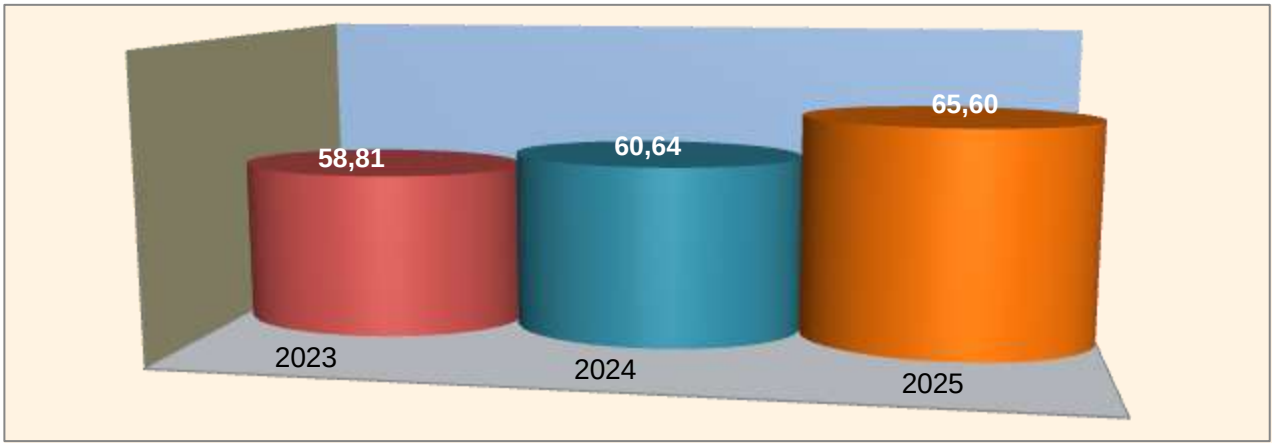
Gambar 3.25
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Dinas PP & KB Kab. Sijunjung dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sementara itu, capaian IBangga Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 4,96 poin, dari 60,64 poin tahun 2024 naik menjadi 65,60 poin tahun 2025. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas ketahanan keluarga karena belum berjalannya program menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing pada tahun 2025. Perbandingan capaian IBangga Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

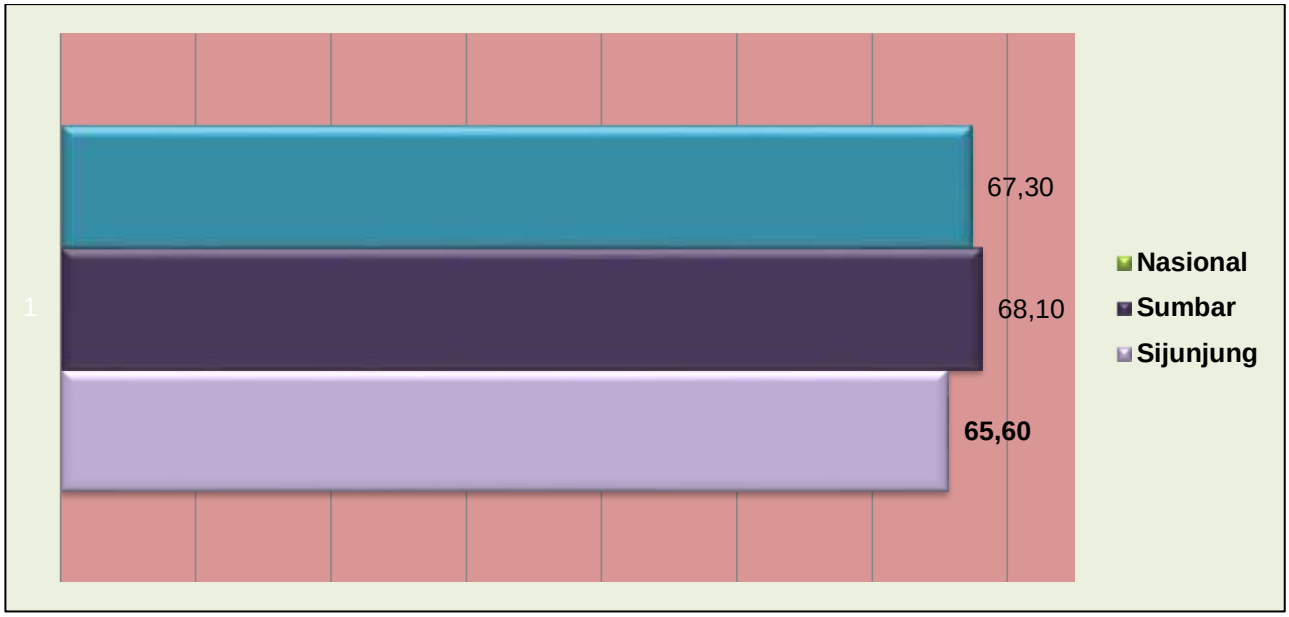
Grafik 3.27.
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas PP & KB Kab. Sijunjung, 2026

Sedangkan perbandingan capaian IBangga Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 sedikit dibawah dari provinsi dan nasional, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.28.
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasioanl Tahun 2025



Sumber: Dinas PP & KB Kab. Sijunjung, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan meningkatnya kinerja IBangga di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung memperoleh Terbaik Satu Pengelola Program Bangga Kencana Tingkat Provinisi Sumatera Barat pada Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Kabupaten Sijunjung dalam menggerakan program Bangga Kencana yang meliputi; pengendalian penduduk, pembinaan ketahanan keluarga dan pembangunan kualitas sumber daya manuasia berbasis keluarga.

Faktor kedua, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menjalankan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) secara berkesinambungan melalui intervensi program antar sektor serta para pemangku kepentingan. Mengingat program ini berfokus pada penguatan pelayanan KB gratis, pencegahan stunting, dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Kampung KB yang tersebar di berbagai nagari/desa.



Sedangkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah terhadap peningkatan kualitas ketahanan keluarga secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis keenam RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pengendalian Penduduk	279.527.700	251.117.950
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.958.217.069	6.689.110.779
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.305.570.600	1.263.167.846
4.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	54.290.200	52.559.400
5.	Program Perlindungan Perempuan	189.478.000	118.614.800
6.	Program Pemuhan Hak Anak (PHA)	6.063.400	5.687.800
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	5.515.011.050	5.261.584.072

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 117,36 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 5 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.36
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks ABS-SBK (skor)	72,93	85,59	117,36	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 7			**117,36**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 7 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks ABS-SBK

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Kabupaten Sijunjung berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat dikuantifikasi melalui indikator Indeks ABS-SBK. Indikator kinerja tersebut, dapat menjadikan alat mengevaluasi dan memperkuat kebijakan berbasis budaya ditinjau dari berbagai aspek adat istiadat, ekonomi, sosial dan lingkungan di Kabupaten Sijunjung.

Capaian kinerja Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai sebesar 117,36 persen dari target sebesar 72,93 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan realisasi sebesar 85,59 poin. Kondisi ini menunjukkan program penerapan ABS-SBK berjalan secara optimal melalui sinergi dan kolaborasi program antar sektor dan para pemangku kepentingan. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja Indeks ABS-SBK pada tahun 2025 sebesar 104,96 persen dari target sebesar 82,58 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian kinerja Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 telah tercapai berdasarkan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga pada tahun rencana kinerja berikutnya dilakukan penyesuaian target Indeks ABS-SBK yang akan diinternalisasi ke dalam perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

Gambaran pencapaian Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.26
Capaian Kinerja Indeks ABS-SBK Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sementara itu, perbandingan kinerja Indeks ABS-SBK tahun 2025 dengan tahun 2024 meningkat sangat siginifikan sebesar 12,77 poin, dari 72,82 poin tahun 2024 naik menjadi 85,59 poin tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pada umumnya nilai dimensi perhitungan Indeks ABS-SBK mengalami kenaikan, terutama dimensi falsafah alam takambang menjadi guru, dari 26,06 poin tahun 2024 naik menjadi 33,03 poin tahun 2025. Perbandingan Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.37
Capaian Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2025

No	Dimensi Penilaiaan	2024	2025
1.	Falsafah alam takambang menjadi guru	26,06	33,03
2.	Falsafah adab dan budi	11,72	11,50
3.	Falsafah barajo ka mufakat	16,75	18,31
4.	Falsafah kebersamaan dan keterpaduan	18,29	22,75
	Indeks ABS-SBK	**72,82**	**85,59**

Sumber: Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sedangkan kinerja Indeks ABS-SBK tidak dapat membandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan nasional serta kabupaten/kota karena indikator Indeks ABS-SBK ini bersifat mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Indeks ABS-SBK di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, Kabupaten Sijunjung memiliki perkampungan yang dijuluki “Lorong Waktu Minangkabau" dengan nama Perkampungan Adat Nagari Sijunjung”, karena lebih kurang 76 rumah adat yang berjejer rapi dalam satu kawasan perkampungan peninggalan abad ke 16-17, terdiri dari 6 suku dan termasuk kawasan warisan budaya nasional. Kawasan perkam-pungan adat, saat ini tak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga simbol hidupnya peradaban Minangkabau yang berpadu harmonis antara tradisi, budaya, dan modernisasi

Faktor kedua, terjaganya pelestarian budaya minangkabau melalui Festival Matrilineal dan Festival Alek Mandeh dengan mengedepankan tradisi matrilineal sebagai warisan budaya tak benda telah diakui oleh pemerintah sejak tahun 2013. Setiap tahun festival tersebut, memiliki tema berbeda-beda tergantung isu kebudayaan yang sedang berkembang ditengah perubahan zaman.





Faktor ketiga, kolaborasi dan sinergi program terbangun antar para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan ABS-SBK melalui pemantauan dan evaluasi Indeks ABS-SBK secara berkala yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sehingga dapat dipantau penerapan ABS-SBK di Kabupaten Sijunjung secara efektif dan berkelanjutan.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kinerja Indeks ABS-SBK, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi menurunnya Indeks ABS-SBK antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Keterbatasan sumber daya aparatur terhadap pemahaman yang kurang mendalam dari sebagian aparatur pemerintah terhadap filosofi adat dan agama secara utuh	• Dampak negatif arus globalisasi dan modernisasi yang mempengaruhi perubahan gaya hidup, teknologi, dan informasi yang cepat
• Belum optimalnya koordinasi antara lembaga pemerintahan tingkat nagari dengan pemuka adat ulama, dan Bundo Kanduang.	• Perubahan struktur sosial dan hubungan yang bergeser dari pola kehidupan masyarakat yang tradisional komunal ke arah yang lebih maju dan kompleks.

Mengatasi faktor penghambat peningkatan kinerja Indeks ABS-SBK tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, workshop, focus grup diskusi, dan lainnya.
2. Memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintahan tingkat nagari dengan pemuka adat ulama, dan Bundo Kanduang melalui pertemuan secara berkala.
3. Penguatan kembali peran surau/masjid, pendidikan adat berlandaskan agama sejak dini, serta revitalisasi peran tokoh adat (*niniak mamak*) dan alim ulama dalam menyinergikan aturan adat dengan syariat.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.38
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	416.952.045	391.135.921
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.339.685.450	2.188.943.800
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	359.017.500	353.381.440
4.	Program Pembinaan Sejarah	94.048.600	67.377.650
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	227.672.200	200.804.603

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis ini dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 92,31 persen atau berada pada kategori "sangat tinggi". Capaian rata-rata sasaran strategis 8 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.39
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 8 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	78,50	68,21	86,89	Tinggi
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (skor)	3,200	3,127	97,72	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 8			**92,31**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis 8 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 berdasarkan revisi perjanjian kinerja tercapai kurang optimal. Hal ini ditandai capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Daerah pada tahun 2025 tercapai sebesar 85,73 persen dari target IRB sebesar 78,50 poin atau berada pada kategori "tinggi" dengan realisasi sebesar 67,3 poin. Sedangkan capaian IRB tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 80,02 persen dari target 84,10 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian kinerja IRB hingga tahun 2029 dapat diwujudkan secara *on the track*.

Gambaran pencapaian Indeks RB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.27
Capaian Kinerja Perubahan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Kementerian PANRB,2026 dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sedangkan perbandingan IRB Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, Provinsi dan Nasional serta faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis pertama RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah. Hal ini diformulasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Capaian kinerja nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai sebesar 97,72 persen dari target sebesar 3,200 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 3,127 poin. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana cukup optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja nilai EKPPD pada tahun 2025 sebesar 86,86 persen dari target sebesar 3,600 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian kinerja nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap target akhir RPJMD Tahun 2025-2029. Gambaran pencapaian Indeks ABS-SBK Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.28
Capaian Kinerja Nilai EKPPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sementara itu, perbandingan nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,077 poin dari 3,050 poin tahun 2024 naik menjad 3,127 poin tahun 2024, Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2025. Perbandingan capaian nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

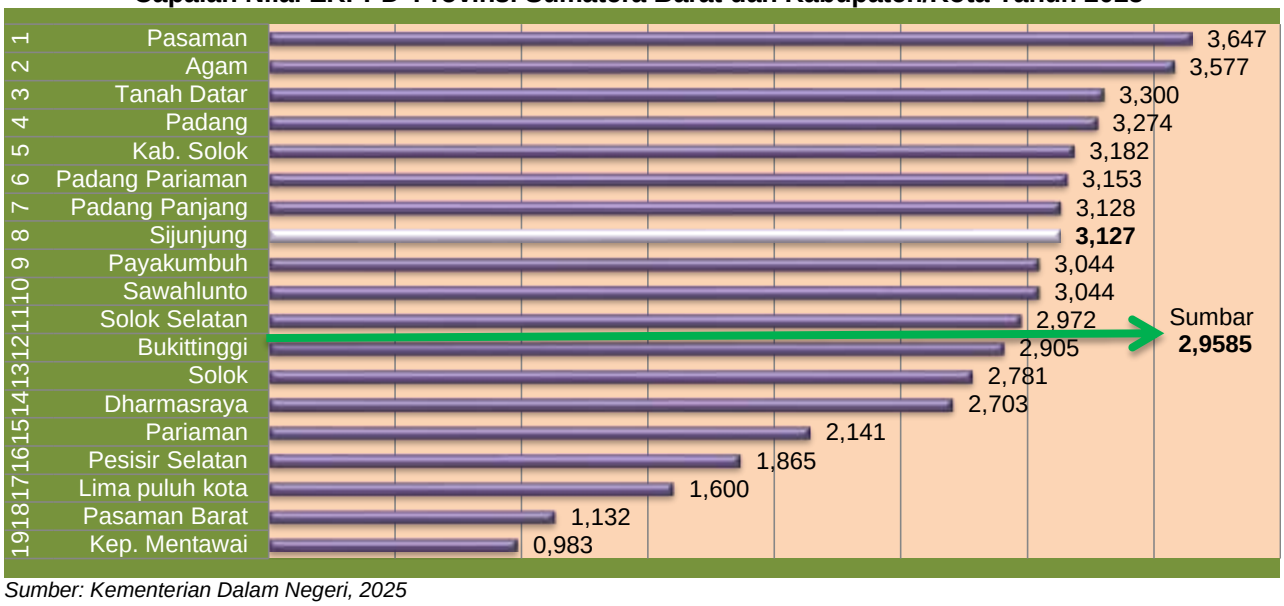
Grafik 3.29.
Capaian Nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Di satu sisi, nilai EKPPD Kabupaten Sijunjung tahun 2025 berada diatas Provinsi Sumatera Barat dan predikat ke-8 (delapan) dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sijunjung cukup baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan daerah lain. Capaian Nilai EKPPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.30.
Capaian Nilai EKPPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Sedangkan penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis pertama RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.40
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.543.144.747	2.266.130.857
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	222.476.564	216.327.294
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.951.315.735	12.493.571.951
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	167.871.650	156.754.900
5	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	232.254.825	202.405.976
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	135.459.424.205	113.877.725.594
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	133.399.580	98.590.158
8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	443.828.850	362.548.450
9	Program Kepegawaian Daerah	543.560.250	349.191.981
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.263.950	59.324.319
11	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	499.838.310	496.292.471
12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	296.074.660	289.393.095

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	45.172.769	43.285.900
14	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	6.251.300	5.856.300
15	Program Pengelolaan Arsip	87.543.950	87.113.700
16	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.369.825.020	1.346.084.182
17	Program Penataan Bangunan Gedung	1.276.997.500	1.255.604.821
18	Program Pendaftaran Penduduk	63.355.850	59.554.448
19	Program Pencatatan Sipil	86.297.400	83.226.472
20	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Ke-pendudukan	30.142.250	30.142.250
21	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.989.700	3.935.408
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.576.316.618	1.363.152.525
23	Program Penetapan Tanah Ulayat	10.048.200	5.238.750
25	Program Penatagunaan Tanah	47.611.100	45.286.573
26	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	28.805.400	17.778.050
27	Program Redistribusi, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	33.308.600	25.557.729
28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.357.190	2.555.190.352
29	Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan	2.276.500	2.208.800
30	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	710.842.050	697.210.763
31	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.048.473.120	1.008.006.433
32	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	403.952.550	384.057.830
33	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.707.290	139.049.238
34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.563.200	31.175.200
35	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.640.000	5.640.000
36	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.031.100	45.338.250
37	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.707.290	139.049.238
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	661.198.109.508	624.145.383.674

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 90,55 persen atau berada pada predikat “tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 9 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.41
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 9 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (skor)	81,34	73,65*)	90,55	Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 9			**90,55**	**Tinggi**

*) Indeks Integritas Pemerintah Daerah 2025
Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung, 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 9 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Persepi Anti Korupsi

Upaya meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, salah satunya dapat diukur melalui Indeks Persepi Anti Korupsi (IPAK) sebagai instrumen pengukuran tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan publik yang *good governance*. Sementara itu, data capaian IPAK Kabupaten Sijunjung tahun 2025 hingga laporan kinerja ini disusun belum tersedia, sehingga dikonversi dengan data capaian Indeks Integritas Pemerintah Daerah tahun 2025 yang diliris oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI berdasarkan nilai survey penilaian integritas. Hal ini mempunyai simplikasi karena indikator kinerja indeks integritas cerminan dari pemetaan risiko korupsi dan mengevaluasi sistem antikorupsi pada instansi pemerintah.

Capaian kinerja IPAK Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 tercapai sebesar 90,55 persen dari target IPAK sebesar 81,34 poin atau berada pada kategori “tinggi”, dengan realisasi sebesar 73,65 poin. Kondisi ini menunjukkan program pemetaan risiko korupsi dan mengevaluasi sistem antikorupsi pada instansi pemerintah belum berjalan secara optimal berdasarkan target. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja IPAK pada tahun 2025 sebesar 86,65 persen dari target sebesar 85,0 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IPAK Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 terjaga sesuai dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Gambaran pencapaian TPAK Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.29
Capaian Kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung, 2026

Sedangkan perbandingan capaian IPAK tahun 2025 dengan tahun 2024, provinsi, nasional dan daerah lain tidak dapat disajikan pada laporan kinerja ini karena keterbatasan data yang tersedia. Sementara itu, penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis pertama RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.42
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 9 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	245.263.204	214.739.824
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	33.758.600	30.117.200

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 111,85 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 10 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.43
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 10 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	69,20	77,40	111,85	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 10			**111,85**	**Sangat Tinggi**

**) Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung, 2026*

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian perubahan kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapai sebesar 111,85 persen dari target IKLH sebesar 69,20 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 77,40 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian perubahan kinerja IKLH pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana karena melebihi dari target. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja IKLH pada tahun 2025 sebesar 99,13 persen dari target IKLH sebesar 78,08 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IKLH Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target akhir RPJMD RPJMD Tahun 2025-2029

Gambaran pencapaian IKLH Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.30
Capaian Perubahan Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 dan Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung, 2026

Sedangkan perbandingan capaian IKLH tahun 2025 dengan tahun 2024, provinsi, nasioanl dan daerah serta penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis kedelapan RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.44
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 10 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	227.943.250	215.775.827
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	102.301.816	94.866.606
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	72.595.650	70.942.413
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	22.065.560	17.316.286
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	55.508.728	23.351.470
6.	Program Pengelolaan Persampahan	3.475.645.335	3.330.991.204
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	61.398.500	61.201.650

Sumber; BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 98,38 persen atau berada pada predikat "sangat tinggi". Capaian rata-rata sasaran strategis 11 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.45
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 11 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Risiko Bencana (skor)	105,0	106,73	98,38	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 11			**98,38**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BNPB, 2026 dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 11 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Risiko Bencana

Dalam upaya menekan risiko bencana di suatu wilayah diperlukan pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi bencana tersebut, dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Indikator tersebut merupakan alat evaluasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memetakan kondisi potensi bencana daerah berbasis aplikasi InaRisk.

Capaian kinerja IRB Kabupaten Sijunjung tahun tercapai sebesar 98,38 persen dari target IRB sebesar 105,0 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan realisasi sebesar 106,73 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja IRB pada tahun 2025 berjalan cukup optimal sesuai dengan rencana karena hampir mencapai target. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja IRB pada tahun 2025 sebesar 95,19 persen dari target IRB sebesar 101,6 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian IRB Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Gambaran pencapaian IRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.31
Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: BNPB, 2026 dan Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025

Sementara itu, pencapaian IRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 tercapai angka yang sama sebesar 106,73 poin. Perbandingan IRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.46
Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

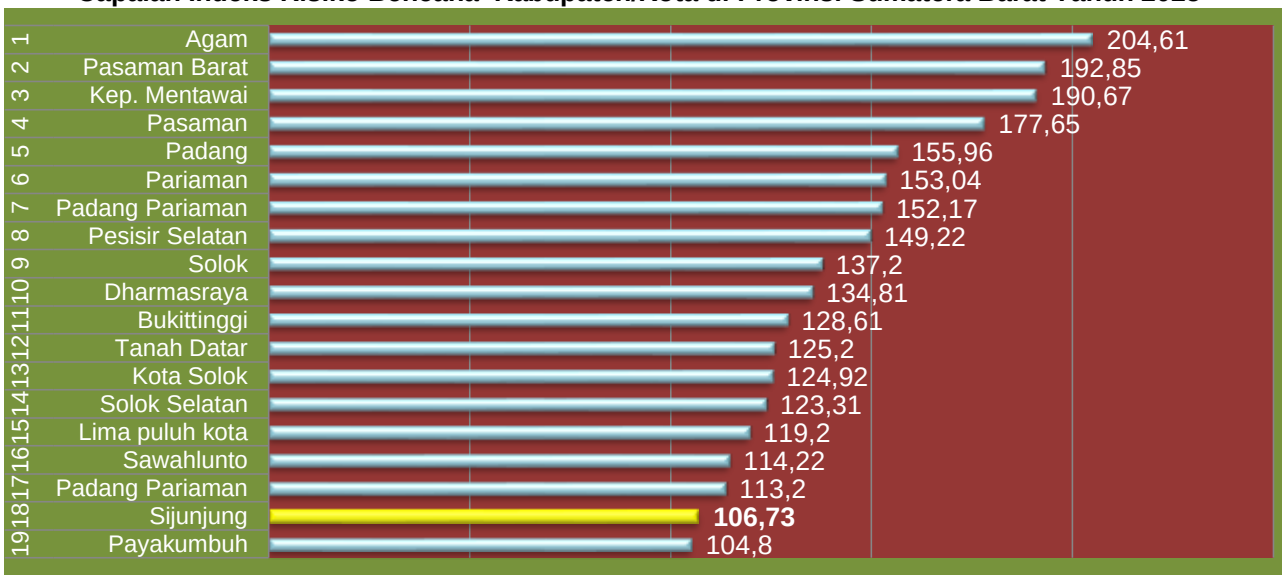
No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Kelas Risiko 2025
1	Kab. Kepulauan Mentawai	197,20	197,20	153,48	190,67	190,67	Tinggi
2	Kab. Pesisir Selatan	169,42	152,98	120,89	149,22	149,22	Sedang
3	Kab. Solok	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	Sedang
4	**Kab. Sijunjung**	**107,20**	**107,20**	**107,20**	**106,73**	**106,73**	**Sedang**
5	Kab. Tanah Datar	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	Sedang
6	Kab. Padang Pariaman	156,73	156,73	140,89	152,17	152,17	Sedang
7	Kab. Agam	193,52	193,52	157,51	204,61	204,61	Tinggi
8	Kab. Lima Puluh Kota	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	Sedang
9	Kab. Pasaman	178,00	178,00	174,46	177,65	177,65	Tinggi
10	Kab. Solok Selatan	169,42	152,96	113,30	123,31	123,31	Sedang
11	Kab. Dharmasraya	143,20	143,20	125,02	134,81	134,81	Sedang
12	Kab. Pasaman Barat	203,20	203,20	203,20	192,85	192,85	Tinggi
13	Kota Padang	181,70	179,03	138,90	155,96	155,96	Tinggi
14	Kota Solok	125,20	125,20	95,42	124,92	124,92	Sedang

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Kelas Risiko 2025
15	Kota Sawahlunto	113,20	101,08	79,80	114,22	114,22	Rendah
16	Kota Bukittinggi	130,00	130,00	130,00	128,61	128,61	Sedang
17	Kota Payakumbuh	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	Sedang
18	Kota Padang Panjang	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	Sedang
19	Kota Pariaman	171,20	171,20	122,37	153,04	153,04	Tinnggi

Sumber: BNPB, 2026

Sedangkan dari sisi posisi pencapaian IRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 berada pada posisi 18 (delapan belas) terendah dari 19 (Sembilan belas) kabupaten/kota, hal ini dapat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.31.
Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber: BNPB, 2026

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja indeks risiko bencana di Kabupaten Sijunjung, diantaranya;



Faktor pertama, tetap terjaganya kapasitas dan ketahanan daerah terhadap resiliensi bencana melalui pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan simulasi (pra-bencana) yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, terkoordinirnya kinerja tim gabungan dalam tanggap darurat dan rekonstruksi/ pemulihan pasca-bencana berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terimplementatif.

Faktor kedua, pemutakhiran dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) melalui validasi lapangan (*desk study*) untuk menyesuaikan hasil kajian dengan kondisi riil di lapangan, terutama

terkait sebaran titik bencana. Selain itu, pelaksanaan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat melalui pembentukan nagari/desa tangguh bencana.

Disamping adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan kinerja IRB, namun terdapat beberapa faktor penghambat mempengaruhi menurunnya kinerja IRB antara lain;

Faktor Internal	Faktor Eksternal
• Keterbasan sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana secara efektif dan berkelanjutan	• Tingginya intensitas curah hujan yang sering memicu banjir dan tanah longsor, yang meningkatkan ancaman (*hazards*).
• Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan tindakan mitigasi risiko secara maksimal dan terstruktur	• Aktivitas penebangan liar dan alih fungsi lahan yang menyebabkan tanah rentan erosi

Mengatasi faktor penghambat peningkatan kinerja kualitas risiko bencana tersebut, maka dirumuskan strategi pemecahan masalah, antara lain:

1. Memasukkan kajian risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan investasi aman dari bencana.
2. Menyiapkan sumber daya manusia dan tim teknis yang profesional, terlatih, dan berdedikasi.
3. Meningkatkan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah rawan bencana melalui simulasi dan pelatihan.
4. Mendorong kerjasama antara pemerintah, akademisi, komunitas/masyarakat, dunia usaha (swasta), dan media.
5. Menggunakan sistem informasi geospasial untuk memetakan bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah secara *real-time.*

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.47
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 11 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Penanggulangan Bencana	774.776.247	478.600.766
2.	Program Penanganan Bencana	110.494.000	100.661.195

Sumber; BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 97,16 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 12 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.48
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 12 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Infrastruktur Jalan (poin)	46,43	45,11	97,16	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 12			**97,16**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 12 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Infrastruktur Jalan

Capaian perubahan kinerja infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah pada tahun 2025 tercapai cukup optimal. Hal ini ditandai kinerja indeks Infrastruktur jalan tercapai sebesar 97,16 persen dari target indeks Infrastruktur jalan sebesar 46,43 poin atau berada pada kategori "sangat tinggi", dengan realisasi sebesar 45,11 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja indeks Infrastruktur jalan pada tahun 2025 cukup efektif berjalan sesuai dengan rencana karena tercapai mendekati target.

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 perubahan kinerja indeks Infrastruktur jalan pada tahun 2025 sebesar 71,37 persen dari target indeks Infrastruktur jalan sebesar 63,21 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian indeks Infrastruktur jalan Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi landasan kuat untuk pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Gambaran pencapaian perubahan kinerja indeks Infrastruktur Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.32
Capaian Perubahan Kinerja Indeks Infrastruktur Jalan Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sedangkan perbandingan capaian Indeks Infrastruktur Jalan tahun 2025 dengan tahun 2024, serta penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis ketujuh RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.49
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 12 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	23.419.484.959	21.043.999.077
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	10.825.122.691	10.556.139.293
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	20.008.500	19.194.056
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	142.674.371	111.146.483
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	88.541.450	37.400.470

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja tercapai secara rata-rata sebesar 101,60 persen atau berada pada predikat “sangat tinggi”. Capaian rata-rata sasaran strategis 13 ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.50
Pencapaian Rata-rata Sasaran Strategis 13 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (poin)	62,28	63,34	101,60	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian sasaran 13			**101,60**	**Sangat Tinggi**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 13 dijelaskan berikut ini.

1. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar terlihat dari semakin tingginya pemenuhan kebutuhan layanan infrastuktur dasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara inklusif. Kinerja tersebut, dikuantifikasi melalui indikator Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (ILID). Sehingga dapat melihat ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Capaian kinerja ILID Kabupaten Sijunjung tahun tercapai sebesar 101,60 persen dari target ILID sebesar 62,28 poin atau berada pada kategori “sangat tinggi”, dengan realisasi sebesar 63,34 poin. Kondisi ini menunjukkan pencapaian kinerja ILID pada tahun 2025 berjalan secara optimal sesuai dengan rencana karena melampaui dari target. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2025-2029 kinerja ILID pada tahun 2025 sebesar 84,85 persen dari target ILID sebesar 63,21 poin. Kondisi ini mencerminkan pencapaian ILID Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2025 *on the track* terhadap rencana secara jangka menengah. Sehingga menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target akhir RPJMD RPJMD Tahun 2025-2029

Gambaran pencapaian ILID Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025, dapat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.33
Capaian Kinerja Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025, BPS Sumatera Barat dan Dinas Perkim & LH Kab. Sijunjung, 2026

Sementara itu, perbandingan kinerja ILID tahun 2025 dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,57 poin, dari 62,77 poin tahun 2024 naik menjadi 63,34 poin tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pada umumnya nilai dimensi perhitungan ILID mengalami kenaikan. Perbandingan nilai dimensi indikator ILID Kabupaten Sijunjung tahun 2025 dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.51
Capaian Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Sijunjung Tahun 2024-2025

No	Indikator	2024	2025
1.	Cakupan layanan air minum yang layak	28,13	28,53
2.	Cakupan sanitasi yang layak	23,89	23,96
3.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	10,75	10,84
	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	**62,77**	**63,34**

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Bupati 2025 & Bapppeda Kab. Sijunjung, 2026

Sedangkan perbandingan capaian ILID tahun 2025 dengan provinsi, nasional dan daerah lain tidak dapat disajikan dalam laporan kinerja ini karena indikator ini bersifat mandiri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Sementara itu, penjelasan faktor keberhasilan, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah secara substansi sama dengan pada penjelasan analisis capaian sararan strategis ketujuh RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dukungan program dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.52
Program dan Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 13 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	122.852.000	112.768.772
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	925.322.120	910.212.963
3.	Program Kawasan Permukiman	44.767.360	24.665.802
4.	Program pengembangan perumahan	109.337.420	105.366.100
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7.143.594.093	7.080.606.922
6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	801.543.276	799.496.985

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

3.3 Analisis Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

3.3.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi pengunaan anggaran ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pencapaian kinerja sasaran strategis terhadap realisisasi anggaran secara tepat guna dan berdaya guna. Terdapat 4 (empat) interpretasi terhadap analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja secara efektif, diklasifikasi sebagai beikut:

No	Kriteria	Pernyataan Interpretasi	Deskripsi
1.	Capaian kinerja >100%, proporsi efisiensi anggaran <5%	Sangat efektif	Tercapanya kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien
2.	Capaian kinerja >100%, proporsi efisiensi anggaran >5%	Efektif	Tercapainya kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang kurang efisien
3.	Capaian kinerja <100%, proporsi efisiensi anggaran <5%	Cukup Efektif	Tercapainya kinerja cukup optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien
4.	Capaian kinerja <100%, proporsi efisiensi anggaran >5%	Kurang efektif	Tercapaianya kinerja cukup optimal dengan penggunaan anggaran yang kurang efisien

Analisis penggunaan anggaran secara efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.53
Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaiaan Kinerja Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Proporsi Realisasi (%)	Interpretasi
1.	Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	2	91,81	2,76	Cukup Efektif
2.	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3	93,40	10,90	Cukup Efektif

Sasaran Strategis		Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Proporsi Realisasi (%)	Interpretasi
3.	Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	1	101,31	34,02	Efektif
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1	100,86	4,52	Sangat efektif
5.	Meningkatnya produktivitas masyarakat	1	96,75	5,14	Kurang efektif
6.	Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	1	108,25	4,66	Sangat efektif
7.	Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK	1	117,36	6,86	Efektif
8.	Meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	2	91,73	7,30	Kurang efektif
9.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	1	90,55	12,24	Kurang efektif
10.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1	111,85	5,05	Efektif
11.	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	1	98,38	34,57	Kurang efektif
12.	Meningkatnya kualitas infastruktur wilayah	1	97,16	7,91	Kurang efektif
13.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	1	101,60	1,25	Sangat efektif

Sumber: data diolah

3.3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa upaya-upaya telah dilaksanakan dalam upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif berdasarkan kondisi kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dalam rangka mendorong pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025, antara lain;

1. Analisis Beban Kerja (ABK) atau *workload analysis*, merupakan metode utama untuk menentukan jumlah SDM optimal berdasarkan volume pekerjaan, waktu, dan standar beban kerja.
2. Analisis Jabatan (Anjab) yang bertujuan untuk memperjelas peran, tanggung jawab, dan kualifikasi dalam upaya efektivitas pelaksanaan kegiatan secara efisien.
3. Menerapkan teknologi digital untuk menggantikan proses manual, yang meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi kebutuhan tenaga administratif.
4. Pengembangan manajemen kinerja berbasis hasil meliputi; a) disiplin, b) hasil pekerjaan dan c) kerja sama melalui pegembangan aplikasi e-Sakip.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2025

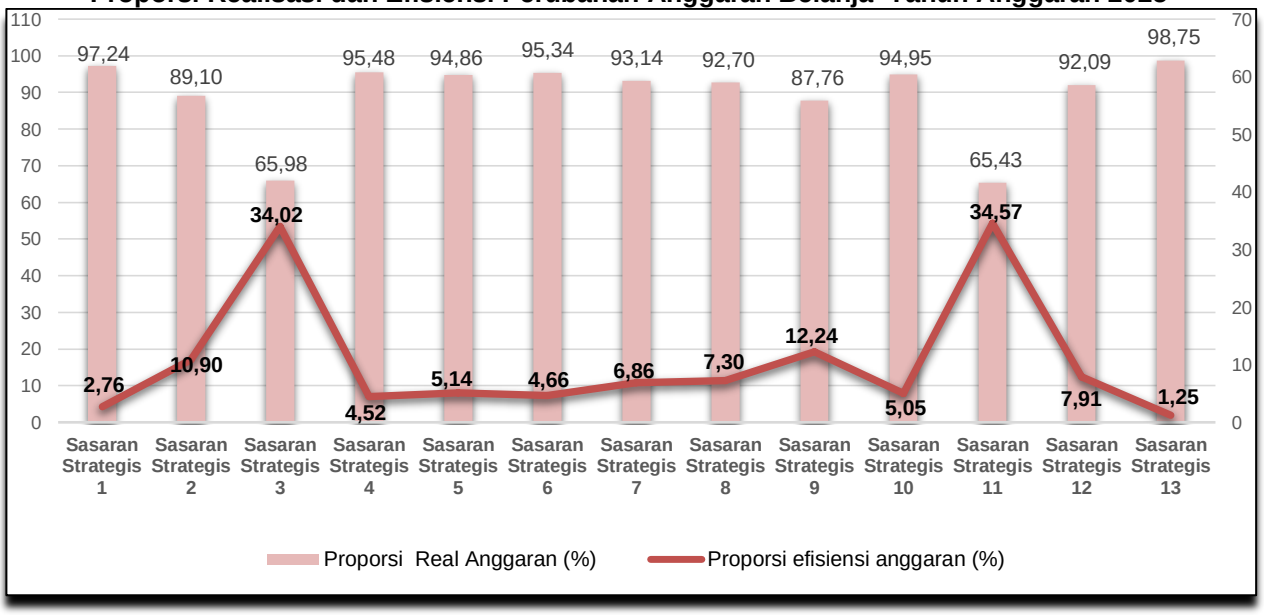
3.4.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

Tahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menetapkan anggaran belanja sebesar Rp 1.055.908.934.175,- yang terealisasi sebesar Rp 983.505.587.531,- (sebelum diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah RI). Dari kinerja realisasi belanja tersebut diperoleh efisiensi belanja sebesar 6,86 persen dengan nilai sebesar Rp 72.403.346.645,-

Secara proporsi realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis yang merujuk pada perubahan kinerja Bupati tahun 2025, terdapat 2 sasaran yang proporsi serapan anggaran mencapai 65 persen pada sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 11. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi realisasi anggaran di akhir tahun anggaran 2025 dalam rangka meminimalisir risiko ketersediaan anggaran untuk pembayaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Proporsi realisasi dan tingkat efisiensi anggaran pada tahun 2025, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.32.
Proporsi Realisasi dan Efisiensi Perubahan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025



Sumber Data BKAD Kab. Sijunjung, 2026 dan data diolah

3.4.2 Realisasi Anggaran Belanja Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025

Realisasi anggaran belanja program masing-masing sasaran strategis yang merujuk pada perubahan kinerja Bupati Sijunjung Tahun 2025 diklasifikasikan berdasarkkan aspek sebagai berikut:

1. Aspek penunjang keberhasilan program, diartikan pencapaian proporsi realisasi anggaran program diatas angka 94 persen dengan klasifikasi kinerja yang sangat tinggi dan tinggi.
2. Aspek penunjang kegagalan program, diartikan pencapaian proporsi realisasi anggaran program dibawah angka 94 persen dengan klasifikasi kinerja yang sedang dan rendah.

Proporsi realisasi anggaran program berdasarkan aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan, diuraikan berikut ini.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 9.003.694.583,- atau 97,24 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 9.755.911.694,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 752.217.111,- atau tingkat efisiensinya sebesar 2,76 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang

kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.54
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.286.994.787	3.215.557.373	97,83
2.	Program pengelolaan perikanan budi daya	302.107.414	294.210.740	97,39
3.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	233.315.350	227.574.641	97,54
4.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	12.808.500	12.409.521	96,88
5.	Program Pengunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	86.181.000	85.018.855	98,65
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	998.161.354	971.218.747	97,30
7.	Program Pemasaran Pariwisata	161.539.583	158.965.553	98,41
8.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.633.699	66.765.150	94,52
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.116.498.334	913.387.417	81,81
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	310.868.080	281.841.905	90,66
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	49.341.450	30.519.473	61,85
12.	Program Penyuluhan Pertanian	1.001.960.000	886.137.185	88,44
13.	Program pengelolaan perikanan tangkap	35.266.388	32.108.900	91,05
14.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	4.067.920	.2728.450	67,07
15.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	322.851.463	255.326.200	79,08
16.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27.437.782	25.675.907	93,58
17.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	17.597.650	16.304.354	92,65
18.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	706.315.700	654.012.771	92,59
19.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	47.000.750	356.66.621	75,89
20.	Program Promosi Penanaman Modal	50.203.450	3.199.694	6,37
21.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	57.618.400	50.483.580	87,62
22.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.613.550	2.400.412	91,84
23.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	706.315.700	654.012.771	92,59
	Jumlah	**9.755.911.694**	**9.003.694.583**	**97,24**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 609.119.294,- atau 89,10 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 683.642.875,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 74.523.581,- atau tingkat efisiensinya sebesar 10,90 persen. Proporsi

realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.55
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	125.497.300	118.699.257	94,97
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.986.450	1.839.250	94,58
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
3.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	232.254.825	202.405.976	87,15
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	172.413.250	163.748.436	92,59
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	151.491.050	122.426.375	80,81
	Jumlah	**683.642.875**	**609.119.294**	**89,10**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

3. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 182.133.485,- atau 65,98 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 276.055.193,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 93.921.708,- atau tingkat efisiensinya sebesar 34,02 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.56
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	57.046.058	55.472.975	94,65
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	140.134.750	54.637.586	99,05
3.	Program Pengembangan UMKM	17.558.100	13.949.095	97,24
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
4.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	17.823.850	16.869.438	87,76
5.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	16.606.050	145.73.703	38,99
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	26.886.385	26.630.688	79,45
	Jumlah	**276.055.193**	**182.133.485**	**65,97**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

4. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 143.547.172.344,- atau 95,48 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 150.343.555.954,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 6.796.383.610,- atau tingkat efisiensinya sebesar 4,52 persen.

Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.57
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	70.582.334.680	69.658.141.965	98,69
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	696.578.898	655.758.483	94,14
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.152.606.605	2.077.222.987	96,50
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	74.951.852.740	69.534.434.020	92,77
5.	Program Pemingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	458.968.500	384.219.564	83,71
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	364.643.040	226.660.720	62,16
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	676.991.700	624.621.682	92,26
8.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.245.123	15.713.105	67,60
9.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	19.798.000	18.060.075	91,22
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	62.033.658	51.514.860	83,04
11.	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	200.000.000	177.503.008	88,75
12.	Program Pemberdayaan Sosial	104.162.500	93.183.650	89,50
13.	Program Rehabilitasi Sosial	41.466.650	21.932.975	52,89
14.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.873.850	8.205.250	92,47
	Jumlah	**150.343.555.954**	**143.547.172.344**	**95,48**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

5. Sasaran Strategis Meningkatnya produktivitas masyarakat

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 5 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.830.065.654,- atau 94,86 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 4.037..418.850,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 207.353.196,- atau tingkat efisiensinya sebesar 5,14 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 5, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.58
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Hubungan Industrial	3.319.642.250	3.168.536.294	95,45
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	635.283.850	585.400.170	92,15
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	82.492.750	76.129.190	92,29
	Jumlah	**4.037.418.850**	**3.830.065.654**	**94,86**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

6. Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 6 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 13.641.842.647,- atau 95,34 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 14.308.158.019,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 666.315.372,- atau tingkat efisiensinya sebesar 4,66 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 6, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.59
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.958.217.069	6.689.110.779	96,13
2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.305.570.600	1.263.167.846	96,75
3.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	54.290.200	52.559.400	96,81
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	5.515.011.050	5.261.584.072	95,40
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
5.	Program Pengendalian Penduduk	279.527.700	251.117.950	89,84
6.	Program Perlindungan Perempuan	189.478.000	118.614.800	62,61
7.	Program Pemuhan Hak Anak (PHA)	6.063.400	5.687.800	93,81
	Jumlah	**14.308.158.019**	**13.641.842.647**	**95,34**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

7. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlandaskan ABS-SBK

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 7 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.201.643.414,- atau 93,14 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 3.437.375.795,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 235.732.381,- atau tingkat efisiensinya sebesar 6,86 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 7, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.60
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	359.017.500	353.381.440	98,43
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	416.952.045	391.135.921	93,81
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.339.685.450	2.188.943.800	93,56
4.	Program Pembinaan Sejarah	94.048.600	67.377.650	71,64
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	227.672.200	200.804.603	88,20
	Jumlah	**3.437.375.795**	**32.016.43.414**	**93,14**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

8. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 8 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 764.050.354.746,- atau 92,70 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 824.241.816.666,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 60.191.461.921,- atau tingkat efisiensinya sebesar 7,30 persen. . Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 8, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.61
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 8 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	222.476.564	216.327.294	97,24
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.951.315.735	12.493.571.951	96,47
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	499.838.310	496.292.471	99,29
4.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	296.074.660	289.393.095	97,74
5.	Program Pengelolaan Arsip	87.543.950	87.113.700	99,51
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	45.172.769	43.285.900	95,82
7.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.369.825.020	1.346.084.182	98,27
8.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.276.997.500	1.255.604.821	98,32
9.	Program Pencatatan Sipil	86.297.400	83.226.472	96,44
10.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.142.250	30.142.250	98,10
11.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.989.700	3.935.408	98,64
12.	Program Penatagunaan Tanah	47.611.100	45.286.573	95,12
13.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.614.357.190	2.555.190.352	97,74
14.	Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan	2.276.500	2.208.800	97,03
15.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	710.842.050	697.210.763	98,08
16.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.048.473.120	1.008.006.433	96,14
17.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	661.198.109.508	624.145.383.674	94,40
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
18.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.543.144.747	2.266.130.857	89,11
19.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	167.871.650	156.754.900	93,37
20.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	135.459.424.205	113.877.725.594	84,07
21.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	133.399.580	98.590.158	73,91
22.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	443.828.850	362.548.450	81,69
23.	Program Kepegawaian Daerah	543.560.250	349.191.981	64,24
24.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.263.950	59.324.319	84,43
25.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	6.251.300	5.856.300	93,68
26.	Program Pendaftaran Penduduk	63.355.850	59.554.448	94,00
27.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.576.316.618	1.363.152.525	86,48
28.	Program Penetapan Tanah Ulayat	10.048.200	5.238.750	52,14

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
29.	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	28.805.400	17.778.050	61,72
30.	Program Redistribusi, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	33.308.600	25.557.729	76,73
31.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	403.952.550	384.057.830	5,07
32.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.707.290	139.049.238	85,46
33.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	38.563.200	31.175.200	80,84
34.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.640.000	5.640.000	100
35.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.031.100	45.338.250	80,84
36.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.707.290	139.049.238	75,52
	Jumlah	**3.437.375.795**	**32.016.43.414**	**92,70**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

9. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 9 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 244.857.024,- atau 87,76 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 279.021.804,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 34.164.780,- atau tingkat efisiensinya sebesar 12,24 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 9, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.62
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 9 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang kegagalan**			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	245.263.204	214.739.824	87,55
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	33.758.600	30.117.200	89,21
	Jumlah	**279.021.804**	**244.857.024**	**87,76**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

10. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 10 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.814.445.456,- atau 94,95 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 4.017.458.839,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 203013383,- atau tingkat efisiensinya sebesar 5,05 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 10, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.63
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 10 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	227.943.250	215.775.827	94,66
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	72.595.650	70.942.413	97,72
3.	Program Pengelolaan Persampahan	3.475.645.335	3.330.991.204	95,84
4.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	61.398.500	61.201.650	99,68
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	102.301.816	94.866.606	92,73
6.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	22.065.560	17.316.286	78,48
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	55.508.728	23.351.470	42,07
	Jumlah	**4.017.458.839**	**3.814.445.456**	**94,95**

Sumber; BKAD Kab. Sijunjung, 2026

11. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 11 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 3.814.445.456,- atau 94,95 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 4.017.458.839,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 203.013.383,- atau tingkat efisiensinya sebesar 5,05 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 11, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.64
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 11 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang kegagalan**			
1.	Program Penanggulangan Bencana	774.776.247	478.600.766	61,77
2.	Program Penanganan Bencana	110.494.000	100.661.195	91,10
	Jumlah	**885.270.247**	**579.261.961**	**65,43**

Sumber; BKAD Kab. Sijunjung, 2026

12. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 12 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 31.767.879.379,- atau 92,09 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 34.495.831.971,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.727.952.592,- atau tingkat efisiensinya sebesar 7,91 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 12, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.65
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 12 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ)	10.825.122.691	10.556.139.293	97,52
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	20.008.500	19.194.056	95,93
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	23.419.484.959	21.043.999.077	89,86
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	142.674.371	111.146.483	77,90
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	88.541.450	37.400.470	42,24
	Jumlah	**34.495.831.971**	**31.767.879.379**	**92,09**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026

13. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 13 RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 9.033.117.544,- atau 98,75 persen dari alokasi angaran sebesar Rp 9.147.416.269,-. Dari kinerja realisasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 114.298.725,- atau tingkat efisiensinya sebesar 1,25 persen. Proporsi realisasi anggaran program, baik dari sisi aspek penunjang keberhasilan dan penunjang kegagalan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 13, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.66
Program dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 13 Tahun 2025

No	Program	Anggaran Perubahan	Realisasi (*unaudited*)	Proporsi Realisasi (%)
A.	**Aspek penunjang keberhasilan**			
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	925.322.120	910.212.963	98,37
2.	Program pengembangan perumahan	109.337.420	105.366.100	96,37
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7.143.594.093	7.080.606.922	99,12
4.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	801.543.276	799.496.985	99,74
B.	**Aspek penunjang kegagalan**			
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	122.852.000	112.768.772	91,79
6.	Program Kawasan Permukiman	44.767.360	24.665.802	55,10
	Jumlah	**9.147.416.269**	**9.033.117.544**	**98,75**

Sumber: BKAD Kab. Sijunjung, 2026



BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama tahun 2025. Di dalamnya, termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya yang dapat diperoleh. Selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun 2025.

Penyajian laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Bupati Sijunjung masa jabatan Tahun 2025-2030 yang merujuk pada rencana strategis Tahun 2021-2026 dan rencana strategis Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/AA.01/2025, perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.

Secara singkat pencapaian kinerja berdasarkan masing-masing rencana strategis tersebut, dijelaskan berikut ini.

1. **Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026**
   Pencapaian kinerja tahun 2025 merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 secara umum tercapai cukup optimal ditandai proporsi pencapaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebesar 75,0 persen atau 12 dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 8 (delapan) sasaran strategis. Di sisi lain, terdapat 3 (tiga) IKU yang capaian kinerjanya pada kategori “sedang” yang capaian kinerjanya dibawah 76 persen dari target. Ketiga IKU tersebut, adalah; 1) Manajemen Resiko Indeks, 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan 3) Prevalensi Balita stunting.
2. **Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029**
   Pencapaian kinerja tahun 2025 merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 secara umum tercapai cukup optimal ditandai proporsi pencapaian kinerja kategori “sangat tinggi” sebesar 82,35 persen atau 14 dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 13 (tiga belas) sasaran strategis. Di sisi lain, terdapat 1 (satu) IKU yang capaian kinerjanya pada kategori “sedang” yang capaian kinerja dibawahnya 76 persen dari target, yaitu, Tingkat Kemiskinan Ekstrem.

Sedangkan dari sisi pencapaian terhadap target akhir RPJMD keseluruhan pencapaian IKU tahun 2025 berjalan secara *on the track* sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan**.** Hal Ini didukung beberapa faktor keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang berbasis inovatif dan terintegratif serta kolaboratif. Sehingga terdapat 2 (dua) IKU yang telah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu; 1) Indeks Pembangunan Keluarga, dan 2) Indeks ABS-SBK. Oleh sebab pada tahun rencana kinerja berikutnya dilakukan penyesuaian target kedua IKU tersebut, yang akan diinternalisasi ke dalam perubahan RPJMD Tahun 2025-2029. Di sisi lain, terdapat juga faktor penghambat pencapaian kinerja, baik dari sisi faktor internal, maupun faktor eksternal. Sehingga diciptakan strategi yang tepat untuk mengatasi faktor pengambat pencapaian kinerja.

Di satu sisi, berdasarkan analisis penggunaan sumber daya anggaran secara efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025, terdapat 5 (lima) sasaran strategis penggunaan anggaran kurang efektif terhadap pencapaian target kinerja yaitu; 1) sasaran meningkatnya produktivitas masyarakat, 2) sasaran meningkatnya kuaitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing, 3) sasaran meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih, 4) sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana, dan 5) sasaran meningkatnya kualitas infastruktur wilayah. Sedangkan pencapaian target kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025, diperoleh efisiensi belanja sebesar 6,86 persen dengan nilai sebesar Rp 72.403.346.645,- dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 1.055.908.934.175,-.

4.2 UPAYA AKSELERASI PENCAPAIAN KINERJA

Berlandaskan analisis capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabuaten Sijunjung tahun 2025, terdapat beberapa IKU yang capaian belum berjalan secara optimal sesuai dengan target kinerja tahunan dan lima tahunan. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya akselerasi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah periode kinerja berikutnya, antara lain;

1. Memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Memperkuat ekosistem inovasi diseluruh sektor pembangunan secara terstruktur, efektif dan berkesinambungan
3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, lembaga/oganisasi kemasyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam pola pembangunan partisipatif dan kolaboratif.
4. Membangun koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperluas ruang fiskal pembangunan secara berkesinambungan.
5. Memperkuat penerapan manajemen risiko pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif dan berkesinambungan

Bupati Sijunjung,

BENNY DWIFA YUSWIR



Lampiran LKjIP 2025

BUPATI SIJUNJUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BENNY DWIFA YUSWIR

Jabatan : BUPATI SIJUNJUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muaro Sijunjung, Januari 2025

BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,1
	2. Nilai SAKIP Pemda	Nilai	73,0
	3. Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,000
2. Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	4. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00
	5. Indeks Inovasi Daerah	Skor	60,1
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86
	7. Gini Rasio	Nilai	0,239
	8. PDRB perkapita (ADHB)	Rp Juta	52,74
4. Menurunnya kemiskinan	9. Angka Kemiskinan	%	5,36
5. Memperluas kesempatan kerja	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	11. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,98
	12. Prevalensi balita stunting	%	20,0
	13. Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,30
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	14. Indeks Infrastruktur	Nilai	64,0
	15. Indeks Infrastruktur jalan	Nilai	43,10
8. Meningkatnya kualitas lingkungan	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	77,23

Muaro Sijunjung, Januari 2025

BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.777.390.850
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	850.189.964
3	Program Administrasi Umum	273.096.400
4	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	15.579.590.677
5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	758.223.150
6	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	956.869.650
7	Program penelitian dan pengembangan daerah	964.949.000
8	Program pengelolaan keuangan daerah	142.733.519.512
9	Program pengelolaan barang milik daerah	406.725.250
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.065.786
11	Program kepegawaian daerah	1.588.429.888
12	Program pengembangan SDM	474.521.368
13	Program penyelenggaraan pengawasan	756.692.000
14	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	431.670.560
15	Program pengelolaan pendidikan	88.237.120.164
16	Program pendidik dan tenaga kependidikan	59.997.450
17	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	41.111.105.836
18	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	770.521.294
19	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	456.330.600
20	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	327.385.500
21	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.401.689.750
22	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4.895.681.700
23	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	525.004.050

No.	Program	Anggaran (Rp)
24	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.020.957.475
25	Program pengembangan permukiman	1.147.861.574
26	Program penataan bangunan gedung	1.851.980.475
27	Program penataan bangunan dan lingkungannya	1.870.437.975
28	Program penyelenggaraan jalan	45.846.565.749
29	Program pengembangan jasa konstruksi	458.602.100
30	Program penyelenggaraan penataan ruang	662.252.486
31	Program pengembangan perumahan	129.852.030
32	Program kawasan permukiman	1.147.861.574
33	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.434.002.350
34	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.523.553.750
35	Program penanggulangan bencana	797.429.371
36	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.632.124.850
37	Program pemberdayaan sosial	343.441.550
38	Program rehabilitasi sosial	132.327.050
39	Program perlindungan dan jaminan sosial	44.700.000
40	Program penangganan bencana	393.180.350
41	Program pengelolaan taman makam pahlawan	30.073.000
42	Program perencanaan tenaga kerja	150.000.000
43	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.380.210.400
44	Program penempatan tenaga kerja	228.737.400
45	Program hubungan industrial	2.249.408.700
46	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	59.287.238
47	Program perlindungan perempuan	105.204.500
48	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	37.228.900
49	Program perlindungan khusus anak	373.543.150

No.	Program	Anggaran (Rp)
48	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	117.695.321
49	Program penanganan kerawanan pangan	125.065.750
50	Program pengawasan keamanan pangan	58.028.950
51	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	41.004.500
52	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	48.769.550
53	Program penetapan tanah ulayat	25.800.000
54	Program penatagunaan tanah	36.894.000
55	Program perencanaan lingkungan hidup	104.094.650
56	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	458.104.360
57	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	113.108.120
58	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.902.250
59	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	97.732.320
60	Program pengelolaan persampahan	3.213.232.682
61	Program pendaftaran penduduk	180.512.950
62	Program pencatatan sipil	101.548.700
63	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	101.960.250
64	Program pengelolaan profil kependudukan	17.770.900
65	Program peningkatan kerjasama desa	25.000.000
66	Program administrasi pemerintahan desa	2.195.634.850
67	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.974.443.800
68	Program pengendalian penduduk	268.029.250
69	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.639.427.930
70	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.594.828.550

No.	Program	Anggaran (Rp)
71	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.894.410.898
72	Program informasi dan komunikasi publik	1.463.175.490
73	Program aplikasi informatika	1.721.231.300
75	Program pengawasan dan pemerksaan koperasi	22.186.550
76	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	13.985.750
77	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	11.815.139
78	Program pemberdayaan dan pelindungan koperasi	318.422.642
79	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	80.229.550
80	Program pengembangan UMKM	150.329.750
81	Program pengembangan iklim penanaman modal	58.441.650
82	Program promosi penanaman modal	247.607.950
83	Program pelayanan penanaman modal	272.476.750
84	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	502.826.750
85	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	21.648.450
86	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	358.968.866
87	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.543.930.216
89	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000
90	Program penyelenggaraan statistik sektoral	296.246.659
91	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	138.389.650
92	Program pengembangan kebudayaan	807.350.100
93	Program pengembangan kesenian tradisional	230.000.000
94	Program pembinaan sejarah	104.062.500
95	Program pelestasrian dan pengelolaan cagar budaya	382.460.200
96	Program pembinaan perpustakaan	670.043.847
97	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	26.449.400

No.	Program	Anggaran (Rp)
98	Program Pengelolaan Arsip	227.419.430
99	Program pengelolaan perikanan tangkap	288.750.000
100	Program pengelolaan perikanan budidaya	417.878.200
101	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13.000.000
102	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	417.878.200
103	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.238.508.226
104	Program pemasaran pariwisata	1.518.504.144
105	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	409.414.580
106	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.317.167.475
107	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.811.862.250
108	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	375.773.295
109	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	93.714.650
110	Program penyuluhan pertanian	2.044.561.478
111	Program perizinan usaha pertanian	139.649.000
112	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	897.000.000
113	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	97.908.100
114	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	53.159.900
115	Program pengunaaan dan pemasaran produk dalam negeri	139.781.500
116	Program perencanaan dan pembangunan industri	500.652.150
117	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	22.168.800
118	Program pembangunan kawasan transmigrasi	12.674.950
119	Program pengembangan kawasan transmigrasi	464.605.450
120	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	687.695.850
121	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	20.151.046.600

No.	Program	Anggaran (Rp)
122	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.164.139.892
123	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80.811.050
124	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	393.707.150
125	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	288.621.400
126	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	965.793.319
127	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	57.919.800
128	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	946.116.774
129	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	518.205.275
130	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	673.146.371.419
	Total	**1.144.316.334.393**

Muaro Sijunjung, Januari 2025

BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

BUPATI SIJUNJUNG

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BENNY DWIFA YUSWIR

Jabatan : BUPATI SIJUNJUNG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja tahunan, seperti yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muaro Sijunjung, 30 September 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

REVISI PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
			Awal	Revisi
1. Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,84	4,10
	2. PDRB perkapita (ADHB)	Rp Juta	52,74	51,60
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3. Angka Kemiskinan	Persen	5,36	5,70
	4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	-	0,40
	5. Gini Rasio	Nilai	0,239	0,236
3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	4. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,58	4,65
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	6. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,98	73,10
5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	7. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	-	61,20
6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	9. Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	-	60,6
7. Meningkatnya kualitas ketahanan budaya berlindaskan ABS-SBK	10. Indeks ABS-SBK	Nilai	-	72,93
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	11. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,1	78,50
	12. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	-	3,200
9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	13. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	-	81,34
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	77,23	69,20
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	15. Indeks Risiko Bencana	Nilai	-	105,0
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	16. Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	43,10	46,43
13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	17. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Nilai	-	62,28

Muaro Sijunjung, 30 September 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.777.390.850	2.543.144.747
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	850.189.964	222.476.564
3	Program Administrasi Umum	273.096.400	163.857.840
4	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	15.579.590.677	12.951.315.735
5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	758.223.150	167.871.650
6	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	956.869.650	232.254.825
7	Program penelitian dan pengembangan daerah	964.949.000	706.315.700
8	Program pengelolaan keuangan daerah	142.733.519.512	135.459.424.205
9	Program pengelolaan barang milik daerah	406.725.250	133.399.580
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	791.065.786	443.828.850
.11	Program kepegawaian daerah	1.588.429.888	543.560.250
12	Program pengembangan SDM	474.521.368	543.560.250
13	Program penyelenggaraan pengawasan	756.692.000	245.263.204
14	Program perumusan kebijakan, pendam-pingan dan asistensi	431.670.560	33.758.600
15	Program pengelolaan pendidikan	88.237.120.164	70.582.334.680
16	Program pendidik dan tenaga kependidikan	59.997.450	23.245.123
17	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	97.671.646.050	74.951.852.750
18	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	770.521.294	458.968.500
19	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	456.330.600	364.643.040
20	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	947.788.380	676.991.700
21	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.401.689.750	801.543.276
22	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4.895.681.700	122.852.000
23	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	525.004.050	925.322.120
24	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.020.957.475	20.008.500
25	Program pengembangan permukiman	1.147.861.574	0
26	Program penataan bangunan gedung	1.851.980.475	1.276.997.500
27	Program penataan bangunan dan lingkungannya	1.870.437.975	61.398.500

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
28	Program penyelenggaraan jalan	45.846.565.749	23.419.484.959
29	Program pengembangan jasa konstruksi	458.602.100	88.541.450
30	Program penyelenggaraan penataan ruang	662.252.486	142.674.371
31	Program pengembangan perumahan	129.852.030	109.337.420
32	Program kawasan permukiman	1.147.861.574	44.767.360
33	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.434.002.350	7.143.594.093
34	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.523.553.750	1.576.316.618
35	Program penanggulangan bencana	797.429.371	774.776.247
36	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.632.124.850	2.614.357.190
37	Program pemberdayaan sosial	343.441.550	104.162.500
38	Program rehabilitasi sosial	132.327.050	41.466.650
39	Program perlindungan dan jaminan sosial	44.700.000	8.873.850
40	Program penanganan bencana	393.180.350	110,494,000
41	Program pengelolaan taman makam pahlawan	30.073.000	2.276.500
42	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.380.210.400	635.283.850
43	Program penempatan tenaga kerja	228.737.400	82.492.750
44	Program hubungan industrial	2.249.408.700	3.319.642.250
45	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	59.287.238	54.290.200
46	Program perlindungan perempuan	105.204.500	189.478.000
47	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	37.228.900	6.063.400
48	Program perlindungan khusus anak	373.543.150	224.125.890
49	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	117.695.321	88.817.622
50	Program penanganan kerawanan pangan	125.065.750	111.804.614
51	Program pengawasan keamanan pangan	58.028.950	80.947.500
52	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	41.004.500	28.805.400
53	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	48.769.550	0
54	Program penetapan tanah ulayat	25.800.000	10.048.200
55	Program penatagunaan tanah	36.894.000	47.611.100
56	Program perencanaan lingkungan hidup	267.564.250	227.943.250
57	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	458.104.360	102.301.816
58	Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	113.108.120	72.595.650

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
59	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.902.250	22.065.560
60	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	97.732.320	55.508.728
61	Program pengelolaan persampahan	3.213.232.682	3.475.645.335
62	Program pendaftaran penduduk	180.512.950	63.355.850
63	Program pencatatan sipil	101.548.700	86.297.400
64	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	101.960.250	30.142.250
65	Program pengelolaan profil kependudukan	17.770.900	3.989.700
66	Program peningkatan kerjasama desa	25.000.000	0
67	Program administrasi pemerintahan desa	2.195.634.850	1.369.825.020
68	Program pemberdayaan lembaga kemasya-rakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.974.443.800	416.952.045
69	Program pengendalian penduduk	268.029.250	279.527.700
70	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.106.748.120	6.958.217.069
71	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	1.594.828.550	1.305.570.600
72	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.894.410.898	10.825.122.691
73	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	419.942.214	296.074.660
74	Program pengelolaan aplikasi informatika	378.368.850	499.838.309
75	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	22.186.550	17.823.850
76	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	13.985.750	16.606.050
77	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	11.815.139	0
78	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	318.422.642	140.134.750
79	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	80.229.550	26.886.385
80	Program pengembangan UMKM	150.329.750	17.558.100
81	Program pengembangan iklim penanaman modal	58.441.650	47.000.750
82	Program promosi penanaman modal	247.607.950	50.203.450
83	Program pelayanan penanaman modal	272.476.750	148.213.390

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
84	Program pengendalian pelaksanaan penana-man modal	502.826.750	57.618.400
85	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	21.648.450	2.613.550
86	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	358.968.866	62.033.658
87	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.543.930.216	2.152.606.605
89	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	300.000.000	200.000.000
90	Program penyelenggaraan statistik sektoral	296.246.659	45.172.770
91	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	138.389.650	6.251.300
92	Program pengembangan kebudayaan	2.962.092.900	2.339.685.450
93	Program pengembangan kesenian tradisional	250.000.000	359.017.500
94	Program pembinaan sejarah	104.062.500	94.048.600
95	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	382.460.200	227.672.200
96	Program pembinaan perpustakaan	1.016.959.447	696.578.898
97	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	26.449.400	19.798.000
98	Program Pengelolaan Arsip	185.590.000	87.543.950
99	Program pengelolaan perikanan tangkap	50.854.480	35.266.388
100	Program pengelolaan perikanan budidaya	364.541.605	302.107.414
101	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13.000.000	4.067.920
102	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	117.384.815	70.633.699
103	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.238.508.226	998.161.354
104	Program pemasaran pariwisata	239.657.959	161.539.583
105	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	187.458.620	57.046.058
106	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.363.055.024	1.116.498.334
107	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	7.811.862.250	3.286.994.787
108	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	375.773.295	310.868.080
109	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	141.734.950	49.341.450
110	Program penyuluhan pertanian	1.257.043.825	1.001.960.000
111	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	552.115.256	322.851.463

No.	Program	Anggaran (Rp)	
		Awal	Perubahan
112	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	37.820.100	17.597.650
113	Program penggunaaan dan pemasaran produk dalam negeri	90.124.075	86.181.000
114	Program perencanaan dan pembangunan industri	481.500.700	233.315.350
115	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	17.978.000	12.808.500
116	Program pembangunan kawasan transmigrasi	193.395.350	172.413.250
117	Program pengembangan kawasan transmigrasi	205.131.000	125.497.300
118	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	859.424.400	710.842.050
119	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.114.164.920	1.048.473.120
120	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	64.060.500	0
121	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	393.707.150	403.952.550
122	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	288.621.400	38.563.200
123	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	965.793.319	151.491.050
124	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	57.919.800	5.640.000
125	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	946.116.774	60.031.100
126	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	518.205.275	162.707.290
127	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	673.146.371.419	661.198.109.508
	Total	**1.144.316.334.393**	**1.055.484.188.211**

Muaro Sijunjung, 30 September 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

BUPATI SIJUNJUNG

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kolaboratif serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatandangan dibawah ini :

Nama	:	BENNY DWIFA YUSWIR
Jabatan	:	Bupati Sijunjung
Alamat	:	Jalan Prof. M Yamin, SH No. 17, Muaro Sijunjung, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini kami menyatakan, bahwa dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan penjenjangan kinerja (*cascading*) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana tergambar pada lampiran pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini kami buat secara sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

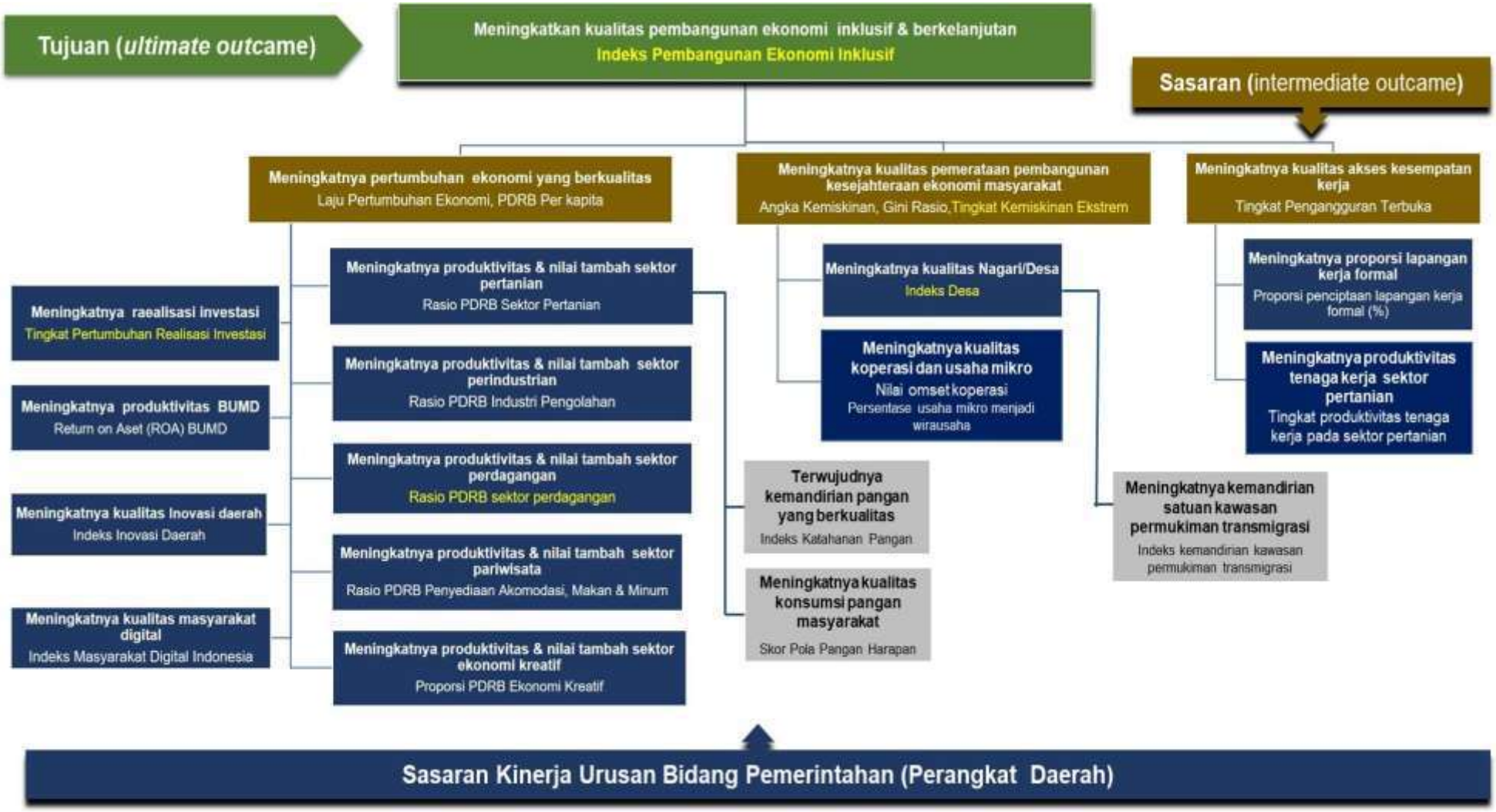
Muaro Sijunjung, 30 September 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

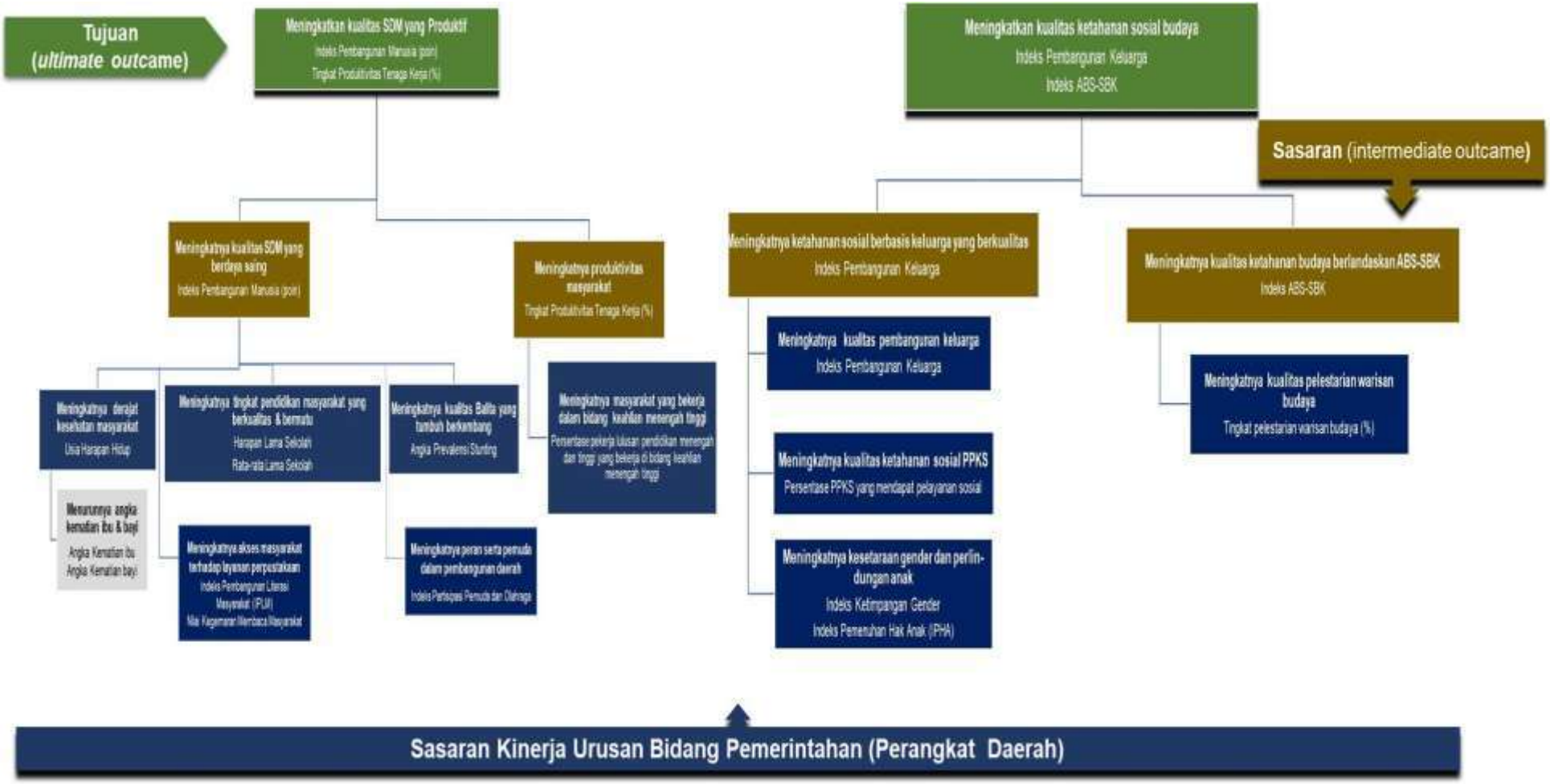
Lampiran Surat Pernyataan :

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : "Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri"

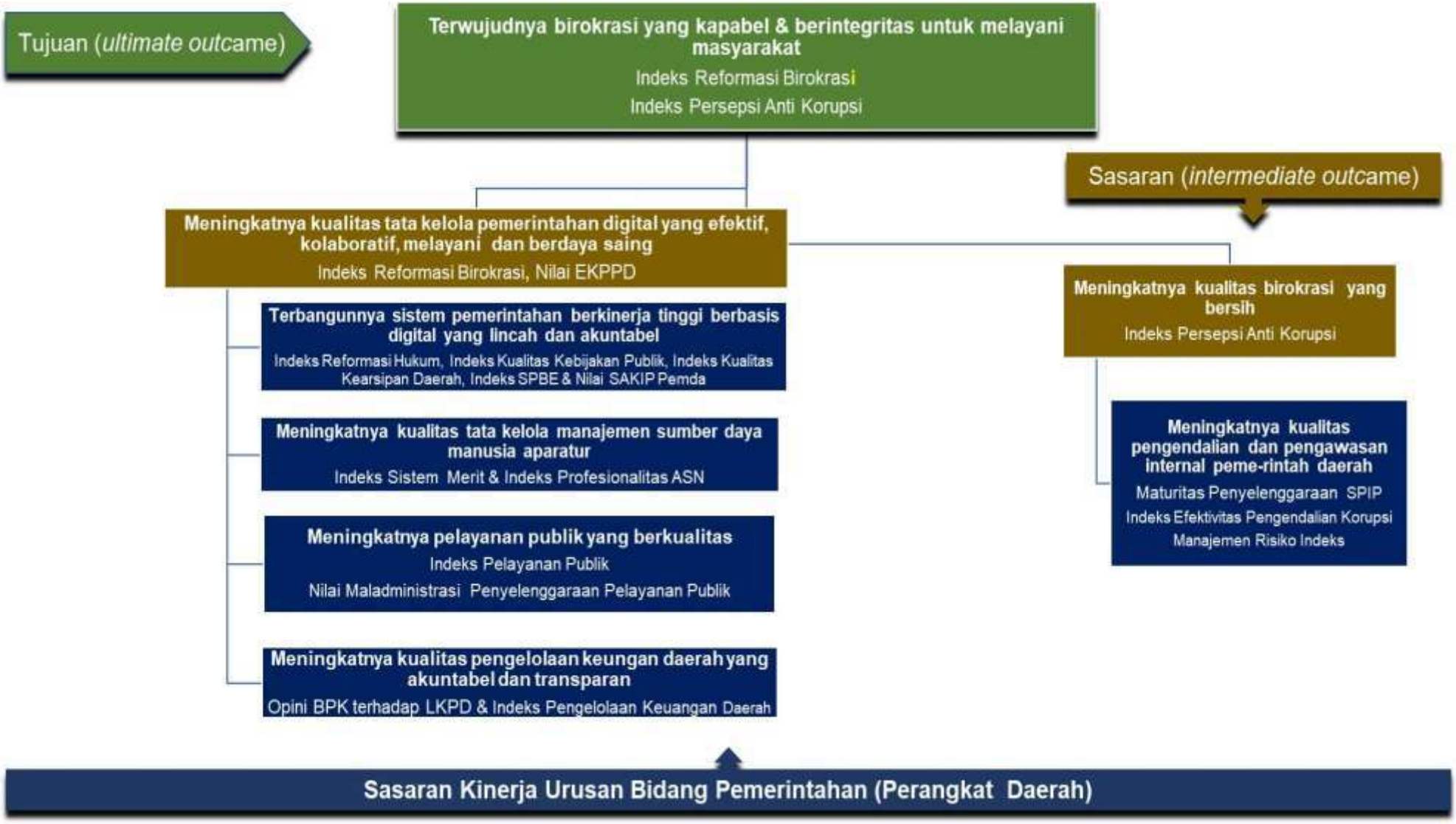
1. Penjenjangan kinerja (*cascading*) misi; Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif



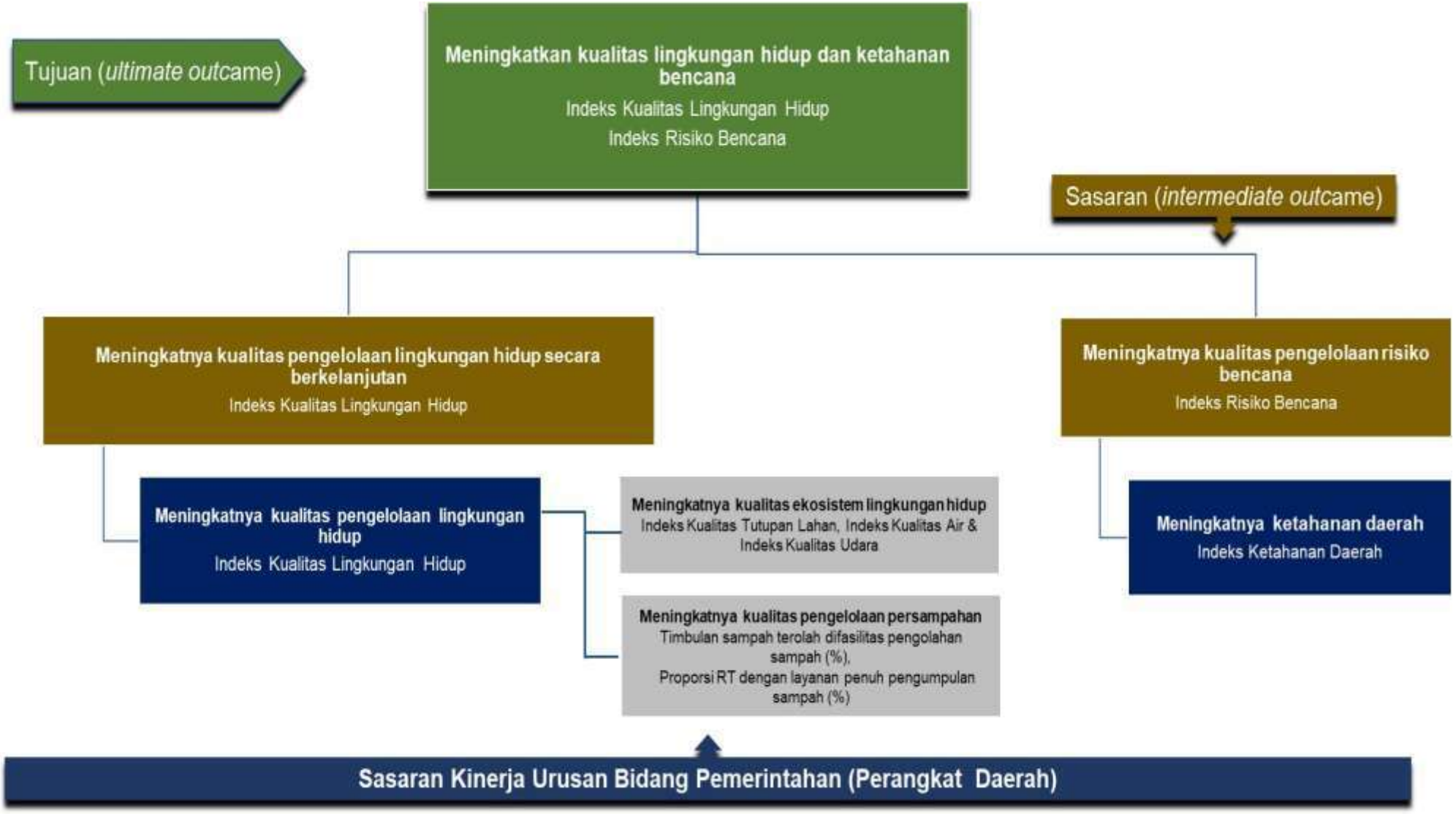
2. Penjenjangan kinerja (*cascading*) misi; Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif



3. Penjenjangan kinerja (*cascading*) misi; Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital



4. Penjenjangan kinerja (*cascading*) misi; Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan



5. Penjenjangan kinerja (*cascading*) misi; Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan



Muaro Sijunjung, 30 September 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 70 /KPTS-BPT-2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan perlu terlebih dahulu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 16 Februari 2024
BUPATI SIJUNJUNG.

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 188.45/70 /KPTS-BPT-2024
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026

Visi : Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi										
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permen-PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Nilai Reformasi Birokrasi Kab. Sijunjung diukur berdasarkan Permen-PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan	58,0	60,1	62,0	Setdakab	Kemen PANRB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional	2. Nilai SAKIP Pemda	Nilai	Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi SAKIP Kab. Sijunjung diukur berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Penerapan SAKIP Kab. Sijunjung dievaluasi oleh KemenPANRB terdiri komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja secara menyeluruh.	70,1	73,0	75,0	• Setdakab • Bapppeda • Inspektorat	Kemen PANRB
	3. Manajemen Risiko Indeks	Nilai	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.	BPKP untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko adalah menilai 8 komponen proses manajemen risiko kriteria yang telah ditetapkan	Evaluasi penerapan manajemen risiko sebagai media untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko Pemerintah Kab. Sijunjung.	2,900	3,000	3,200	• Bapppeda • Inspektorat • BKAD	BPKP
2. Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas dan inovatif	4. Indeks Pelayanan Publik	Indek	Untuk memenuhi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyeleng-	Indeks Pelayanan Publik merupakan alat ukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L dan Pemda berdasarkan aspek kebijakan pelayanan,	3,95	4,0	4,10	Setdakab	Kemen PANRB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
				gara pelayanan Publik.	aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi					
	5. Indeks Inovasi Daerah	Skor	Untuk memenuhi ketentuan pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri melalui website http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/	Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu kriteria penilaian oleh Kemendagri bagi Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovatif dalam upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.	55,0	60,1	62,0	Bapppeda	Kemendagri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
Misi 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata										
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) \times 100\%$ Keterangan : PE :Pertumbuhan Ekonomi PDB :Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1:Periode sebelumnya	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya.	4,76	5,00	5,11	Bapppeda	BPS
	7. Gini Rasio	Nilai		$G = 1 - 2 * (1 - \sum_{i=1}^{n} (n - i + 1) * p_i) / n$ Keterangan : G : Gini Rasio N : jumlah individu p_i: proporsi kumulatif total pendapatan yang diterima oleh individu yang paling miskin hingga yang paling kaya Σ : jumlah semua nilai	Gini rasio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.	0,260	0,250	0,240	Bapppeda	BPS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	8. PDRB perkapita (ADHB)	Rp Juta	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.	Nilai PDRB / Jumlah penduduk pertengahan tahun	PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/ daerah	47,62	49,47	51,43	Bapppeda	BPS
4. Menurunnya kemiskinan	9. Angka kemiskinan	%	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana RPJMN) Tahun 2020-2024.	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan / Jumlah penduduk X 100%	Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.	5,96	5,63	5,53	Bapppeda	
5. Memperluas kesempatan kerja	10. Tingkat Pengangguran terbuka	%	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.	Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja X 100%	Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan.	4,50	4,20	4,00	• Bapppeda • Dinas Nakertrans	BPS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)										
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	11. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.	$IPM = \sqrt{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.	73,0	73,60	74,30	Bapppeda	BPS
	12. Prevalensi balita stunting	%		$PAB\ (5)\ SP\ stunting = \frac{JAB\ (5)\ SP\ stunting}{JAB\ (5)} X\ 1$ Keterangan : PAB (5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB (5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek	Stunting (kerdil) merupakan kondisi Balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada	14,0	12,0	11,0	• Bappeda • Dinas Kesehatan • Dinas Dalduk dan KB	Kemenkes

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
				(stunting) pada waktu tertentu JAB (5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama	bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Kejadian balita stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini.					
	13. Indeks Pembangunan Gender	Poin		$IPG = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$	IPG menggambarkan rasio capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.	94,00	94,50	95,0	• Bapppeda • Dinas Sosial, PPr dan PA	Kemen PPr dan PA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
Misi 4 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan										
7. Meningkatnya kualitas infastruktur	14. Indeks Infrastruktur	Nilai	Infrastruktur untuk mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah mengedepankan prinsip *pro-poor, pro growth* dan *pro-job*.	$I_{infra} = (I_j \times y) + (Re \times y) + (Rint \times y) + (CI \times y) + (CA \times y) + (CS$ Keterangan : Iinfra : Indeks Infrastruktur Ij : Infrastruktur jalan Re : Rasio Eletrifikasi Rint : Rasio layanan broad 4G LTE CI : Cakupan laya-nan irigasi CA : Cakupan layanan air minum CS : Cakupan sanitasi yang layak y : bobot	Indeks infrastruktur merupakan gambaran kondisi ketersediaan dan keterjangkauan layanan infrastuktur dan prasarana dasar bersifat kuantitatif, dengan parameter penghitungan terdiri dari; 1) indeks infrastruktur jalan, 2) rasio elektrifikasi, 3) rasio layanan broadband 4G LTE, 4) cakupan layanan irigasi, 5) cakupan layanan air bersih, dan 6) cakupan sanitasi yang layak	63,0	66,0	69,0	• Setdakab • Bapppeda • Dinas PUPR • Dinas Kominfo	Bapppeda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
7. Meningkatnya kualitas infastruktur	15. Indeks Infrastruktur jalan	Nilai	Untuk mengetahui tingkat kualitas jalan dan sarana penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa disegala sektor.	 Keterangan : Idx : Indeks Jln Infrastrur Jalan JMt : Tingkat p kondisi jalan mantap Drn : Tingkat draina-se minimal 1,5 meter SJl : Tingkat n terpe-nuhinya sarana dan prasarana jalan y : bobot	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta menimalisir angka kecelakaan.	43,0	46,0	49,0	• Bapppeda • Dinas PUPR • Dinas Perhubungan	Bapppeda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional	Target			Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
			Alasan	Formula		2024	2025	2026		
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	Untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024.	IKLH = 0,376 x IKA + 0,465 x IKU + 0,159 x IKL	IKLH merupakan menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).	74,0	75,00	76,0	Dinas Perkim dan LH	Kementerian LHK

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. FAMIS BASYIR

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Definisi Operasional	Sumber Data
			Alasan	Formula		
Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya saing dan Mandiri						
Misi : Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif						
1. Meningkatnya partumbuhan ekonomi yang berkualitas	1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) \times 100\%$ Keterangan : PE :Pertumbuhan Ekonomi PDB:Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1:Periode sebelumnya	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi ba-rang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu	BPS
	2) PDRB per kapita	Rp juta		Nilai PDRB ADHB / Jumlah penduduk pertengahan tahun	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk.	BPS
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	3) Angka Kemiskinan	Persen	Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan / Jumlah penduduk X 100%	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam men-capai kesejahteraan dasar masyarakat.	BPS
	4) Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen		Penduduk dengan pengeluaran kurang dari US$1,9 PPP dibandingkan jumlah penduduk	Kemiskinan ekstrem merupakan penduduk ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu; kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Semakin tinggi tingkat kemiskinan ekstrim menunjukkan belum meratanya pendapatan masyarakat	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan BPS
	5) Gini rasio	Nilai		Rasio Gini = $1 - \sum_{i}^{n} (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pen-dapatan i Yi : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Rasio gini adalah formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.	BPS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Definisi Operasional	Sumber Data
			Alasan	Formula		
Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya saing dan Mandiri						
3. Meningkatnya kualitas akses kesempatan kerja	6) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indi-kator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi ter-tentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi	BPS
Misi : Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif						
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	7) Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Semakin meningkat perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi capaian IPM.	BPS
5. Meningkatnya produktivitas masyarakat	8) Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	$\frac{\text{Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam kegiatan ekonomi.	BPS
6. Meningkatnya ketahanan sosial berbasis keluarga yang berkualitas	9) Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	Implementasi Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	$iBangga = \frac{\sum_{i=1}^{3} D_i}{k}$	Indeks Pembangunan Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, imensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.	BKKBN dan BPS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Definisi Operasional	Sumber Data
			Alasan	Formula		
Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya saing dan Mandiri						
7. Meningkatnya kualitas keta-hanan budaya berlandaskan ABS-SBK	10) Indeks ABS-SBK	Nilai	Implementasi pasal 6 butir c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Si-junjung di Provinsi Sumatera Barat	$\text{Indeks ABS} - \text{SBK} = \sum_{1}^{n} W_j X \text{ Indeks } D_j$ Dengan keterangan sebagai berikut: Indeks ABS-SBK : Indeks Implementasi Falsafah ABS-SBK D_j : nilai dimensi ke-j W_j : nilai bobot dimensi ke-j	Indeks ABS-SBK merupakan pendekatan yang strategis, karena memberikan data terukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mem-perkuat kebijakan berbasis budaya ditinjau dari berbagai aspek adat istiadat, ekonomi, sosial dan lingkungan dengan me-nggunakan metode agregasi linier. Nilai Indeks ABS-SBK semakin besar menunjukkan penerapan ABS-SBK berkualitas serta dapat terjaganya keta-hanan budaya yang adaptif	Bapppeda Kab. Sijunjung (Indikator madiri)
Misi : Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital						
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	11) Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	Nilai Reformasi Birokrasi diukur melalui metode perhitungan yang diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023	Reformasi Birokrasi merupakan media untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan refor-masi birokrasi. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi semakin tinggi menunjukkan penerapan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terintegratif dan kolaboratif yang berdampak	KemenPANRB
8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan digital yang efektif, kolaboratif, melayani dan berdaya saing	12) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Skor	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	Perhitungan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EK-PPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pe-laksana Peraturan Peme-rintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	EKPPD merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keber-hasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksa-naan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah	Kemendagri
9. Meningkatnya kualitas birokrasi yang bersih	13) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	Implementasi Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah me-lakukan penilaian mandiri Selanjutnya KPK RI akan melakukan verifikasi ter-hadap *self-assesment* ter-sebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh *Transparency Internatio-al* Indonesia. Semakin tingginya IPAK menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara, sehingga terwujudnya `1pemerintahan yang bersih dan adaptif.	KPK RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Definisi Operasional	Sumber Data
			Alasan	Formula		
Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya saing dan Mandiri						
Misi : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan						
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Semakin tinggi ILKH menunjukkan lingkungan hidup berkualitas	Kementerian LH
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko bencana	15) Indeks Risiko Bencana	Nilai	Implementasi Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : **Hazard** (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. **Vulnerability** (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana melalui pendekatan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana diartikan semakin baik, menunjukkan tingkat kapasitas semakin meningkat, dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.	BNPB
Misi : Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan						
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	16) Indeks Infrastruktur Jalan	Nilai	Implementasi Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 serta men-dukung pencapaian sasaran strategis misi pertama	$IdxJln = \{JMtp \times y\} + \{Drn \times y\} + \{SJln \times y\}$ IdxJln : Indeks Infrastruktur Jalan JMtp : Tingkat kondisi jalan mantap Drn : Tingkat drainase minimal 1,5 meter	Indeks infrastuktur jalan merupakan alat ukur untuk melihat tingkat kualitas jalan dan sarana penunjang lainnya dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa disegala sektor. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kebutu-han sosial ekonomi masyarakat serta menimali-sir angka kecelakaan	Bapppeda Kab. Sijunjung (Indikator madiri)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Penjelasan		Definisi Operasional	Sumber Data
			Alasan	Formula		
Visi : Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya saing dan Mandiri						
				SJln : Tingkat terpenuhinya sarana dan prasarana jalan y : bobot		
13. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	17) Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Nilai	Implementasi Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 serta mendukung pencapaian sasaran strategis misi kedua	$Indsr = \{(A \times y)+(S \times y)+ (Rt \times y)\}$ Indsr : Indeks layanan infrastuktur dasar A : Cakupan layanan air minum yang layak S : Cakupan sanitasi yang layak Rt : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau y : bobot	Indeks layanan infrastruktur dasar merupakan alat ukur untuk melihat ketersediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar terlihat dari semakin tingginya Indeks layanan infrastuktur dasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara inklusif	Bapppeda Kab. Sijunjung (Indikator madiri)

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Muaro Sijunjung, 5 Februari 2026
An. Sekretaris Daerah Kab. Sijunjung
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kabag Organisasi

HERRISON, SE
NIP.19690916 201001 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jln. Ir. Juanda No. 3 Telp. (0754) 20953 Fax. (0754) 20953
MUARO SIJUNJUNG (27511)

PERNYATAAN REVIU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 700/ 140/Itda-2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muaro Sijunjung, 26 Maret 2026

Inspektur,

WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19710705 199803 1 011